

Dr. H. Amka, M.Si.

MANAJEMEN SARANA SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSI



MANAJEMEN SARANA SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSI



Dr. H. Amka, M.Si, seorang praktisi pendidikan ini dilahirkan di Kotabaru Kalimantan Selatan, 7 Maret 1962. Menempuh pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Pakar pendidikan karakter ini melanjutkan kuliah jenjang strata dua (S-2) pada Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Gelar Doktor bidang Ilmu Administrasi diperoleh dari Universitas Tujuh Belas-Agustus 1945 Surabaya. Saat ini ia menjadi dosen Prodi Pendidikan Khusus di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Menulis menjadi kegemaran tersendiri bagi pria yang menekuni kajian pendidikan karakter ini. Beberapa karya yang sudah diterbitkan antara lain: (1) Hati Pusat Pendidikan Karakter, 2012, (2) Karakter Guru Profesional, 2012, (3) Meletakkan Pondasi Usia Emas Anak Indonesia, 2013, (4) Membangun Kecerdasan Karakter Anak Usia Dini, 2013, (5) Membudayakan Pendidikan Karakter Melalui Olah Raga Tenis Meja, 2015, (6) Mutiara Pendidikan Karakter, 2015, (7) Membumikan Al-Qur'an di Sekolah, 2016, (8) Buku Ajar Belajar dan Pembelajaran, (9) Media Pembelajaran Inklusi, 2018, (10) Penguatan Pendidikan Karakter, 2019, (11) Filsafat Pendidikan, 2019.



Penerbit
Nizamia Learning Center
Ruko Valencia AA 15 Gemurung, Gedangan - Sidoarjo
Telp. 031 - 8914874
Email : nizamiacenter@gmail.com

ISBN 978-623-7189-61-1



Manajemen Sarana Sekolah Penyelenggara Inklusi

PENULIS:

Dr. H. Amka, M.Si.



**Nizamia Learning Center
2020**

Manajemen Sarana Sekolah Penyelenggara Inklusi

Dr. H. Amka, M.Si.

© Nizamia Learning Center 2020

Anggota IKAPI

Register 166/JTI/2016

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penulis :

Dr. H. Amka, M.Si.

Layout & Desain cover:

Siti Nur Asniawati

Diterbitkan pertama kali oleh

Nizamia Learning Center

Ruko Valencia AA-15 Sidoarjo

Telepon (031) 8913874

E-mail: nizamiacenter@gmail.com

Website: www.nizamiacenter.com

Cetakan pertama, Januari 2020

vi + 149 hlm 16x24

ISBN 978-623-7169-61-1

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur alhamdulillah penulisan buku manajemen sarana sekolah penyelenggara inklusi dapat terselesaikan. Dengan harapan bisa menjadi referensi penambah wawasan tentang dunia pendidikan khususnya untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kebijakan tersebut memberi warna baru bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ditegaskan dalam pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. Indonesia Menuju Pendidikan Inklusi Secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang cacat anak. Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 6 ayat 1).

Buku ini menekankan pada bagaimana konsep dan manajemen yang disertai penjelasan rinci mengenai sarana dan prasarana lembaga pendidikan inklusi secara khusus. Buku ini diharapkan dapat memberikan modal pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang memiliki tugas langsung dalam dunia pendidikan inklusi, agar mampu memahami bagaimana menyiapkan dan mengelola berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia.

Semoga apa yang telah diupayakan ini bermanfaat bagi para pembaca. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berserah diri dan

memohon hidayah-Nya dan semoga kesalahan dalam penulisan buku ini mendapat ampunan dari-Nya.

Billahittaufiq wal hidayah

Banjarmasin, 11 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~iii
Daftar Isi ~v

BAB I:

MANAJEMEN SEKOLAH

A. Konsep Manajemen.....	2
B. Fungsi Manajemen	12
C. Aspek Manajemen Sekolah.....	21

BAB II:

SEKOLAH INKLUSI

A. Memahami Sekolah Inklusi.....	38
B. Kebijakan Pendidikan Inklusi	47
C. Mewujudkan Sekolah Inklusi	65

BAB III:

SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH INKLUSI

A. Standar Sarana Pendidikan.....	70
B. Standar Sarana Prasarana Sekolah Inklusi	74
C. Sarana Perpustakaan.....	75
D. Sarana Laboratorium	80
E. Sarana Kelas.....	86
F. Sarana Ibadah.....	89
G. Sarana Olahraga	90

BAB IV:

SARANA DAN PRASARANA ANAK

BERKEBUTUHAN KHUSUS

A. Sarana dan Prasarana Anak Tunanetra.....	96
B. Sarana dan Prasarana Anak Tunarungu	104
C. Sarana dan Prasarana Anak Tunagrahita	110

D. Sarana dan Prasarana Anak Tunadaksa.....	117
E. Sarana dan Prasarana Anak Tunalaras.....	123
REGULASI TERKAIT SARANA PRASARANA SEKOLAH.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	149



— BAB I —

MANAJEMEN SEKOLAH

A. Konsep Manajemen

Bertolak dari asumsi bahwa *life is education and education is life* dalam arti pendidikan sebagai persoalan hidup dan kehidupan maka diskursus seputar pendidikan merupakan salah satu topik yang selalu menarik. Setidaknya ada dua alasan yang dapat diidentifikasi sehingga pendidikan tetap *up to date* untuk dikaji. Pertama, kebutuhan akan pendidikan memang pada hakikatnya krusial karena bertautan langsung dengan ranah hidup dan kehidupan manusia. Membicarakan pendidikan berarti berbicara kebutuhan primer manusia. Kedua, pendidikan juga merupakan wahana strategis bagi upaya perbaikan mutu kehidupan manusia, yang ditandai dengan meningkatnya level kesejahteraan, menurunnya derajat kemiskinan dan terbukanya berbagai alternatif opsi dan peluang mengaktualisasikan diri di masa depan.

Dalam tataran nilai, pendidikan mempunyai peran vital sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua lini kehidupan. Di samping itu, pendidikan dapat menjadi determinan penting bagi proses transformasi personal maupun sosial. Dan sesungguhnya inilah idealisme pendidikan yang mensyaratkan adanya pemberdayaan.

Namun dalam tataran ideal, pergeseran paradigma yang awalnya memandang lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial, kini dipandang sebagai suatu lahan bisnis basah yang mengindikasikan perlunya perubahan pengelolaan. Perubahan pengelolaan tersebut harus seirama dengan tuntutan zaman.

Situasi, kondisi dan tuntutan pasca booming-nya era reformasi membawa konsekuensi kepada pengelola pendidikan untuk melihat kebutuhan kehidupan di masa depan. Maka merupakan hal yang logis ketika pengelola pendidikan mengambil langkah antisipatif untuk mempersiapkan diri bertahan pada zamannya. Mempertahankan diri dengan tetap mengacu pada pembenahan total mutu pendidikan berkaitan erat dengan manajemen pendidikan adalah sebuah keniscayaan.

Perkembangan dinamis aplikasi manajemen berangkat dari keragaman definisi tentang manajemen. Semula, manajemen yang berasal dari bahasa Inggris: *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus atau kemampuan menjalankan dan mengontrol suatu urusan atau “*act of running and*

controlling a business” (Oxford, 2005). Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Stoner (1986) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan. G.R. Terry (1986) –sebagaimana dikutip Malayu S.P Hasibuan (1996)- memandang manajemen sebagai suatu proses, sebagai berikut: “Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources”. Sementara, Malayu S.P. Hasibuan (1995) dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia” mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen kemudian diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu system yang bersifat sosio-ekonomi-teknis; dimana system adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan secara organik; dinamis berarti bergerak, berkembang ke arah suatu tujuan; sosio (social) berarti yang bergerak di dalam dan yang menggerakkan sistem itu adalah manusia; ekonomi berarti kegiatan dalam sistem bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia; dan teknis berarti dalam kegiatan dipakai harta, alat-alat dan cara-cara tertentu (Kadarman, 1991).

Dengan demikian, manajemen merupakan kebutuhan yang niscaya untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi, serta mengelola berbagai sumberdaya organisasi, seperti sarana dan prasarana, waktu, SDM, metode dan lainnya secara efektif, inovatif, kreatif, solutif, dan efisien.

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya

untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal; dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan, kesehatan, bisnis, finansial dan sebagainya. Dengan kata lain efektif menyangkut tujuan dan efisien menyangkut cara dan lamanya suatu proses mencapai tujuan tersebut.

Dalam Manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di dalamnya. Pada umumnya ada empat (4) fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan (directing) dan fungsi pengendalian (controlling). Untuk fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi staffing (pembentukan staf). Para manajer dalam organisasi perusahaan bisnis diharapkan mampu menguasai semua fungsi manajemen yang ada untuk mendapatkan hasil manajemen yang maksimal. Di bawah ini akan dijelaskan arti definisi atau pengertian masing-masing fungsi manajemen :

1. Fungsi Perencanaan / Planning
Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.
2. Fungsi Pengorganisasian / Organizing
Fungsi perngorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan.
3. Fungsi Pengarahan / Directing / Leading
Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.
4. Fungsi Pengendalian / Controlling
Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan.

Ilmu manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang disistemisasi, dikumpulkan dan diterima kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya metode ilmiah yang dapat digunakan dalam setiap penyelesaian masalah dalam manajemen. Namun selain itu,

beberapa ahli seperti Follet menganggap manajemen adalah sebuah seni. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antarmanusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sulit dipelajari.

Walaupun perkembangan ilmu dan teori manajemen lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan perkembangan bisnis, tapi pada dasarnya organisasi di luar bisnis (publik) dapat memanfaatkan perubahan-perubahan tersebut. Hingga saat ini teori manajemen sudah berkembang hingga generasi kelima (V), walaupun istilah sebenarnya kurang tepat, barangkali lebih tepat disebut sebagai perbedaan pendekatan paradigma.

Secara sistematis perkembangan teori manajemen tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- **Generasi Manajemen I**
 - Sebutan : *Jungle management* = Manajemen berbuat (*by doing*)
 - Ciri Utama : Mengerjakan sendiri segala sesuatu (*doing things by our self*)
 - Sumber Kekuatan : Diri sendiri
 - Tipe Organisasi : Kepemilikan
 - Konsep Dasar : -

- **Generasi Manajemen II**
 - Sebutan : Manajemen kendali (*by directing*)
 - Ciri Utama : Mengerjakan sesuatu melalui orang lain (*doing things through by the other people*)
 - Sumber Kekuatan : Pemimpin
 - Tipe Organisasi : Feodal hirarkies / kepemilikan (*step hierarchy*)
 - Konsep Dasar : -

- **Generasi Manajemen III**
 - Sebutan : Manajemen hasil (*by result*)
 - Ciri Utama : Menggunakan target kuantitatif
 - Sumber Kekuatan : Pemimpin dan tim kerja
 - Tipe Organisasi : Struktural/ fungsional

Konsep Dasar : Pembagian kerja, interest pribadi, dan penghargaan untuk pekerjaan/tugas

▪ Generasi Manajemen IV

Sebutan : Manajemen kreativitas nilai (value creative)

Ciri Utama : Menggunakan target kualitatif, kepuasan pelanggan atau pekerja

Sumber Kekuatan : Nilai-nilai yang disepakati bersama

Tipe Organisasi : Struktural/fungsional dengan modifikasi (komputerisasi)

Konsep Dasar : Pembagian m

anagerial, pemisahan pemilik dan manajer, pemisahan cara berpikir dan berbuat, dan otomatisasi

▪ Generasi Manajemen V

Sebutan : Manajemen pengetahuan dan jaringan antar manusia (*knowledge and human networking*)

Ciri Utama : Menggunakan keunggulan perorangan dalam kerjasama (jaringan)

Sumber Kekuatan : Jaringan antar profesional

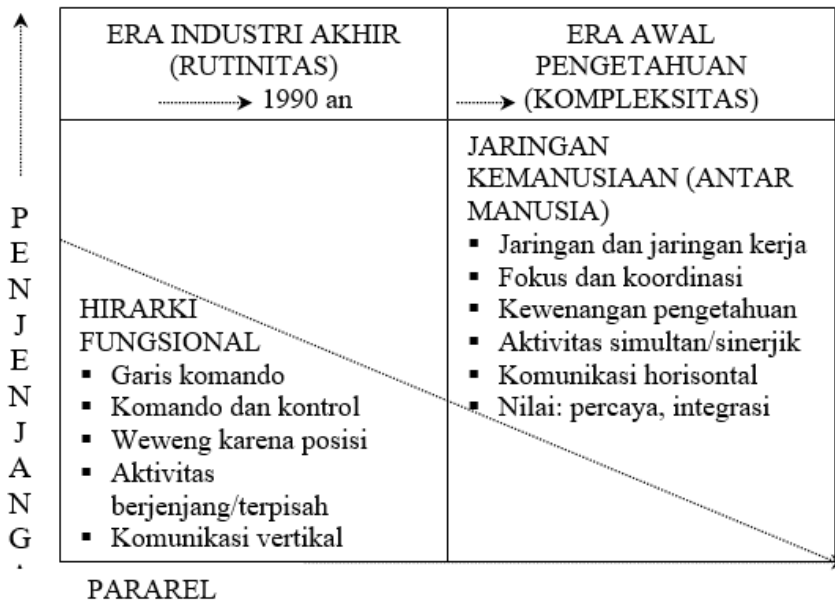
Tipe Organisasi : Jaringan antar manusia (*human networking*)

Konsep Dasar : Jaringan kelompok, proses kerja terintegrasi, pengaturan dan pemilihan waktu yang manusiawi, kesatuan fokus tugas/tim kerja sesuai dengan kondisi.

(Sumber: diolah dari Joiner, 1994; Savage, 1990)

Berkaitan dengan perkembangan pergeseran pandangan manajemen di atas, khususnya dari era industri akhir (Generasi IV) ke era pengetahuan awal (Generasi V), Savage (1990:200) melihat adanya ciri penjenjangan yang tajam menuju pararelitas dalam konsep manajemen pada kedua generasi tersebut, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 : Pergeseran Manajemen Generasi IV ke Generasi V



Sumber : Savage (1990)

Urgensi Manajemen dalam Pengelolaan Pendidikan

Kepekaan melihat kondisi global yang bergulir dan peluang masa depan menjadi modal utama untuk mengadakan perubahan paradigma dalam manajemen pendidikan. Modal ini akan dapat menjadi pijakan yang kuat untuk mengembangkan pendidikan. Pada titik inilah diperlukan berbagai komitmen untuk perbaikan kualitas. Ketika melihat peluang, dan peluang itu dijadikan modal, kemudian modal menjadi pijakan untuk mengembangkan pendidikan yang disertai komitmen yang tinggi, maka secara otomatis akan terjadi sebuah efek domino (positif) dalam pengelolaan organisasi, strategi, SDM, pendidikan dan pengajaran, biaya, serta marketing pendidikan.

Untuk menuju point education change (perubahan pendidikan) secara menyeluruh, maka manajemen pendidikan adalah hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan out-put yang diinginkan. Walaupun masih terdapat institusi pendidikan yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan pendidikannya. Manajemen yang digunakan masih konvensional, sehingga kurang bisa menjawab tantangan zaman dan terkesan tertinggal dari modernitas.

Jika manajemen pendidikan sudah tertata dengan baik dan membumi, niscaya tidak akan lagi terdengar tentang pelayanan sekolah yang buruk, minimnya profesionalisme tenaga pengajar, sarana-prasarana tidak memadai, pungutan liar, hingga kekerasan dalam pendidikan. Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan empat fungsi dasar: *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dalam penggunaan sumberdaya organisasi. Karena itulah, aplikasi manajemen organisasi hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi yang bersangkutan.

a. **Planning**

Satu-satunya hal yang pasti di masa depan dari organisasi apapun termasuk lembaga pendidikan adalah perubahan, dan perencanaan penting untuk menjembatani masa kini dan masa depan yang meningkatkan kemungkinan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mondy dan Premeaux (1995) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil, terutama karena aktivitas pengorganisasian, pemotivasian, penunjukkan staff, dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik (Fred R. David, 2004).

Dalam dinamika masyarakat, organisasi beradaptasi kepada tuntutan perubahan melalui perencanaan. Menurut Johnson (1973) bahwa: *“The planning process can be considered as the vehicle for accomplishment of system change”*. Tanpa perencanaan sistem tersebut tak dapat berubah dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan lingkungan yang berbeda. Dalam sistem terbuka, perubahan dalam sistem terjadi apabila kekuatan lingkungan menghendaki atau menuntut bahwa suatu keseimbangan baru perlu diciptakan dalam organisasi tergantung pada rasionalitas pembuat keputusan. Bagi sistem sosial, satu-satunya wahana untuk perubahan inovasi dan kesanggupan menyesuaikan diri ialah pengambilan keputusan manusia dan proses perencanaan.

Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan lembaga pendidikan, diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanakan. Oleh karena itu kegiatan perencanaan

sebaiknya melibatkan setiap unsur lembaga pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Rusyan (1992) ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan, diantaranya:

- Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai/personil lembaga pendidikan.
- Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan.
- Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personil.
- Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur dan petunjuk pelaksanaan lainnya.
- Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana/sekala pengkajian.
- Memilih para staf (pelaksana), administrator dan melakukan pengawasan.
- Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja (kinerja), pola pengisian staf dan formulir laporan pengajuan.
- Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) material dan tempat.
- Menyiapkan anggaran dan mengamankan dana.
- Menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan.

Hirarki Rencana



Sumber: Terry (1986); Kadarman et.al (1996)

b. Organizing

Tujuan pengorganisasian adalah mencapai usaha terkoordinasi dengan menerapkan tugas dan hubungan wewenang. Malayu S.P. Hasbuan (1995) mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian fungsi manajemen dapat dilihat terdiri dari tiga aktivitas berurutan: membagi-bagi tugas menjadi pekerjaan yang lebih sempit (spesialisasi pekerjaan), menggabungkan pekerjaan untuk membentuk departemen (departementalisasi), dan mendelegasikan wewenang (Fred R. David, 2004).

Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merupakan salah satu aktivitas manajerial yang juga menentukan berlangsungnya kegiatan kependidikan sebagaimana yang diharapkan. Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi memiliki berbagai unsur yang terpadu dalam suatu sistem yang harus terorganisir secara rapih dan tepat, baik tujuan, personil, manajemen, teknologi, siswa/member, kurikulum, uang, metode, fasilitas, dan faktor luar seperti masyarakat dan lingkungan sosial budaya.

Sutisna (1985) mengemukakan bahwa organisasi yang baik senantiasa mempunyai dan menggunakan tujuan, kewenangan, dan pengetahuan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dalam organisasi yang baik semua bagiannya bekerja dalam keselarasan seakan-akan menjadi sebagian dari keseluruhan yang tak terpisahkan. Semua itu baru dapat dicapai oleh organisasi pendidikan, manakala dilakukan upaya: 1) Menyusun struktur kelembagaan, 2) Mengembangkan prosedur yang berlaku, 3) Menentukan persyaratan bagi instruktur dan karyawan yang diterima, 4) Membagi sumber daya instruktur dan karyawan yang ada dalam pekerjaan.

c. Actuating

Dalam pembahasan fungsi pengarahan, aspek kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Sehingga definisi fungsi pengarahan selalu dimulai dimulai dan dinilai cukup hanya dengan mendefinisikan kepemimpinan itu sendiri.

Menurut Kadarman (1996) kepemimpinan dapat diartikan sebagai seni atau proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok. Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan, proses atau fungsi yang digunakan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin bertugas untuk memotivasi, mendorong dan memberi keyakinan kepada orang yang dipimpinnya dalam suatu entitas atau kelompok, baik itu individu sebagai entitas terkecil sebuah komunitas ataupun hingga skala negara, untuk mencapai tujuan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki. Pemimpin juga harus dapat memfasilitasi anggotanya dalam mencapai tujuannya. Ketika pemimpin telah berhasil membawa organisasinya mencapai tujuannya, maka saat itu dapat dianalogikan bahwa ia telah berhasil menggerakkan organisasinya dalam arah yang sama tanpa paksaan.

Dalam konteks lembaga pendidikan, kepemimpinan pada gilirannya bermuara pada pencapaian visi dan misi organisasi atau lembaga pendidikan yang dilihat dari mutu pembelajaran yang dicapai dengan sungguh-sungguh oleh semua personil lembaga pendidikan. Soetopo dan Soemanto (1982) menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan ialah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas dan sukarela. Di dalam kepemimpinan pendidikan sebagaimana dijalankan pimpinan harus dilandasi konsep demokratisasi, spesialisasi tugas, pendelegasian wewenang, profesionalitas dan integrasi tugas untuk mencapai tujuan bersama yaitu tujuan organisasi, tujuan individu dan tujuan pemimpinnya.

Ada tiga keterampilan pokok yang dikemukakan Hersey dan Blanchard (1988) -sebagaimana dikutip oleh Syafaruddin (2005) dalam bukunya *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*- yang berlaku umum bagi setiap pimpinan termasuk pimpinan lembaga pendidikan, yaitu:

1. *Technical skill-ability to use knowledge, methods, techniques and equipment necessary for the performance of specific tasks acquired from experiences, education and training.*

2. *Human skill-ability and judgment in working with and through people, including in understanding of motivation and an application of effective leadership.*
3. *Conceptual skill-ability to understand the complexities of the overall organization and where one's own operation fits into the organization. This knowledge permits one to act according to the objectives of the total organization rather than only on the basis of the goals and needs of one's own immediate group.*

d. Controlling

Sebagaimana yang dikutip Muhammad Ismail Yusanto (2003), Mockler (1994) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan.

Dalam konteks pendidikan, Depdiknas (1999) mengistilahkan pengawasan sebagai pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervisi yang harus diterapkan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan memfokuskan pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi para instruktur atau staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan.
- 2) Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Para staf diberikan dorongan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan pimpinan hanya membantu.
- 3) Pengawasan dalam bentuk saran yang efektif.
- 4) Pengawasan yang dilakukan secara periodik.

B. Fungsi Manajemen

Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang teratur dan tematis yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi agar anak mempunyai sifat dan tabiat yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang menjadi eksistensi mendidik terletak pada tujuan

mendidik, sedang mengajar eksistensinya terletak pada materinya. Oleh karena itu dapat disimpulkan mendidik lebih luas dari pada mengajar, dan mengajar merupakan sarana dalam mendidik.

Adapun faktor-faktor yang membatasi kemampuan pendidikan:

- Faktor anak didik : di dalam anak didik terdpt potensi-potensi yang butuh pendidikan dari luar
- Faktor pendidik : guru mempunyai metode penyampaian yang berbeda dan beragam.
- Faktor lingkungan : lingkungan sangat berpengaruh baik positif maupun negatif.

Lama pendidikan tidak akhirnya. Menurut Lengeverd bahwa di saat ketika anak itu telah sadar atau mengenal kewibawaan. Adapun ciri-cirinya: adanya kestabilan, sifat tanggung jawab dan sifat berdiri sendiri. Menurut sarjanawan pendidikan dari Barat lama pendidikan jika anak telah berumur 20 atau 21 tahun sedang menurut bangsa Timur, bahwa pendidikan tidak hanya di mulai sejak prenatal melainkan di mulai sejak anak diciptakan (konsepsi). Dasar dan tujuan merupakan salah masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu dasar akan menentukan corak dan isi dari pendidikan akan menuju arah mana anak dibawa.

Lima Fungsi Utama Manajemen

Penting untuk diingat, bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manager, dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:

1. **Planning**- menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. **Organizing**- mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. **Staffing**- menentukan keperluan-keperluan sumberdaya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.

4. **Motivating**- mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan. Bernard Berelson dalam Siswanto, mendefenisikan motivasi sebagai keadaan jiwa dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan, dan mengarah dan menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberikan kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.¹
5. **Controlling**- mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.²

Fungsi-Fungsi Manajemen

Perencanaan³

- “Self-audit”- menentukan keadaan organisasi sekarang.
- “Survey” - lingkungan.
- “Objectives”- tujuan.

Pengorganisasian

- “Identity”- tetapkan dengan teliti dan tentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- “Break work down”- bagi-bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas setiap orang.
- Tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi.

Kepegawaian

- Tentukan keperluan-keperluan sumber daya
- Kerahkanlah pegawai-pegawai sedapat mungkin
- Saringlah

Pemotivasian

- Berhubungan dengan staf dan jelaskan tujuan-tujuan kepada bawahan.
- Bagi-bagikan ukuran-ukuran pelaksanaan- “performance standards”-
- Latih dan bimbing bawahan untuk memenuhi ukuran-ukuran pelaksanaan itu.

1 Siswanto, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 119

2 Brantas, Dasar-dasar Manajemen, (Alfabeta, 2009), h. 28.

3 Perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektifitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lihat Siswanto, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 70.

Pengawasan

- Tetapkan ukuran-ukuran.
- Perbaiki penyimpangan-penyimpangan.
- Berhubungan selalu selama proses pengawasan.⁴

Manajemen pendidikan mempunyai fungsi yang terpadu dengan proses pendidikan khususnya dengan pengelolaan proses pembelajaran. Dalam hubungan ini, terdapat beberapa fungsi manajemen pendidikan. Berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen ini, pandangan dari beberapa ahli ialah sebagai berikut:

Menurut G.R. Terry terdapat empat fungsi manajemen, yaitu:

1. Planning (perencanaan);
2. Organizing (pengorganisasian);
3. Actuating (pelaksanaan); dan
4. Controlling (pengawasan).

Henry Fayol terdapat lima fungsi manajemen, meliputi:

1. Planning (perencanaan);
2. Organizing (pengorganisasian);
3. Commanding (pengaturan);
4. Coordinating (pengkoordinasian); dan
5. Controlling (pengawasan).

Harold Koontz dan Cyril O' Donnel mengemukakan lima fungsi manajemen, mencakup:

1. Planning (perencanaan);
2. Organizing (pengorganisasian);
3. Staffing (penentuan staf);
4. Directing (pengarahan); dan
5. Controlling (pengawasan).

L. Gullick mengemukakan tujuh fungsi manajemen, yaitu:

1. Planning (perencanaan);
2. Organizing (pengorganisasian);
3. Staffing (penentuan staf);
4. Directing (pengarahan);
5. Coordinating (pengkoordinasian);
6. Reporting (pelaporan); dan
7. Budgeting (panganggaran).

Berbicara tentang fungsi manajemen pendidikan Islam tidaklah bisa terlepas dari fungsi manajemen secara umum seperti yang

⁴ Brantas, Dasar-dasar Manajemen, (Alfabeta, 2009), h. 28-30.

dikemukakan Henry Fayol seorang industriawan Prancis, dia mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu adalah merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Gagasan Fayol itu kemudian mulai digunakan sebagai kerangka kerja buku ajar ilmu manajemen pada pertengahan tahun 1950, dan terus berlangsung hingga sekarang.

Sementara itu Robbin dan Coulter⁵ mengatakan bahwa fungsi dasar manajemen yang paling penting adalah merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Senada dengan itu Mahdi bin Ibrahim⁶ menyatakan bahwa fungsi manajemen atau tugas kepemimpinan dalam pelaksanaannya meliputi berbagai hal, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pula halnya dalam pendidikan Islam perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola pendidikan Islam. Sebab perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan, kesalahan dalam menentukan perencanaan pendidikan Islam akan berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan pendidikan Islam. Bahkan Allah memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain sebuah rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam Al Qur'an Surat Al Hasyr : 18 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرْ نَفْسُ مَا قَدَّمْتُمْ لِعَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

5 Robbin dan Coulter, Manajemen (edisi kedelapan),(PT Indeks, Jakarta, 2007), hal. 9

6 Mahdi bin Ibrahim, Amanah dalam Manajemen,(Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1997), hal. 61.

Ketika menyusun sebuah perencanaan dalam pendidikan Islam tidaklah dilakukan hanya untuk mencapai tujuan dunia semata, tapi harus jauh lebih dari itu melampaui batas-batas target kehidupan duniawi. Arahkanlah perencanaan itu juga untuk mencapai target kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kedua-duanya bisa dicapai secara seimbang.

Mahdi bin Ibrahim⁷ mengemukakan bahwa ada lima perkara penting untuk diperhatikan demi keberhasilan sebuah perencanaan, yaitu:

1. Ketelitian dan kejelasan dalam membentuk tujuan
2. Ketepatan waktu dengan tujuan yang hendak dicapai
3. Keterkaitan antara fase-fase operasional rencana dengan penanggung jawab operasional, agar mereka mengetahui fase-fase tersebut dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Perhatian terhadap aspek-aspek amaliah ditinjau dari sisi penerimaan masyarakat, mempertimbangkan perencanaan, kesesuaian perencanaan dengan tim yang bertanggung jawab terhadap operasionalnya atau dengan mitra kerjanya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dicapai, dan kesiapan perencanaan melakukan evaluasi secara terus menerus dalam merealisasikan tujuan.
5. Kemampuan organisatoris penanggung jawab operasional.

Sementara itu menurut Ramayulis⁸ mengatakan bahwa dalam Manajemen pendidikan Islam perencanaan itu meliputi:

1. Penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif, prioritas kebutuhan agar melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan, masyarakat dan bahkan murid.
2. Penetapan tujuan sebagai garis pengarah dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan
3. Formulasi prosedur sebagai tahap-tahap rencana tindakan.
4. Penyerahan tanggung jawab kepada individu dan kelompok-kelompok kerja.

7 Mahdi bin Ibrahim, Amanah dalam Manajemen, hal. 63

8 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Kalam Mulia, Jakarta, 2008), hal. 271

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Manajemen Pendidikan Islam perencanaan merupakan kunci utama untuk menentukan aktivitas berikutnya. Tanpa perencanaan yang matang aktivitas lainnya tidaklah akan berjalan dengan baik bahkan mungkin akan gagal. Oleh karena itu buatlah perencanaan sematang mungkin agar menemui kesuksesan yang memuaskan.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa diluluhlantakan oleh kebathilan yang tersusun rapi.

Menurut Terry⁹ pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses.

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan.¹⁰

Sementara itu Ramayulis¹¹ menyatakan bahwa pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interkasi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan, dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Isla, baik yang bersifat individual, kelompok, maupun kelembagaan.

Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi yaitu Kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan islam akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan Islam

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengorganisasian merupakan fase kedua setelah perencanaan yang telah dibuat

9 George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006), hal. 73

10 Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Prkatik,(Gema Insani, Jakarta, 2003), hal. 101

11 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, hal. 272

sebelumnya. Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang saja. Dengan demikian diperlukan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah suatu kelompok kerja yang efektif. Banyak pikiran, tangan, dan keterampilan dihimpun menjadi satu yang harus dikoordinasi bukan saja untuk diselesaikan tugas-tugas yang bersangkutan, tetapi juga untuk menciptakan kegunaan bagi masing-masing anggota kelompok tersebut terhadap keinginan keterampilan dan pengetahuan.

3. Fungsi Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah proses memberikan bimbingan kepada rekan kerja sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di dalam fungsi pengarahan terdapat empat komponen, yaitu pengarah, yang diberi pengarahan, isi pengarahan, dan metode pengarahan. Pengarah adalah orang yang memberikan pengarahan berupa perintah, larangan, dan bimbingan. Yang diberi pengarahan adalah orang yang diinginkan dapat merealisasikan pengarahan. Isi pengarahan adalah sesuatu yang disampaikan pengarah baik berupa perintah, larangan, maupun bimbingan. Sedangkan metode pengarahan adalah sistem komunikasi antara pengarah dan yang diberi pengarahan.

Dalam manajemen pendidikan Islam, agar isi pengarahan yang diberikan kepada orang yang diberi pengarahan dapat dilaksanakan dengan baik maka seorang pengarah setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu : Keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan kebijakan. Isi pengarahan baik yang berupa perintah, larangan, maupun bimbingan hendaknya tidak memberatkan dan diluar kemampuan sipenerima arahan, sebab jika hal itu terjadi maka jangan berharap isi pengarahan itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh sipenerima pengarahan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa fungsi pengarahan dalam manajemen pendidikan Islam adalah proses bimbingan yang didasari prinsip-prinsip religius kepada rekan kerja, sehingga orang tersebut mau melaksanakan tugasnya dengan sungguh- sungguh dan bersemangat disertai keikhlasan yang sangat mendalam.

4. Fungsi Pengendalian (*Controlling*)

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan Didin dan Hendri¹² menyatakan bahwa dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.

Dalam pendidikan Islam pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen baik yang bersifat materil maupun spiritual.

Menurut Ramayulis¹³ pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksana berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada manajernya dan Allah sebagai pengawas yang Maha Mengetahui. Di sisi lain pengawasan dalam konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.

Tuntutan akan lulusan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan. Tata Administrasi Negara (TAN) dan Tata Laksana Pemerintahan (TLP) dalam bidang pendidikan haruslah dapat menyesuaikan dan menjawab tantangan tersebut.

Untuk mencapai terselenggaranya pendidikan bermutu, dikenal dengan perlunya paradigma baru pendidikan yang difokuskan pada otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Unsur-unsur paradigma baru pendidikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut Pengertian otonomi dalam pendidikan belum sepenuhnya mendapatkan kesepakatan pengertian dan implementasinya. Tetapi paling tidak, dapat dimengerti sebagai bentuk pendelegasian

12 Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Prkatik*, hal. 156

13 Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, hal. 274

kewenangan seperti dalam penerimaan dan pengelolaan peserta didik dan staf pengajar/ staf non akademik, pengembangan kurikulum dan materi ajar, serta penentuan standar akademik. Dalam penerapannya di sekolah. misalnya, paling tidak bahwa guru/pengajar semestinya diberikan hak-hak profesi yang mempunyai otoritas di kelas, dan tak sekedar sebagai bagian kepanjangan tangan birokrasi di atasnya .

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output dan outcome yang memuaskan pelanggan. Akuntabilitas menuntut kesepadanan antara tujuan lembaga pendidikan tersebut dengan kenyataan dalam hal norma, etika dan nilai (values) termasuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Hal ini memerlukan transparansi (keterbukaan) dari semua pihak yang terlibat dan akuntabilitas untuk penggunaan semua sumber dayanya.

Suatu pengendalian dan akreditasi dari luar diperlukan melalui proses evaluasi tentang pengembangan mutu lembaga pendidikan tersebut. Hasil akreditasi tersebut perlu diketahui oleh masyarakat yang menunjukkan posisi lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam menghasilkan produk atau jasa yang bermutu. Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh suatu badan yang berwenang.

Adapun evaluasi adalah suatu upaya sistematis untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang menghasilkan kesimpulan tentang nilai, manfaat, serta kinerja dari lembaga pendidikan atau unit kerja yang dievaluasi, kemudian menggunakan hasil evaluasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Evaluasi bisa dilakukan secara internal atau eksternal.

C. Aspek Manajemen Sekolah

1. Manajemen Kurikulum

Dalam pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan, seperti dikemukakan oleh Caswel dan Campbell (1935) yang mengatakan bahwa kurikulum... *to be composed of all the children have under the guidance of teachers*. Dipertegas lagi oleh pemikiran Ronald C. Doll (1974) yang mengatakan bahwa: “... *the curriculum has changed from content of courses study and list of subject and courses to all experiences which are offered to learners under the auspices or direction of school*.”

Definisi Kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga diartikan merupakan seperangkat rencana dan pengaturan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum selanjutnya diartikan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan. Kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan.

Kurikulum juga diartikan sebagai seluruh usaha atau kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya belajar baik di dalam kelas maupun diluar kelas, anak tidak terbatas belajar dari apa yang diberikan di sekolah saja, seluruh perkembangan aspek seseorang dijangkau dalam kurikulum ini baik aspek fisik, intelektual, sosial maupun emosional. Kurikulum juga merupakan segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak pendidikan yang diperoleh anak disekolah, kurikulum ini meliputi segala sarana dan prasarana sekolah. Dari beberapa pengertian diatas, kurikulum dapat disimpulkan kurikulum adalah upaya institusi pendidikan dalam merencanakan dan mengatur tujuan, isi dan bahan pelajaran beserta cara yang digunakan dalam upaya untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan dengan pemberian kegiatan-kegiatan dibawah tanggung-jawab sekolah demi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian diatas juga dapat disimpulkan terdapat dua dimensi kurikulum, yaitu dimensi pertama adalah rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Kurikulum dalam bidang pendidikan dan pembelajaran menduduki posisi strategis dalam menentukan arah dan ketercapaian tujuan pendidikan, kurikulum menentukan ragam kompetensi yang ingin dicapai dari suatu proses pendidikan dan pembelajaran. Kurikulum senantiasa terkait dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan selalu bersifat dinamis, kurikulum tidak hanya sebagai bagian yang menentukan perwujudan masyarakat masa depan sebagaimana dicita citakan bangsa, tapi juga harus selalu mengikuti tuntutan perubahan, sehingga perubahan dan atau perbaikan kurikulum merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari.

Menurut Hamid Hasan (1988) mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi yaitu:

- a. Kurikulum sebagai suatu ide; yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan.
- b. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide; yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat dan waktu.
- c. Kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; dalam bentuk praktek pembelajaran.
- d. Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Nasution yang dikutip oleh Suryo Suboto (1984; 19), mengungkapkan bahwa: “kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya baik dilakukan didalam sekolah maupun diluar sekolah”. Menurut UU

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 19, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Ada beberapa aspek penting yang perlu dipahami dalam pengelolaan yaitu: Isi kurikulum, Proses kurikulum, Penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum harus memperhatikan: Pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, sebagai hasil dalam melaksanakan tugasnya, Pengetahuan inti (pokok) yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya, Pengetahuan penunjang yang diperkirakan dapat membantu mengayakan pengetahuan dan keterampilan peserta.

Terdapat lima prinsip yang terkandung dalam pengembangan kurikulum, antara lain:

a. Relevansi

Dapat diartikan sebagai kesesuaian, kesepadanan atau keserasian program pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna bagi kehidupan.

b. Efektivitas

Efektivitas yang dimaksud adalah efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar peserta didik dalam suatu pengembangan dan pelaksanaan suatu kurikulum.

c. Efisiensi

Efisiensi yang dimaksud adalah hal yang berhubungan dengan waktu, tenaga, peralatan dan biaya. Dalam dunia pendidikan agar kegiatan berjalan secara efisien maka harus direncanakan sedemikian rupa.

d. Kontinuitas

Adalah adanya saling kesinambungan antara satu bidang dengan bidang studi lainnya, atau dalam jenjang bidang studi yang bersangkutan.

e. Fleksibilitas

Dalam hal ini menyangkut fleksibel peserta didik dalam memilih program pelajaran dan juga fleksibilitas guru dalam mengembangkan program pengajaran.

Manajemen kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dialami oleh siswa yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktifitas belajar. Strategi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga sampai evaluasi perlu didukung oleh sumber-daya yang memadai. Manajemen kurikulum ditinjau dari kurun waktu bisa short-term dan long-term yang penting ada keterkaitan komprehensif dan berkelanjutan antara satu program dengan program yang berikutnya. Dengan demikian pengertian dari manajemen kurikulum adalah merupakan upaya mengoptimalkan pengalaman-pengalaman belajar siswa secara produktif. Dimana dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Dalam tahap ini kurikulum dijabarkan sampai menjadi rencana pengajaran (RP). Untuk itu perlu dilakukan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan GBPP menjadi analisis pelajaran (AMP). Yang paling pokok dalam tahapan ini adalah mengkaji mana pokok bahasa/sub pokok bahasa yang esensial atau biasanya yang sukar dipahami oleh siswa.
- 2) Berdasarkan kalender pendidikan dari dinas pendidikan, sekolah harus menghitung hari kerja efektif dan jam pelajaran efektif untuk setiap mata pelajaran, memperhitungkan hari libur, hari untuk ulangan dan hari-hari tidak efektif.
- 3) Menyusun program tahunan (Prota)
- 4) Menyusun program catur wulan (Proca)
- 5) Program satuan pelajaran (PSP). Dalam penyusunan PSP guru sudah harus memasukkan secara jelas kegiatan untuk sub pokok bahasan, termasuk bagaimana tes formatif dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran.
- 6) Rencana pengajaran (RP).

b. Tahap Pengorganisasian dan Koordinasi

Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler, sebagi berikut:

- 1) Pembagian tugas mengajar dan tugas lain perlu dilakukan secara merata sesuai dengan bidang keahlian dan minat guru.
- 2) Penyusunan jadwal pelajaran diupayakan agar guru mengajar maksiamal.

- 3) Penyusunan pola kegiatan perbaikan dan pengayaan secara normal setiap mata pelajaran akan memerlukan kegiatan perbaikan bagi siswa yang belum tuntas penugasan terhadap bahan ajar.
- 4) Penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler perlu difokuskan untuk mendukung kegiatan kulikuler dan kegiatan lain yang mengarah, pada pembentukan keimanan, kepribadian dan kepemimpinan dengan keterampilan tertentu.
- 5) Penyusunan jadwal penyegaran guru.

c. Tahap Pelaksanaan

Tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervise, dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara itu guru akan merasa didampingi pimpinan, sehingga akan meningkatkan semangat kerjanya.

d. Tahap Pengendalian

Pada tahap ini paling tidak ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu

- 1) Kepala sekolah perlu mengingatkan guru bahwa evaluasi memiliki tujuan ganda, yaitu mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran khusus (TPK) dan mengetahui kesulitan siswa. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran guru dapat menggunakan berbagai alat penilaian yang sesuai, sedangkan untuk mengetahui kesulitan siswa menggunakan tes diagnostic.
- 2) Hasil evaluasi harus benar-benar dimanfaatkan guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Untuk itu kepala sekolah harus selalu mengingatkan guru jika siswa belum menguasai bahan ajar yang esensial perlu dilakukan perbaikan.

2. Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama oleh setiap administrator pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu, tanah, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah (*site, building, equipment, dan furniture*). Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi berarti pada jalannya proses

pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Pengelolaan yang dimaksud meliputi: Perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan disekolah. Prasarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam prasarana pendidikan.

- a. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, ruang laboratorium.
- b. Prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi sangat menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantor sekolah, tanah, dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha, kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah dan tempat parkir kendaraan.

Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan disekolah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui system perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efisien.
- b. Mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien.
- c. Mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah.

Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Pengelolaan yang dimaksud meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks, karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional dan local. Perencanaan ini merupakan system perencanaan terpadu dengan perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tergantung pada jenis program

pendidikan dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan ini mencakup, 1. Perencanaan pengadaan tanah untuk gedung/bangunan sekolah, 2. Perencanaan pengadaan bangunan, 3. Perencanaan pembangunan bangunan, 4. Perencanaan pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya untuk pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, menukar dan sebagainya. Dalam pengadaan gedung/bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun baru, membeli menyewa, menerima hibah dan menukar bangunan. Untuk pengadaan perlengkapan atau perabot dapat dilakukan dengan jalan membeli.

3. Inventarisasi

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada disekolah atau lembaga pendidikan lainnya ada yang berasal dari pemerintah ada juga yang berasal dari usaha sendiri, seperti: membeli, membuat sendiri, sumbangan, dan sebagainya. Semua barang yang ada tersebut hendaknya diinventarisir, melalui inventarisasi memungkinkan dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, ukuran, harga dan sebagainya. Khususnya untuk sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah (milik Negara) wajib diadakan inventarisasi secara cermat, dengan menggunakan format-format yang telah ditetapkan, atau mencatat semua barang inventarisasinya di dalam Buku Induk Barang Inventaris dan Buku Golongan Barang Inventaris.

4. Pemeliharaan

Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap tetapi lama-kelamaan akan mengarah pada kerusakan dan kehancuran bahkan kepunahan. Namun agar sarana dan prasarana tersebut agar tidak cepat rusak atau hancur diperlukan usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang kontinu untuk

mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan yang baik dan siap dipergunakan.

5. **Penggunaan**

Penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pendidikan disekolah merupakan tanggung jawab pimpinan lembaga pendidikan tersebut yang bisa dibantu oleh wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berkaitan dengan penanganan sarana dan prasarana.

6. **Penghapusan**

Barang-barang yang ada dilembaga pendidikan, terutama yang berasal dari pemerintah tidak akan selamanya bisa digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, hal ini kerana rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, barang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan. Dengan keadaan seperti diatas maka barang-barang tersebut harus segera dihapus untuk membebaskan dari biaya pemeliharaan dan meringankan beban kerja inventaris dan membebaskan tanggung jawab lembaga terhadap barang-barang tersebut.

Dalam manajemen sarana dan prasarana kita mengetahui bahwa terdapat tiga komponen (lahan bangunan, gedung sekolah, perlengkapan sekolah) dalam mengolah sarana dan prasarana dimana pengolahan ini membantu dalam proses peningkatan mutu pendidikan karena sangat membantu dalam kegiatan belajar mengajar.

3. **Manajemen Peserta Didik**

Peserta didik adalah siapa saja yang mengikuti proses pendidikan, dimulai dari bayi sampai kepada kakek-kakek. Peserta didik ini subjeknya sangat beragam tidak terbatas kepada anak yang belum dewasa saja.

Peserta didik adalah individu yang memiliki kepribadian, tujuan, cita-cita hidup dan potensi diri, oleh karena itu ia tidak dapat diperlakukan semena-mena. Ia memiliki kekuatan untuk menetapkan sekolah mana yang akan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan diri dan kepribadiannya.

Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah.

Fungsi dari keberadaan manajemen peserta didik adalah :

- a. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat.
- b. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya dan lingkungan sosial masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial.
- c. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, ialah agar peserta didik tersalurkan hobi, kesenangan dan minatnya.
- d. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan.
- b. Manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan
- c. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik
- d. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan
- e. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik
- f. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik

- g. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah lebih-lebih di masa depan

Ruang lingkup manajemen peserta didik yaitu :

- a. Analisis Kebutuhan Peserta Didik
Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan (sekolah). Kegiatan ini meliputi Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dan Menyusun program kegiatan kesiswaan
- b. Rekrutmen Peserta Didik
Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan (sekolah) pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan. Kegiatan ini meliputi Pembentukan panitia penerimaan siswa baru dan Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka.
- c. Seleksi Peserta Didik
Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah: Melalui tes atau ujian, Melalui penelusuran bakat kemampuan, Berdasarkan nilai STTB/SKHU atau nilai UAN.
- d. Orientasi
Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan (sekolah) tempat peserta didik itu menempuh pendidikan.
- e. Penempatan Peserta Didik (Pembagian Kelas)
Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan (sekolah) mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah sebagian besar didasarkan kepada sistem kelas.
- f. Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik

Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang.

g. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik.

h. Kelulusan dan Alumni

Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan (sekolah) tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik

4. Manajemen Tenaga Kependidikan

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan dalam organisasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan ini merupakan sumber daya manusia yang potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan/pengembangan dan pemberhentian.

UUSPN No.20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan ini dapat kita bedakan menjadi tiga jenis: Tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis penyelenggara pendidikan.

Tujuan dari manajemen/pengelolaan tenaga kependidikan itu adalah agar mereka memiliki kemampuan, motivasi, kreativitas untuk:

- a) Mewujudkan system sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya sendiri.

- b) Secara berkesinambungan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan (belajar) peserta didik dan terhadap persaingan kehidupan dimasyarakat secara sehat dan dinamis.
- c) Menyediakan bentuk kepemimpinan (khususnya mempersiapkan kader pemimpin pendidikan yang benar-benar handal dan dapat diteladani), yang mampu mewujudkan human organization yang pengertiannya lebih dari sekedar human relationship pada pendidikan disekolah itu sendiri.
- d) Bentuk kepemimpinan yang menjamin minculnya peningkatan produktivitas pendidikan sebagai paduan fungsi keefektifan, efesiensi dan ekuitas (keadilan) melalui pengelolaan tenaga kependidikan yang rasional dan profesional.
- e) Bentuk kepemimpinan yang menjamin kelangsungan usaha-usaha kearah terwujudnya keseimbangan kehidupan organisasi melalui usaha-usaha menserasikan tujuan-tujuan individu dengan tujuan-tujuan sistem sekolah organisasi pendidikan.
- f) Mewujudkan kondosi dan iklim kerja sama system sekolah/organisasi pendidikan yang mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional dan kecakapan teknis tenaga kependidikan.

Pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan melatih peserta didik.yang termasuk dalam kategori pendidik adalah:

- a) Tenaga pengajar yang bertugas utamanya mengajar; yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan jenjan pendidikan tinggi disebut dosen.
- b) Tenaga pembimbing yang dikenal pula disekolah sebagai penyuluh pendidikan atau dewasa ini lebih tepat disebut guru BP.
- c) Tenaga pelatih yang oleh sebagian pihak ditempatkan sebagai teknisi seperti pelatih olahraga, kesenian, keterampilan.

Dimensi kegiatan pengelolaan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut.

- a) Perencanaan tenaga kependidikan
Perencanaan tenaga Kependidikan merupakan suatu proses yang sistematis rasional untuk memberikan jaminan bahwa

penempatan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan dalam berbagai formasi dan dalam jangka waktu tertentu benar-benar representatif dapat menuntaskan tugas-tugas organisasi pendidikan.

- b) Perekrutan tenaga kependidikan
- c) Menetapkan calon yang dapat diterima
- d) Pembinaan/pengembangan tenaga pendidikan
Suatu program pembinaan tenaga kependidikan biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dari tuntutan organisasi, atau adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dikalangan tenaga kependidikan itu sendiri.
- e) Penilaian tenaga kependidikan
Penilaian tenaga kependidikan mencakup prestasi kerja, cara kerja dan pribadi; sedangkan potensi untuk berkembang mencakup kreatifitas dan kemampuan untuk mengembangkan karir.
- f) Kompensasi bagi tenaga kependidikan
Kompensasi memiliki 2 komponen, yaitu kompensasi langsung berupa gaji, insentif, komisi, dan bonus, dan kompensasi tidak langsung misalnya berupa asuransi kesehatan, fasilitas untuk berrekreasi dan sebagainya.
- g) Pemberhentian tenaga kependidikan

5. Manajemen Keuangan Pendidikan

Sekolah adalah sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang di maksud adalah Staf Tata laksana Administrasi, Staf Teknis pendidikan didalamnya ada Kepala Sekolah dan Guru, Komite sekolah sebagai badan independent yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa di tempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasioal sekolah terbentuknya dari hubungan “simbiosis mutualis”.

Keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi kebutuhan anak didik. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan. Pengelolaan keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam

pelaksanaan kegiatan sekolah. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dialokasikan dana khusus, yang antara lain untuk keperluan:

- a. Kegiatan identifikasi input siswa.
- b. Modifikasi kurikulum.
- c. Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat.
- d. Penedanaan sarana dan prasarana.
- e. Pemberdayaan peran serta masyarakat.
- f. Pelaksanaan belajar mengajar.

Tujuan manajemen keuangan yaitu: Memungkinkan penyelenggara pendidikan dilakukan secara efisien, artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal diperoleh hasil/tujuan tertentu, Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut, Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran ataupun penyimpanan-penyimpanan penggunaan dana dari rencana semula.

6. Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat

Pengertian sekolah sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Maju mundurnya SDM pada suatu daerah, tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.

Fungsi hubungan dengan masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah.
- b. Dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapannya mengenai tujuan pendidikan sekolah.
- c. Memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat baik finansial, material atau moral.

- d. Menimbulkan rasa tanggung jawab yang besar pada masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang dapat diberikan oleh sekolah.
- e. Merealisasikan perubahan yang diperlukan dan memperoleh fasilitas dalam merealisasikan perubahan itu.
- f. Mengikuti sertakan masyarakat secara komratif dalam usaha-usaha memecahkan persoalan pendidikan.

Meningkatkan semangat kerja sama antar masyarakat dan meningkatkan partisipasi kepemimpinan untuk meningkatkan kehidupan dalam masyarakat.



— BAB II —

SEKOLAH INKLUSI

A. Memahami Sekolah Inklusi

Anak adalah amanah dari Tuhan yang dititipkan kepada para orang tua di seluruh dunia. Tidak ada seorang anakpun yang dapat memilih, apakah anak itu bisa menjadi baik atau buruk, dilahirkan normal atau tidak. Semua itu sudah menjadi kuasa Tuhan, seperti yang telah disampaikan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al An'aam: 59 yang artinya:

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)”.

Orang tua punya harapan yang besar terhadap anak-anak mereka. Hampir setiap orang tua yang mempunyai anak sangat mengharapkan agar si anak dapat merawat orang tua disaat dalam kondisi lemah/sakit. Bukan hanya itu, orang tua juga sangat mengharapkan si anak bisa mendo'akan jika orang tua sudah meninggal. Oleh karena itu, setiap orang tua hendaknya tidak sampai lupa tugas dan tanggungjawab dalam merawat dan mendidik sang buah hatinya, supaya menjadi anak yang shaleh/ah, agar hidup bahagia di dunia dan akhirat sesuai dengan sebuah hadist yang artinya:

“Tiap anak yang baru lahir adalah dalam keadaan suci (tidak berdousa) maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi yahudi, nasrani dan majusi. (HR Bukhariy dan Muslim)”

Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya memiliki kebutuhan khusus. Tetapi manusia hanya bisa berencana dan Tuhanlah yang menentukan. Anak yang memiliki kebutuhan khusus yang biasa disingkat dengan ABK ini, dalam membesarkannya perlu perhatian khusus dan bila dibimbing secara maksimal dapat tumbuh normal seperti anak normal lainnya. Anak yang dikategorikan sebagai ABK adalah anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar atau gangguan atensi, gangguan emosional atau perilaku, hambatan fisik, komunikasi, autism, traumatic brain injury, hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, dan anak-anak yang memiliki bakat khusus.

Sebagai manusia, ABK memiliki hak untuk tumbuh kembang ditengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. ABK memiliki hak untuk

sekolah sama seperti saudara lainnya yang tidak memiliki kelainan atau normal. Tidak ada satu alasan bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) umum dimanapun adanya, melarang ABK untuk masuk ke sekolah tersebut. Bersama Guru Pembimbing Khusus yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan PLB, sekolah dapat merancang pelayanan PLB bagi anak tersebut yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Apakah anak tersebut membutuhkan kelas khusus, program khusus dan/atau layanan khusus tergantung dari tingkat kemampuan dan kondisi kecacatan anak.

Pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kebijakan tersebut memberi warna baru bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ditegaskan dalam pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara lebih operasional, hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Menurut Dirjen PLB (2006) pendidikan inklusif merupakan system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua pesert didik dari berbagai kondisi dan latar belakang untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama, dengan layanan pendidikan yang disesuaikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Menurut Stainback (1990) Sekolah Inklusif adalah Sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Kemudian Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa Pendidikan Inklusif adalah Penempatan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tingkat ringan, sedang dan berat, secara penuh di kelas reguler. Sedangkan Sapon-Shevin (O'Neil 1995) menyatakan bahwa Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar ABK dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.

Indonesia Menuju Pendidikan inklusi Secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang cacat anak. Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 6 ayat 1).

Setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 6 ayat 6 UU RI No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat). Disamping pendidikan atau sekolah reguler, pemerintah dan badan-badan swasta menyelenggarakan pendidikan atau sekolah khusus yang biasa disebut Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk melayani beberapa jenis kecacatan. Tidak seperti sekolah reguler yang tersebar luas baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. SLB dan SDLB sebagian besar berlokasi di perkotaan dan sebagian kecil sekali yang berlokasi di pedesaan.

Penyandang cacat anak untuk menjangkau SLB atau SDLB relatif sangat jauh hingga memakan biaya cukup tinggi yang tidak terjangkau penyandang cacat anak dari pedesaan. Ini pula masalah yang dapat diselesaikan oleh pendidikan atau sekolah inklusi, di samping memecahkan masalah golongan penyandang cacat yang merata karena diskriminasi sosial, karena dari sejak dini tidak bersama, berorientasi dengan yang lain. Sejak tahun 2001, pemerintah mulai uji coba perintisan sekolah inklusi seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 12 sekolah didaerah Gunung Kidul dan di Provinsi daerah Khusus Ibukota Jogjakarta dengan 35 sekolah.

Pada sekolah sekolah reguler yang dijadikan perintis itu memang diuntungkan anak-anak lambat belajar dan anak-anak sulit belajar sehingga perlu mendapat pelayanan khusus. Karena masih dalam tahap rintisan sampai sekarang belum ada informasi yang berarti dari sekolah-sekolah tersebut. Menurut Prof. Dr. Fawzie Aswin Hadi (Universitas Negeri Jakarta) mengisahkan sekolah Inklusi (SD. Muhammadiyah di Gunung Kidul) sekolah ini punya murid 120 anak, 2 anak laki-laki diantaranya adalah Tuna Grahita, dua anak ini dimasukan oleh kedua ibunya ke kelas I karena mau masuk SLBC lokasinya jauh dari tempat tinggalnya yang di pegunungan. Keluarga ini tergolong keluarga miskin oleh sebab itu mereka memasukkan anak-anaknya ke SD. Muhammadiyah.

Perasaan mereka sangat bahagia dan bangga bahwa kenyataannya anak mereka diterima sekolah. Satu anak tampak berdiam diri dan cuek, sedang satu lagi tampak ceria dan gembira, bahkan ia menyukai tari dan suka musik, juga ia ramah dan bermain dengan teman sekolahnya yang tidak cacat.

Gurunya menyukai mereka, mengajar dan mendidik mereka dengan menggunakan modifikasi kurikulum untuk matematika dan mata pelajaran lainnya, evaluasi disesuaikan dengan kemampuan mereka. Hal yang sangat penting disini yang berkaitan dengan guru adalah anak Tuna Grahita dapat menyesuaikan diri dengan baik, bahagia dan senang di sekolah. Ini merupakan potret anak Tuna Grahita di tengah-tengah teman sekelas yang sedang belajar.

Di Indonesia telah dilakukan Uji coba di beberapa daerah sejak tahun 2001, secara formal pendidikan inklusi dideklarasikan di Bandung tahun 2004 dengan beberapa sekolah reguler yang mempersiapkan diri untuk implementasi pendidikan inklusi. Awal tahun 2006 ini tidak ada tanda-tanda untuk itu, informasi tentang pendidikan inklusi tidak muncul kepada publik, isu ini tenggelam ketika isu menarik lainnya seperti biaya operasional sekolah, sistem SKS SMA dan lain-lain.

Landasan Hukum

1. Landasan Spiritual

a. Surat An-Nisa ayat 9

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

b. Surat Az-Zuhruf ayat 32

“Allah telah menentukan diantara manusia penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Allah telah meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat saling mengambil manfaat (membutuhkan)”.

2. Landasan Yuridis

a. Konvensi PBB tentang Hak anak tahun 1989.

b. Deklarasi Pendidikan untuk Semua di Thailand tahun 1990.

- c. Kesepakatan Salamanka tentang Pendidikan inklusi tahun 1994.
- d. UU No. 4 tentang Penyandang Cacat tahun 1997.
- e. UU No. 23 tentang Perlindungan Hak Anak tahun 2003.
- f. PP No. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional tahun 2004.
- g. Deklarasi Bandung tentang Menuju Pendidikan Inklusi tahun 2004.

Kalau kita cermati lebih teliti, landasa spiritual maupun landasan yuridis tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusi yang memang merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Sekolah Inklusif (di Indonesia) adalah sekolah biasa (SB) yang mengakomodasi semua peserta didik baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus (cacat fisik, intelektual, sosial, emosional, mental, cerdas, berbakat istimewa daerah terpencil/ terbelakang, suku terasing, korban bencana alam/ bencana sosial/ miskin), mempunyai perbedaan pangkat, warna kulit, gender, suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak pedesaan, anak kota, anak terlantar, tuna wisma, anak terbuang, anak yang terlibat dalam sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba HIV/ AIDS (ODHA), anak nomaden, dll sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Namun untuk masa sekarang, jenjang pendidikan yang disiapkan untuk menerapkan kebijakan sekolah inklusi ini adalah pendidikan sekolah dasar (SD). Dan pendidikan inklusi pada jenjang sekolah dasar diharapkan mampu untuk memecahkan salah satu persoalan dalam penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan solusi pemberian pelayanan pendidikan yang diberikan kepada seluruh anak-anak.

Penerapan sistem pembelajaran yang dilakukan pada sekolah inklusi tidak memiliki suatu sistem khusus, proses pembelajaran berjalan layaknya sekolah reguler biasa. Hanya saja lingkungan yang dibangun lebih pada konsep lingkungan yang ramah anak, hal ini dikarenakan agar ABK merasa lebih nyaman dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan baik.

Melihat kondisi dan system pendidikan di Indonesia, model pendidikan inklusi lebih sesuai adalah model yang mengasumsikan

bahwa inklusi sama dengan mainstreaming(Ahman,1994). Model pendidikan mainstreaming merupakan model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (Sekolah Luar Biasa) dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja

Penempatan anak berkelainan di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai model berikut :

- a. Bentuk kelas reguler penuh
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.
- b. Bentuk kelas reguler dengan cluster
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus.
- c. Bentuk kelas reguler dengan pull out
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
- d. Bentuk kelas reguler dengan cluster dan pull out
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus.
- e. Bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian
Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler.
- f. Bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler
Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

Dengan demikian, pendidikan inklusif seperti pada model di atas tidak mengharuskan semua anak berkelainan berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya (inklusi penuh). Hal ini dikarenakan sebagian anak berkelainan dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi dengan gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan bagi anak berkelainan yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler (inklusi lokasi). Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat berat, dan tidak memungkinkan di sekolah reguler

(sekolah biasa), dapat disalurkan ke sekolah khusus (SLB) atau tempat khusus (rumah sakit).

Pengembangan Kurikulum

1. Lingkup Pengembangan Kurikulum

Kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya. Modifikasi kurikulum dilakukan terhadap:

- a. Alokasi waktu,
- b. Isi/materi kurikulum,
- c. Proses belajar-mengajar,
- d. Sarana prasarana,
- e. Lingkungan belajar, dan
- f. Pengelolaan kelas.

2. Pengembang Kurikulum

Modifikasi/pengembangan kurikulum pendidikan inklusi dapat dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang terdiri atas guru-guru yang mengajar di kelas inklusi bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, terutama guru pembimbing khusus (guru Pendidikan Luar Biasa) yang sudah berpengalaman mengajar di Sekolah Luar Biasa, dan ahli Pendidikan Luar Biasa (Orthopaedagog), yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Dasar Inklusi (Kepala SD Inklusi) dan sudah dikoordinir oleh Dinas Pendidikan.

3. Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan:

- a. Modifikasi alokasi waktu
Modifikasi alokasi waktu disesuaikan dengan mengacu pada kecepatan belajar siswa. Misalnya materi pelajaran (pokok bahasan) tertentu dalam kurikulum reguler (Kurikulum Sekolah Dasar) diperkirakan alokasi waktunya selama 6 jam.
- b. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di atas normal (anak berbakat) dapat dimodifikasi menjadi 4 jam.
- c. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi relatif normal dapat dimodifikasi menjadi sekitar 8 jam;
- d. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di bawah normal (anak lamban belajar) dapat dimodifikasi

menjadi 10 jam, atau lebih; dan untuk anak tunagrahita menjadi 18 jam, atau lebih; dan seterusnya.

4. Modifikasi isi/materi
 - a. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di atas normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat digemukkan (diperluas dan diperdalam) dan/atau ditambah materi baru yang tidak ada di dalam kurikulum sekolah reguler, tetapi materi tersebut dianggap penting untuk anak berbakat.
 - b. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi relatif normal materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat tetap dipertahankan, atau tingkat kesulitannya diturunkan sedikit.
 - c. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di bawah normal (anak lamban belajar/tunagrahita) materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya seperlunya, atau bahkan dihilangkan bagian tertentu.
5. Modifikasi proses belajar-mengajar
 - a. Mengembangkan proses berfikir tingkat tinggi, yang meliputi analisis, sintesis, evaluasi, dan problem solving, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di atas normal;
 - b. Menggunakan pendekatan student centered, yang menekankan perbedaan individual setiap anak;
 - c. Lebih terbuka (divergent);
 - d. Memberikan kesempatan mobilitas tinggi, karena kemampuan siswa di dalam kelas heterogen, sehingga mungkin ada anak yang saling bergerak kesana-kemari, dari satu kelompok ke kelompok lain.
 - e. Menerapkan pendekatan pembelajaran kompetitif seimbang dengan pendekatan pembelajaran kooperatif. Melalui pendekatan pembelajaran kompetitif anak dirangsang untuk berprestasi setinggi mungkin dengan cara berkompetisi secara fair. Melalui kompetisi, anak akan berusaha seoptimal mungkin untuk berprestasi yang terbaik, “aku-lah sang juara”! Namun, dengan pendekatan pembelajaran kompetitif ini, ada dampak negatifnya, yakni mungkin “ego”-nya akan berkembang kurang baik. Anak dapat menjadi egois. Untuk menghindari hal ini, maka pendekatan pembelajaran

kompetitif ini perlu diimbangi dengan pendekatan pembelajaran kooperatif.

Melalui pendekatan pembelajaran kooperatif, setiap anak dikembangkan jiwa kerjasama dan kebersamaannya. Mereka diberi tugas dalam kelompok, secara bersama mengerjakan tugas dan mendiskusikannya. Penekanannya adalah kerja sama dalam kelompok, dan kerjasama dalam kelompok ini yang dinilai. Dengan cara ini sosialisasi anak dan jiwa kerjasama serta saling tolong menolong akan berkembang dengan baik.

Dengan demikian, jiwa kompetisi dan jiwa kerjasama anak akan berkembang harmonis.

- f. Disesuaikan dengan berbagai tipe belajar siswa (ada yang bertipe visual; ada yang bertipe auditoris; ada pula yang bertipe kinestetis). Tipe visual, yaitu lebih mudah menyerap informasi melalui indera penglihatan. Tipe auditoris, yaitu lebih mudah menyerap informasi melalui indera pendengaran. Tipe kinestetis, yaitu lebih mudah menyerap informasi melalui indera perabaan/gerakan. Guru hendaknya tidak monoton dalam mengajar sehingga hanya akan menguntungkan anak yang memiliki tipe belajar tertentu saja.

Kurikulum adalah program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang di harapkan yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, di berikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan kompetensi social anak didik.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam silabus. RPP ini dapat digunakan oleh setiap pengajar sebagai pedoman umum untuk melaksanakan pembelajaran kepada peserta didiknya, karena di dalamnya berisi petunjuk secara rinci, pertemuan

demi pertemuan, mengenai tujuan, ruang lingkup materi yang harus diajarkan, kegiatan belajar mengajar, media, dan evaluasi yang harus digunakan.

Dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi ABK dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni:

a. Duplikasi Kurikulum

Yakni ABK menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata/reguler. Model kurikulum ini cocok untuk peserta didik tunanetra, tunarungu wicara, tunadaksa, dan tunalaras. Alasannya peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan intelegensi. Namun demikian perlu memodifikasi proses, yakni peserta didik tunanetra menggunakan huruf Braille, dan tunarungu wicara menggunakan bahasa isyarat dalam penyampaianya. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi dan ketekunan belajarnya.

b. Modifikasi Kurikulum

Yakni kurikulum siswa rata-rata/reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan/potensi ABK. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas (eskalasi) untuk peserta didik gifted and talented. Dengan kurikulum modifikasi ini diharapkan ABK dapat mengikuti pembelajaran pada kelas umum secara klasikal bersama anak-anak umum lainnya.

c. Substitusi Kurikulum

Yakni beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk ABK dengan melihat situasi dan kondisinya.

d. Omisi Kurikulum

Yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total, karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berfikir setara dengan anak rata-rata. Standar kompetensi dalam kurikulum ini dirumuskan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh guru pendidikan khusus bersama tim ahli terkait.

B. Kebijakan Pendidikan Inklusi

Permasalahan pendidikan di Indonesia tampaknya perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Masalah-masalah di lapangan terkait

dengan hal ini masih sering kita jumpai ibarat jamur di musim hujan, tubuh berkembang silih berganti secara simultan; dari pemberantasan buta-huruf, putus sekolah, kenakalan remaja, Gepeng, sampai pada peluang untuk mendapat kesempatan dalam pendidikan (terutama untuk para penyandang disabilitas), dan lain-lain.

Pendidikan bagi peserta penyandang disabilitas di Indonesia telah diwadahi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini disediakan dalam tiga jenis lembaga pendidikan, yakni: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan yang tertua, menampung peserta didik yang jenis kelainannya sama.

Contohnya: SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunanetra, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan sebagainya. SDLB menampung berbagai jenis anak yang berkelainan menjadi satu, sehingga dalam satu sekolah atau bahkan satu kelas terdiri dari berbagai macam peserta didik yang berkelainan, misalnya tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunalaras, tunagrahita, dan sebagainya.

Adapun Pendidikan terpadu adalah sekolah regular yang menampung anak berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajarnya sama. Namun jenis ini biasanya hanya masih menampung anak tunanetra saja, itu pun terkadang masih banyak sekolah yang keberatan untuk menampungnya.

Dalam perkembangannya kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang memberikan warna baru dalam penyediaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini. Dalam penjelasannya, pasal 15 dan pasal 32 menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Aturan terbaru yang mengatur tentang pendidikan inklusif ini, adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Hal ini tentunya merupakan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

Pendidikan inklusi bagi para penyandang ini secara yuridis juga mendapatkan perlindungan secara internasional, yakni dengan adanya Deklarasi Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000), dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004) (Sunaryo. 2009: 1).

Pendidikan inklusi relatif banyak dibuka oleh berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, karena semangat pendidikan inklusi memang sangat sesuai dengan filosofi Bangsa yang menyatakan Bhineka Tunggal Ika. Selain lembaga-lembaga pendidikan resmi Pemerintah (negeri), ternyata tidak sedikit lembaga swadaya atau swasta yang menyediakan ruang bagi pendidikan inklusi di lembaganya.

Namun demikian bila dibanding dengan angka anak berkebutuhan khusus, maka jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan ruang untuk pendidikan inklusi belumlah memadai. Data tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendibud, Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi berjumlah 814 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 15.181 siswa (dikutip dari Solider).

Menurut Mudjito dkk (2012: 12) yang dikutip dari data Kementerian Sosial RI tahun 2008, total jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) sebanyak 1.544.184 anak. Kemudian diprediksi pada tahun 2010 angka anak berkebutuhan khusus dari umur 5-18 tahun adalah 21,42% dari jumlah ABK dengan berbagai kekurangan/kecacatan yakni 330.764 anak. Anak berkebutuhan khusus yang sudah mendapatkan layanan pendidikan di sekolah khusus (SLB dan atau inklusi) dari jenjang Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Pertama hanya 85.737 anak

(sekitar 25,92%). Berarti masih ada 245.027 anak (74,08%) berkebutuhan khusus yang belum mendapat layanan pendidikan dengan berbagai jenis kelainan, dan sebagian besar mereka tinggal di perdesaan dan pusat-pusat perkotaan. Dengan demikian pendidikan inklusi masih banyak memerlukan perhatian yang sangat besar dari pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertanggungjawab terhadap pendidikan seperti dimatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31, yakni:

- Ayat (1): “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.
- Ayat (2): “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pendidikan inklusi ini tuangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Biasa, UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional tentang pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, serta Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C.6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003, Yakni: “Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK”.

Walaupun telah ada usaha pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi melalui Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, bukan berarti semuanya telah selesai. Dalam kenyataannya, dengan berbagai alasan banyak sekolah yang masih keberatan untuk menerima siswa berkebutuhan khusus ini, kalau toh ada terkadang pelaksanaannya belum seperti diharapkan sesuai dengan konsep pendidikan inklusi itu sendiri. Selain itu permasalahan-permasalahan teknis lain berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi ini, masih banyak perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan.

Berdasarkan fenomena tersebut, tulisan ini ingin mencoba menelaah tentang konsep pendidikan inklusi, kebijakan, serta implementasinya di lapangan.

Teori dan Model Pendidikan Inklusi

Pengertian

Sampai saat ini dukungan terhadap pendidikan inklusi semakin berkembang, namun demikian pemahaman maupun pandangan terhadapnya masih relatif banyak perbedaan atau bahkan silang pendapat. Hal ini disebabkan oleh adanya pengertian pendidikan inklusi yang bersifat progresif, sehingga mengalami penyempurnaan secara terus menerus sejalan dengan semakin mendalamnya renungan orang terhadap praktik pelaksanaan pendidikan inklusi itu sendiri.

Mengapa kemudian batasan pengertian tentang pendidikan inklusi ini menjadi penting, karena akan mendasari prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan inklusi itu sendiri. Hal yang sangat nyata, banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan versi lain dari Pendidikan Luar Biasa.

Pada hal, lima tahun setelah Salamanca UNESCO (2009:13) mengatakan bahwa pendidikan inklusi telah berkembang sebagai suatu gerakan untuk menantang kebijakan dan praktik eksklusi. Lahirnya Pendidikan Inklusi salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sue Stubb (2002: 37) mengatakan, bahwa konsep pendidikan inklusif memiliki lebih banyak kesamaan dengan konsep yang melandasi ‘Pendidikan untuk Semua’, dan ‘Peningkatan mutu sekolah’. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa pendidikan inklusi merupakan pergeseran dari kecemasan tentang suatu kelompok tertentu menjadi upaya yang difokuskan untuk mengatasi hambatan untuk belajar dan berprestasi.

Definisi tentang pendidikan inklusi yang dilahirkan dari Seminar Agra pada tahun 1998, merumuskan bahwa pendidikan inklusi:

1. Lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, system nonformal dan formal.
2. Mengakui bahwa semua anak dapat belajar.
3. Memungkinkan struktur, system dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak.
4. Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, gender, etnik, Bahasa, kecacatan, status HIV/Aids dan lain-lain.

5. Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya.
6. Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif.

Definisi mutakhir lain dari Ofsted yang dikutip dalam Ainscow (2001), mengatakan bahwa sebuah sekolah yang mempraktekkan pendidikan inklusif merupakan sekolah yang memperhatikan pengajaran dan pembelajaran, pencapaian, sikap dan kesejahteraan setiap anak. Selanjutnya dikatakan pula bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang mempraktekkan pendidikan inklusif.

Definisi di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan pada berbagai konsep utama tentang suatu system, stakeholder, proses, dan sumberdayanya. Konsep utama yang terkait dengan pendidikan inklusi adalah:

1. Konsep-konsep tentang anak
 - a. Semua anak berhak memperoleh pendidikan di dalam sekolah.
 - b. Semua anak dapat belajar, dan siapa pun dapat mengalami kesulitan dalam belajar.
 - c. Semua anak membutuhkan dukungan untuk belajar.
 - d. Pengajaran yang terfokus kepada anak bermanfaat bagi semua anak.
2. Konsep-konsep tentang system pendidikan dan persekolahan
 - a. Pendidikan lebih luas dari persekolahan formal.
 - b. System pendidikan yang fleksibel dan responsive.
 - c. Lingkungan pendidikan yang memupuk kemampuan dan ramah.
 - d. Peningkatan mutu sekolah-sekolah yang efektif.
 - e. Pendekatan sekolah yang menyeluruh dan kolaborasi antar mitra.
3. Konsep-konsep tentang keberagaman dan diskriminasi
 - a. Memberantas diskriminasi dan tekanan untuk mempraktekkan eksklusi.
 - b. Merespon/merangkul keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan masalah.
 - c. Pendidikan inklusif mempersiapkan siswa untuk masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan.

4. Konsep-konsep tentang proses untuk mempromosikan inklusi
 - a. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan inklusi.
 - b. Meningkatkan partisipasi nyata bagi semua orang.
 - c. Kolaborasi, kemitraan.
 - d. Metodologi partisipatori, penelitian tindakan, penelitian kolaboratif.
5. Konsep-konsep tentang sumberdaya
 - a. Membuka jalan ke sumberdaya setempat.
 - b. Redistribusi sumberdaya yang ada.
 - c. Memandang orang (anak, orang tua, anggota kelompok termajinalisasi dan lain-lain) sebagai sumberdaya utama.
 - d. Sumber daya yang tepat yang terdapat di dalam sekolah dan pad tingkat local dibutuhkan untukberbagai anak, misalnya Braille, alat asistif.

Di Indonesia, pendidikan inklusif secara resmi yang dipahami oleh pemerintah dan banyak dirujuk dalam oleh masyarakat, didefinisikan sebagai berikut:

Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai system layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah regular yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun system pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB. 2004).

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menyebutkan, bahwa:

Pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkung pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada pasal 2 peraturan tersebut menjelaskan, bahwa Pendidikan inklusi bertujuan:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Menurut O'Neil seperti yang dikutip oleh Mohammad Takdir Ilahi (2013), bahwa pendidikan inklusi sebagai system layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler secara bersama-sama dengan teman seusiannya.

Pada akhirnya inklusi, merupakan sebuah filosofi pendidikan dan social, dalam inklusi semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan, apapun perbedaannya. Sehingga dalam pendidikan inklusi berarti semua anak, tidak terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuannya, jenis kelamin, status social-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau Bahasa dan agama menyatu dalam satu komunitas sekolah yang sama.

Model Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Menurut Suyanto & Mudjito A.K. (2001: 5), ada tiga model pendidikan untuk menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam satu lingkungan belajar, yakni:

1. *Mainstream*, adalah system pendidikan yang menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, mengikuti kurikulum akademis yang berlaku, dan guru juga tidak harus melakukan adaptasi kurikulum. Diikuti oleh anak-anak yang sakit namun tidak berdampak pada kemampuan kognisinya.
2. *Integrasi*, adalah menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam kelas anak-anak normal, dimana mereka mengikuti pelajaran-pelajaran yang dapat mereka ikuti dari gurunya. Sedangkan untuk mata pelajaran akademis lainnya anak-anak

berkebutuhan khusus itu memperoleh pengganti di kelas yang berbeda dan terpisah. Penempatan integrasi itu tidak sama dengan integrasi pengajaran dan itegrasi sosial, karena tergantung pada dukungan yang diberikan sekolah.

3. *Inklusi*, adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 tahun 2009)

Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia didasari oleh lima pilar besar, yakni landasan filosofis, relegius,yuridis, pedagogis dan empiris.

1. Landasan filosofis, pendidikan inklusi di Indonesia tidak lepas dari tatanan atau aturan-aturan dasar kehidupan bangsa yang tidak tertulis, namun masih sangat kuat untuk membangun landasan kebijakan. Falsafah berasal dari lambang burung Garuda Pancasila yang kakinya mencengkeram pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, maknanya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam bentuk kesatuannya diwujudkan dengan lima sikap atau sila yakni Pacasila.
2. Landasan Relegius, sebagai bangsa yang relegius (beragama), memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah segalanya. Semua yang ada di dunia, semata hanya milik Nya, dan manusia diciptakan hanyanyah sebagai hamba yang selalu memohon berkah dan kebaikan. Bangsa yang percaya Kepada Tuhan, meyakini bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Di hadapan Tuhan manusia adalah sama, oleh karenanya juga mempunyai hak hidup yang sama antara satu dengan lainnya.
3. Landasan Yuridis, berbagai peraturan dan perundang telah diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi ini, di antaranya:
 - a. UUD 1945 (amandemen) pasal 31, ayat 1 dan 2 tentang hak untuk pendidikan.
 - b. UU no. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.

- c. UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49, tentang perlindungan anak.
 - d. UU No. 4 tahun 1997 pasal 5, tentang penyandang anak cacat.
 - e. PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Permendiknas No. 70 tahun 2009, tentang Pendidikan inklusif
 - g. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
 - h. Deklarasi Bandung: “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” tanggal 11-14 Agustus 2004.
4. Landasan Pedagogis, pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat.
 5. Landasan Empiris, mengacu dari penelitian yang banyak dilakukan di Negara-negara Barat sejak tahun 1980-an (diseponsori oleh The National Academy Of Science), hasilnya menunjukkan klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.

Prinsip Pendidikan Inklusi

1. *Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu*, pendidikan inklusif merupakan strategi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dan juga merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan. Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyusun strategi ini.
2. *Prinsip Kebutuhan individual*, setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, sehingga pendidikan inklusi harus berorientasi pada Program Pembelajaran Individu (PPI), pendidikan didasarkan pada kebutuhan anak.

3. *Prinsip Kebermaknaan*, pendidikan inklusif harus menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.
4. *Prinsip Keberlanjutan*, pendidikan inklusif harus diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.
5. *Prinsip Keterlibatan*, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

Komponen keberhasilan Pendidikan Inklusi

1. **Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar)**
Kurikulum sebaiknya berorientasi pada kebutuhan anak supaya anak tidak merasa mendapat tekanan secara psikologis. Kurikulum harus memiliki tujuan/capaian, dan dalam perkembangannya harus dinamis dan konstruktif. Dalam pendidikan inklusi, kurikulum menggunakan kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi. Ada 3 model kurikulum yang mungkin perlu dipersiapkan untuk pendidikan inklusi yakni, untuk anak dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas rata-rata menggunakan kurikulum normal atau kurikulum modifikasi; anak kemampuan akademik sedang (dibawah rata-rata) disiapkan kurikulum fungsional/vokasional; dan anak sangat rendah disiapkan kurikulum pengembangan bina diri, juga disiapkan kurikulum kompensatoris.
2. **Tenaga Pendidik (guru)**
Dalam hal ini diperlukan guru yang profesional; memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap tentang materi yang akan diajarkan/dilatihkan, memahami siswa. Seorang guru dituntut menguasai sejumlah keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, antara lain menguasai bahan ajar, mengelola kelas, menggunakan metode, media, dan sumber belajar, serta kemampuan untuk melakukan penilaian, baik proses maupun hasil.
3. **Input Peserta Didik**
Kemampuan awal dan karakter siswa menjadi acuan utama dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses belajar mengajar. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: siapa input siswanya?, apakah semua peserta didik berkelainan dapat mengikuti kelas reguler?, bagaimana

identifikasinya?, apa alat identifikasinya? Siapa yang akan terlibat dalam indentifikasi?

4. Lingkungan dan Penyelenggara Sekolah

Bila dicermati, maka lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selain lingkungan sekitar, peran orang tua, kepala sekolah, dan pemerintah juga sangat menentukan kualitas pendidikan inklusi.

5. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana sebaiknya disesuaikan dengan kurikulum (bahan ajar) yang telah dikembangkan. Sarana dan prasarana menurut Wahyuningrum seperti yang dikutip oleh Mohammad takdir Ilahi (2013: 186) terdiri dari fasilitas fisik dan fasilitas uang. Selanjutnya dikatakan bahwa sarana pendidikan dalam pendidikan inklusif adalah seperangkat peralatan, bahan dan perabotan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.

6. Evaluasi Pembelajaran

Dalam evaluasi belajar, sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 7 samapi 9:

- a. Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- b. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- c. Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- d. Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonya dikeluarkan oleh pemerintah.
- e. Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang blangkonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- f. Peserta didik yang memperoleh Surat Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Selain itu ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini:

1. Sekolah harus menyediakan kondisi kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang interaktif.
2. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya alam lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.
4. Kepala sekolah dan guru yang nanti akan jadi Guru Pembimbing Khusus (GPK), harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusi.
5. GPK harus mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi anak ABK.
6. Asesmen di sekolah dilakukan untuk mengetahui ABK dan tindakan yang diperlukan. Mengadakan bimbingan khusus, atas kesalahpahaman dan kesepakatan dengan orang tua ABK.
7. Mengidentifikasi hambatan berkait dengan kelainan fisik, social, dan maslah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.
8. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. (Suyanto & Mudjito AK. 2012: 39)

Teori dan Konsep Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye, seperti yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2011: 4): Analisis kebijakan adalah untuk mengetahui “*What Goverments do, why they do it, and what difference it makes*”. Selanjutnya dikatakann, bahwa pandangan Dye tentang analisis kebijakan ini pada akhirnya akan bermuara pada hal pendeskripsian dan penjelasan mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat dari tindakan/perbuatan pemerintah.

Pendapat lain mengatakan, bahwa Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan

yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Hakim (2003) mengatakan, bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik.

Berbagai masalah yang dihadapi Pemerintah sebagian disebabkan karena kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik.

William N. Dun (2003:98) yang mengutip pendapatnya E.S. Quade mengatakan, bahwa analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.

Selanjutnya dalam halaman yang berbeda, yang menyadur pendapat Thomas R Dye mengatakan bahwa kebijakaan sebagai sebuah sistem, mencakup hubungan timbal-balik di antara tiga unsur, yakni: kebijakan publik (*public Policy*), pelaku kebijakan (*Policy Stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*) (2003: 109-110).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002):

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dapat ditandai dengan lahirnya Undang-undang sebagai berikut:

1. UU No. 4 tahun 1997 pasal 5 tentang penyandang anak cacat
2. UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak
3. UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.
4. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
5. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
6. PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bahkan pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek ujicoba di sembilan propinsi yang memiliki pusat sumber, dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah regular, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar di 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA (Sunaryo. 2009:6).

Hal ini berarti pemerintah telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Dari data yang diperoleh, tampaknya implementasi yang telah dilakukan menunjukkan kuantitas yang progresif, namun pertanyaannya, apakah benar implementasi tersebut telah berhasil? Seperti dikatakan Pressman dan Wildavsky dalam Solichin Abdul Wahab (2014: 135), bahwa: ...proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Oleh sebab itu, keliru jika kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus.

Sedangkan Hogwood & Gunn dalam buku yang sama (2014: 128-129), mengatakan bahwa kebijakan public itu sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Kegagalan dalam implementasi kebijakan bisa dilihat dari dua kategori besar, yaitu non-implemetation dan unsuccessful implementation. Dalam konteks pendapat Hogwood & Gunn, apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakannya tidak termasuk dalam dua kategori ini, namun juga tidak serta merta dianggap sebagai keberhasilan yang mutlak.

Untuk mengevaluasi apakah implementasi kebijakan tersebut sudah berhasil atau belum, maka harus pula ditinjau dari sisi makna pendidikan inklusi dan konten kebijakan yang meladasi implementasi kebijakannya. Misalnya dalam makna pendidikan inklusi disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 menyebutkan, bahwa pendidikan inklusi adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 2, bahwa Pendidikan inklusi bertujuan: a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada

semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan. b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. pertanyaannya makna ini telah terwujud menjadi sebuah kenyataan dalam implementasi kebijakan?

Tentunya hal ini masih dapat disanggah dengan perkataan mana mungkin kebijakan itu mampu menghasilkan perubahan seketika. Apapun sanggahannya evaluasi tetap harus diarahkan pada pemahaman makna dari pendidikan inklusi itu sendiri.

Berikut dari sisi konten kebijakan yang terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat. Tentunya ini masih menjadi pekerjaan besar untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Belum lagi pada kenyataan yang riil yang terjadi di lapangan tentang pendidikan inklusi saat ini. Walau sudah diterbitkan kebijakan yang secara yuridis mempunyai kekuatan hukum, namun dalam implementasinya masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi, misalnya:

1. Isu pemahaman pendidikan inklusi yang masih disamakan dengan integrasi, sehingga siswa harus menyesuaikan dengan system di sekolah
2. Isu kebijakan sekolah yang tidak mau menerima siswa berkebutuhan khusus dengan dalih tidak memiliki tenaga pendidik, fasilitas dan sebagainya.
3. Isu tentang proses pembelajaran, misalnya guru masih belum bisa menerjemahkan kurikulum yang fleksibel, menentukan tujuan sampai pada evaluasi.
4. Isu kondisi guru, belum adanya guru yang memiliki kualitas memadai sebagai guru pendidikan inklusi

5. Isu tentang lingkungan, dan sebagainya

Dari berbagai dilema yang terjadi pada pendidikan inklusi di Indonesia, setidaknya harus segera diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan khusus agar tidak menghalangi pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pendidikan inklusi. Menurut Sunardi (2009) ada beberapa dilema yang perlu ditangani dengan kebijakan khusus, yakni:

1. Sistem penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Siswa hanya dapat diterima kalau hasil ujian nasionalnya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
2. Dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komperhensip sesuai dengan keragaman.
3. Penggunaan label sekolah inklusi dan adanya PP. no. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, pasal 41 ayat 1 tentang keharusan untuk memiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusi sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan, yang ditandai dengan munculnya gejala 'esklusivisme baru', yaitu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusi.
4. Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel).
5. Masih dipahaminya pendidikan inklusi secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak disabled children ke sekolah regular, tanpa upaya untuk mengakomodasi kebutuhan khususnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak tetap tereklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Pada hal makna inklusi adalah ketika lingkungan kelas atau sekolah mampu memberikan rasa senang, menerima, ramah, bersahabat, peduli, mencintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam kebersamaan.
6. Munculnya lebel khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap

ekklusivisme, seperti sekolah unggulan, sekolah berstandar internasional (SBI), Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI), Sekolah favorit, sekolah percontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada sekolah inklusi sebagai sekolah kelas dua (second class), karena menerima ABK sama dengan special school (Imam Subakhan, 2009)

7. Masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumberdaya, maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental (Cak Fu, 2005).

C. Mewujudkan Sekolah Inklusi

Setiap anak yang lahir di republik ini berhak mendapatkan pendidikan di sekolah yang berstandar baik, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus (ABK) dan berbakat istimewa. Jumlah mereka tidak sedikit. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2009, dari sebanyak 61,2 juta anak berusia 0-15 tahun, sebanyak 354.707 anak di antaranya termasuk dalam kategori disabilitas. Indeks disabilitas sebesar 7 per 1000 anak. ABK bisa belajar di sekolah luar biasa (SLB) dan di sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah pendidikan yang melibatkan ABK ringan, sedang, atau berat, belajar di kelas bersama-sama anak-anak yang normal.

Pada 5 Oktober 2009 dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan yang memiliki kecerdasan dan/ atau bakat istimewa.

Pada 2008 jumlah sekolah inklusi secara nasional dari SD hingga SMA hanya 254 sekolah, namun pada 2014 jumlahnya meningkat signifikan menjadi 2.430 sekolah formal yang ikut berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Pada 2016 ini tentu sekolah inklusi lebih banyak lagi. Sekolah inklusi penting dan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya karena jumlah dan kualitas SLB tidak sebanding dengan jumlah ABK yang tiap tahun semakin bertambah. Angka partisipasi murni (APK) anak berkebutuhan khusus untuk jenjang pendidikan dasar pada 2010 baru mencapai 29% atau 75.000 anak. SLB menghadapi masalah

kekurangan sarana belajar yang standar, bahkan kekurangan guru khusus.

Kesadaran dan Dukungan

Menyelenggarakan sekolah inklusi tidak mudah karena membutuhkan kesadaran dan dukungan dari berbagai pihak. Pertama, sekolah. Tidak cukup niat baik saja, kepala sekolah harus juga menyediakan guru khusus, dan memberikan pelatihan kepada guru kelas dan guru bidang studi.

Demikian juga penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang ramah ABK dan berbakat khusus. Jika tidak serius merencanakannya, sekolah inklusi hanya akan menjadi status, tetapi praktik pendidikannya tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak. Kedua, orang tua. Dukungan orang tua sangat penting untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah inklusi, berbaur dengan anak-anak normal.

Menurut data Susesnas 2009, masih terdapat 70% anak berkebutuhan khusus yang belum merasakan jaminan hak pendidikannya karena berbagai alasan antara lain mereka disembunyikan oleh para orang tuanya atau lokasi tempat tinggalnya sulit dijangkau. Orang tua membantu guru dalam pencapaian hasil belajar melalui pendampingan belajar di rumah.

Orang tua bersama guru bekerja sama mengembangkan bakat anak dengan latihan rutin di sekolah dan di rumah, dan mengikutkannya ke setiap perlombaan tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan mancanegara. Para orang tua yang menyekolahkan anak mereka di sekolah inklusi juga diharapkan memberikan dukungan, bukan memindahkan anak-anak mereka atau menghindari sekolah inklusi karena khawatir anak mereka terganggu, terancam, tidak nyaman, dan sebagainya.

Mereka bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka untuk berempati, berteman, bermain, dan bekerja sama. Dukungan dari para orang tua tersebut akan membantu efektivitas pembelajaran sekolah inklusi. Ketiga, guru. Idealnya, sekolah inklusi memiliki guru khusus selain wali kelas dan guru mata pelajaran.

Guru khusus adalah guru dengan latar belakang sarjana pendidikan khusus (gelarnya SPd). Selain mengajar, guru khusus memberikan pemahaman “dalam bentuk diskusi” kepada guru mata pelajaran dan wali kelas tentang ABK dan berbakat seperti gaya

belajar, karakter, dan cara mengajar mereka. Jadi, guru khusus, guru mata pelajaran, dan wali kelas membangun kesepahaman tentang ABK dan berbakat sehingga pembelajaran di kelas berjalan menyenangkan, efektif, dan efisien.

Mereka menjadi tim pengajaran yang saling mengisi dalam pembelajaran dan pelatihan, bukan masing-masing berdiri sendiri dan apalagi tidak saling berdiskusi. Guru kelas inklusi harus mampu membuat dan menggunakan bahan, metode, dan media ajar yang sesuai dengan ragam ABK karena capaian pembelajaran mereka berbeda dengan siswa pada umumnya. Bahan, metode, dan media ajar yang sesuai dengan tipe-tipe ABK akan membantu kenyamanan dan ketercapaian pembelajaran. Sebaliknya, ketidaksesuaian bahan dan media akan mengganggu, bahkan menjadikan belajar sebuah kesia-siaan belaka.

Program Pemerintah

Keempat, pemerintah. Tanpa keterlibatan penuh pemerintah pusat dan daerah, cita-cita sekolah inklusi masih jauh dari harapan. Karena itu, langkah berikut bisa dipertimbangkan. Mengangkat sarjana pendidikan khusus sebagai PNS yang ditempatkan di sekolah negeri dan sekolah swasta. Kehadiran mereka bisa memotivasi dan mengedukasi guru-guru lainnya.

Maka itu, diharapkan sekolah inklusi semakin bertambah, minimal satu kabupaten satu sekolah, bahkan lebih. Menyelenggarakan pelatihan dan seminar terkait pendidikan inklusi untuk guru dan orang tua siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tidak semua guru dan orang tua memahami dengan baik tentang pendidikan inklusi sehingga mereka cenderung menghindari, takut, dan tidak mau terlibat dalam pendidikan inklusi.

Memberikan insentif kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, termasuk kepada guru khusus, guru mata pelajaran, dan wali kelas, karena tugas mereka lebih berat daripada guru di kelas reguler. Jika insentif ini memadai, akan melahirkan beberapa sekolah inklusi baru di tingkat kabupaten dan kecamatan “tentu uang bukan sebagai tujuan utama. Menunjuk tim khusus untuk menyusun materi, metode, dan media pembelajaran khusus ABK dengan segala variasinya.

Dengan demikian, guru-guru dapat menggunakan buku, metode, dan media tersebut sebagai rujukan, dan memodifikasinya sesuai kondisi masing-masing sekolah. Kelemahan utama sekolah inklusi

adalah tidak ada materi dan media khusus untuk ABK. Akhirnya, semoga semakin banyak ABK Indonesia yang terlayani pendidikannya.



— BAB III —

SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH INKLUSI

A. Standar Sarana Pendidikan

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan Sarana dan Prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Pengertian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Standar sarana adalah sarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku, Panduan Belajar, penggunaan teknologi informasi/komunikasi, dll. Standar sarana dan prasarana adalah Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berrekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Ada lima faktor penting yang harus ada pada proses belajar mengajar yaitu: guru, murid, tujuan, materi dan waktu. Ketidak adaan salah satu faktor saja dari faktor tersebut, maka tidak mungkin terjadi proses belajar mengajar. Dengan 5 faktor tersebut, proses belajar mengajar dapat dilaksanakan walaupun kadang-kadang dengan hasil yang minimal pula. Hasil tersebut dapat ditingkatkan apabila ada sarana penunjang, yaitu faktor fasilitas/Sarana dan Prasarana Pendidikan.

“Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media”. Menurut E. Mulyasa, “Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran”.

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar-mengajar. Menurut Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan: “Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Sedangkan pengertian prasarana secara etimologis (arti kata) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya : lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga, uang dan sebagainya. Sedang sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya : ruang, buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya

Sedangkan menurut Ibrahim Bafadal bahwa “prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi

dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Jenis-jenis Sarana dan Prasarana Pendidikan

Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis atau sifatnya, yaitu:

1. Ditinjau dari fungsinya terhadap PBM, prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung (kehadirannya tidak sangat menentukan). Sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung (kehadirannya sangat menentukan) terhadap PBM.
2. Ditinjau dari jenisnya, fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas nonfisik.
3. Ditinjau dari sifat barangnya, benda-benda pendidikan dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang kesemuanya dapat mendukung pelaksanaan tugas.

Macam-macam Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Adapun macam-macam Sarana dan Prasarana yang di perlukan di sekolah demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekolah adalah :

1. Ruang kelas: tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
2. Ruang perpustakaan: tempat koleksi berbagai jenis bacaan bagi siswa dan dari sinilah siswa dapat menambah pengetahuan.
3. Ruang laboratorium (tempat praktek) : tempat siswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan .
4. Ruang keterampilan adalah tempat siswa melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu.
5. Ruang kesenian: adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni
6. Fasilitas olah raga: tempat berlangsungnya latihan-latihan olahraga.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Untuk menyempurnakan pelaksanaan administrasi Sarana dan Prasarana para ahli menyarankan beberapa pedoman pelaksanaan administrasinya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepala sekolah tidak terlalu menyibukkan diri secara langsung dengan urusan pelaksanaan administrasi Sarana dan Prasarana pengajaran.
2. Melakukan sistem pencatatan yang tepat sehingga mudah di kerjakan.
3. Senantiasa di tinjau dari segi pelayanan untuk turut memperlancar pelaksanaan program pengajaran.

Adapun masalah yang sering timbul dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana di sekolah adalah pengrusakan yang di lakukan oleh siswa–siswa di sekolah itu sendiri. Namun ada beberapa upaya yang bisa di lakukan dalam menangani masalah tersebut diantaranya adalah:

1. Membangkitkan rasa memiliki sekolah pada siswa–siswi
2. Sarana dan prasarana sekolah di siapkan yang prima sehingga tidak mudah di rusak
3. Membina siswa untuk disiplin dengan cara yang efektif dan di terima oleh semua siswa .
4. Memupuk rasa tanggung jawab kepada siswa untuk menjaga dan memelihara keutuhan dari sarana dan prasarana sekolah yang ada.

Koordinasi dalam mengelola dan memelihara sarana dan prasarana sekolah agar tetap prima adalah tugas utama dari administrator, oleh karena itu para petugas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah Adapun kebijaksanaan yang di perlukan dalam memelihara dan mengelola sarana dan prasarana sekolah adalah :

1. Membina hubungan kerja sama yang baik dengan petugas
2. Memimpin kerja sama dengan staf yang membantu petugas.
3. Memberikan pelatihan pada petugas untuk peningkatan kerjanya.
4. Mengawasi pembaharuan dan perbaikan sarana dan prasarana
5. Mengadakan inspeksi secara periodik dan teliti terhadap sarana dan prasarana.

Setiap sekolah memiliki prinsip-prinsip dan tata tertib mengenai penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, hal itu bertujuan untuk mempermudah administrator dalam mengawasi dan

mengatur sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Jenis peralatan dan perlengkapan yang di sediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar , demikian pula administrasinya yang jelek akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut, sekalipun peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keadaannya istimewa. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah penyediaan sarana di sekolah di sesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa mendatang.

Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Pemeliharaan dilakukan secara continue terhadap semua barang-barang inventaris kadang-kadang dianggap sebagai suatu hal yang sepele, padahal pemeliharaan ini merupakan suatu tahap kerja yang tidak kalah pentingnya engan tahap-tahap yang lain dalam administrasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang sudah dibeli dengan harga mahal apabila tidak dipelihara maka tidak dapat dipergunakan.

Pemeliharaan dimulai dari pemakai barang, yaitu dengan berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas professional yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. Pelaksanaan barang inventaris meliputi:

1. Perawatan
2. Pencegahan kerusakan
3. Penggantian ringan

Pemeliharaan berbeda dengan rehabilitasi, rehabilitasi adalah perbaikan berskala besar dan dilakukan pada waktu tertentu saja.

B. Standar Sarana Prasarana Sekolah Inklusi

Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi asesibilitas bagi kelancaran

mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Komponen sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan inklusi, menjadi salah satu komponen yang termasuk penting. melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus, maka sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain komponen sekolah seperti tanah, gedung, kantor, gedung sekolah, laboratorium, monumen, tempat tinggal dan sebagainya, diperlukan pula alat-alat spesifik seperti ruang khusus bagi anak Low Vision, ruang kedap suara bagi anak tunarungu, berbagai macam alat peraga bagi anak autisme, serta alat-alat bantu pembelajaran yang kesemuanya diharapkan dapat menunjang untuk anak dapat belajar secara efektif dan maksimal.

C. Sarana Perpustakaan

Sarana dan prasarana perpustakaan adalah semua benda, barang dan inventaris yang menjadi milik perpustakaan dan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. Dalam sebuah lembaga pendidikan, perpustakaan tidak berbeda dengan lembaga yang lain yang tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan lembaga tersebut, yang membedakan dengan institusi lain bagi perpustakaan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana adalah bahwa perpustakaan memiliki fungsi pendidikan, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka.

Adapun yang dimaksud dengan sarana dan prasarana bagi sebuah perpustakaan meliputi gedung, perabot, dan peralatan. Prasarana perpustakaan adalah fasilitas yang mendasar/ penunjang utama terselenggaranya perpustakaan antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan. Sedangkan sarana perpustakaan adalah peralatan atau perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi, dll.

Macam-Macam Jenis Sarana dan Prasarana Perpustakaan

1. Meja Sirkulasi memiliki desain khusus, biasanya desainnya disesuaikan dengan aktivitas di sirkulasi dan kebutuhan perlengkapan untuk mendukung layanan ini. Meja sirkulasi pada

umumnya didesain khusus dengan kapasitas daya tampung buku dan berkas-berkas lainnya dalam jumlah yang banyak. Meja sirkulasi biasanya terdiri dari beberapa meja yang memungkinkan menunjang aktivitas layanan secara optimal.

2. Meja Baca sangat dibutuhkan oleh perpustakaan. Meja baca ada bermacam-macam, ada yang berkapasitas untuk dua orang, kapasitas empat orang, dan bahkan untuk kapasitas 6 orang. Pemilihan jenis meja sangat tergantung dari luas ruangan perpustakaan.
3. Meja Kerja tidak begitu banyak dibutuhkan oleh perpustakaan, namun demikian meja ini sangat penting. Segala aktivitas perpustakaan dikendalikan dari meja kerja. Meja kerja berbeda dari meja sirkulasi, pada umumnya meja kerja adalah tunggal, dan meja sirkulasi terdiri dari beberapa meja dua atau tiga meja dengan desain khusus kemudian digabung menjadi satu.
4. Meja/Rak Atlas merupakan meja atau rak secara khusus digunakan untuk menempatkan atlas. Penempatan atlas biasanya diletakkan secara horizontal, karena atlas yang baik dan lengkap ukurannya besar yaitu 50 cm x 70 cm. Karena ukurannya yang besar tersebut maka diperlukan rak atau meja khusus yang berbeda dengan rak penempatan buku.
5. Rak Buku atau juga lemari buku untuk menyusun buku-buku perpustakaan sekolah. Usahakan ukurannya disesuaikan dengan tinggi badan siswa sekolah yang dilayani. Rak buku biasanya terdiri dari dua sisi yang masing-masing sisi digunakan untuk penempatan koleksi yang dimiliki perpustakaan. Namun demikian ada juga rak buku yang hanya satu sisi/satu muka. Rak yang satu muka biasanya di tempat merapat dengan dinding perpustakaan.
6. Rak Majalah berbeda dengan rak buku. Rak buku pada umumnya memiliki ketinggian 190 cm dengan empat sampai lima sap untuk penempatan buku, tetapi untuk rak majalah biasanya rendah terdiri dari 2 sap. Konstruksi yang rendah ini dimaksudkan untuk memudahkan pengguna mengambil koleksi yang dibutuhkan (jika layanan menggunakan sistem terbuka).
7. Rak Surat Kabar dapat dimanfaatkan untuk menempatkan surat kabar. Apabila surat kabar disusun dengan cara dilipat akan cepat rusak atau sobek. Untuk itu perlu rak khusus, yaitu rak surat kabar yang dapat dibuat dari kayu. Lebarinya disesuaikan dengan ukuran surat kabar. Rak surat kabar ini dilengkapi dengan alat penjepit

(stick) yang panjangnya 36 inci. Alat penjepit ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga surat kabar mudah dipasang dan dilepaskan.

8. Almari Kabinet digunakan untuk menunjang kelancaran kerja. Berkas-berkas dan arsip perpustakaan biasanya disimpan di almari kabinet.
9. Almari Katalog atau disebut juga kabinet katalog digunakan untuk menyimpan kartu katalog. Besarnya lemari katalog sesuai dengan jumlah laci katalog, sedangkan tingginya sesuai dengan tinggi badan siswa. Setiap laci katalog dilengkapi dengan alat penusuk kartu atau stang agar kartu-kartu tidak mudah dicabut keluar atau diambil. Apabila perpustakaan sekolah sudah maju, dimana jenis kartu katalog yang dibuat bermacam-macam, sebaiknya untuk satu jenis katalog (misalnya katalog judul) disediakan satu lemari katalog. Di atas lemari katalog tersebut diberi tulisan “Katalog Judul”.
10. Kereta Buku biasanya sangat dibutuhkan di perpustakaan sekolah yang besar. Kegunaannya adalah untuk mengangkut buku-buku yang dikembalikan oleh siswa, yaitu dari meja sirkulasi ke rak buku atau mengangkut buku yang telah diproses yaitu dari bagian “processing” ke rak buku. Kereta buku harus kuat sehingga dapat mengangkut buku-buku yang jumlahnya banyak. Kereta buku sebaiknya menggunakan roda.
11. Papan Display adalah suatu papan yang dapat digunakan untuk memamerkan informasi buku yang baru datang. Melalui papan display ini dapat ditempelkan daftar buku yang baru dimiliki oleh perpustakaan. Dengan demikian siswa atau pengguna mengetahui buku-buku baru.
12. Meja dan Kursi Belajar untuk siswa yang akan membaca atau belajar di perpustakaan. Meja dan kursi belajar harus kuat, menarik, dan enak dipakai. Meja dan kursi belajar dapat dibuat dari kayu yang berkualitas tinggi sehingga tidak mudah rusak. Agar menarik sebaiknya meja dan kursi semuanya seragam, baik warnanya maupun bentuknya. Bagian bawah meja tidak tertutup sehingga siswa yang belajar tidak merasa panas. Meja dan kursi belajar harus dibuat sedemikian rupa sehingga siswa yang sedang membaca atau belajar tidak terganggu oleh siswa yang lain. Ukuran kursi lebar dan tingginya sesuai dengan keadaan fisik siswa.

Cara Pengaturan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

1. Penataan Meja dan Kursi Belajar

Bahan-bahan pustaka tidak semuanya dapat dibawa pulang, ada yang hanya dibaca di ruang perpustakaan, misalnya buku-buku referensi, majalah, surat kabar, buletin, jurnal semuanya hanya boleh dibaca di ruang perpustakaan. Oleh sebab itu diruang perpustakaan harus disediakan meja dan kursi belajar dengan aman, nyaman, dan tenang, meja dan kursi belajar harus ditata dengan sebaik-baiknya. Penataan meja dan kursi belajar yang baik diintegrasikan dengan tempat atau rak-rak buku.

Perpustakaan perlu juga menyediakan beberapa meja dan kursi belajar yang sengaja ditata untuk kepentingan belajar kelompok, diskusi kelompok, dan mengerjakan tugas-tugas kelompok. Sebaiknya meja dan kursi belajar kelompok ini ditata dan ditempatkan di ruang-ruang tersendiri, yaitu ruang belajar kelompok agar tidak mengganggu orang lain yang sedang belajar perorangan. Ruang belajar kelompok bisa dipakai oleh 5-15 orang. Seandainya tidak ada ruang-ruang kecil untuk belajar kelompok ini sebaiknya penempatannya agak jauh dari tempat belajar perorangan atau dibatasi oleh rak-rak buku sehingga suara kegaduhan yang mungkin timbul akibat diskusi tidak terlalu keras dan tidak terlalu mengganggu orang lain yang sedang belajar perorangan. Meja dan kursi belajar untuk belajar kelompok harus ditata sedemikian rupa sehingga siswa yang belajar kelompok kohensif dan produktif.

2. Penataan Ruang Kerja Petugas

Dalam penyelenggaraan perpustakaan terdapat kepala perpustakaan, petugas tata usaha, petugas teknis, dan petugas pelayanan pembaca. Selanjutnya perpustakaan harus dilengkapi dengan ruang atau gedung yang luas dan di dalamnya terbagi lagi menjadi beberapa ruang yang digunakan oleh petugas perpustakaan. Sehingga petugas perpustakaan tersebut dapat dengan leluasa mengatur dan mengondisikan yang terdapat di dalam perpustakaan. Suatu tata ruang perlu diadakan perubahan tatanan sewaktu-waktu, mungkin karena ada tambahan petugas baru atau tambahan perlengkapan.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Dalam pemeliharaan ini ada dua cara kegiatan yang bisa ditempuh agar kondisi perpustakaan dengan segala fasilitas, perabotan dan perlengkapannya tetap dalam keadaan baik.

1. Tindakan Preventiv

Tindakan preventiv ini dimaksudkan untuk mencegah sebelum bahan atau koleksi perpustakaan termasuk segala fasilitas, dan perabotan serta perlengkapannya mengalami kerusakan. Caranya antara lain sebagai berikut:

- a. Membersihkan secara rutin seluruh perabotan dan perlengkapan perpustakaan, termasuk keadaan ruangan yang harus selalu dalam keadaan bersih.
- b. Membungkuns atau memberi sampul setiap buku yang dimiliki oleh perpustakaan
- c. Mengatur ventilasi udara supaya tetap dalam keadaan normal, tidak terlalu dingin, dan tidak terlalu panas. Sinar matahari diusahakan supaya tidak langsung menembus ruangan perpustakaan
- d. Membersihkan koleksi buku dan lainnya dengan menggunakan kebut pembersih atau dengan lap yang bersih
- e. Memberi peringatan kepada para pengguna agar secara bersama-sama turut menjaga kebersihan dan kelestarian perpustakaan
- f. Memasang rambu-rambu peringatan diruang perpustakaan yang isinya memohon kepada pengunjung agar menjaga kebersihan dan keamanan
- g. Tetap menjaga kerapihan letak buku-buku atau koleksi perpustakaan, termasuk perlengkapan dan perabotannya agar selalu dalam keadaan siaga

2. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif artinya perbaikan barang yang sudah terlanjur rusak. Tindakan perbaikan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penjilidan sederhana terhadap buku-buku yang rusak sebagian, seperti: misalnya kulit buku yang sobek sebgian, lepas dan kerusakan sejenisnya
- b. Melaksanakan penyemprotan dengan menggunakan obat-obat anti serangga guna membunuh serangga pengganggu

- yang bercokol disela-sela buku dan bahan koleksi lain di perpustakaan
- c. Mengganti bahan-bahan yang sudah rusak sekali dengan bahan yang baru terutama jika buku-buku tersebut banyak peminatnya
 - d. Meminta ganti rugi kepada pengguna perpustakaan yang dengan sengaja telah merusak atau menghilangkan koleksi milik perpustakaan

D. Sarana Laboratorium

Menurut PERMENPAN No. 3 Tahun 2010 laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laboratorium (disingkat lab) adalah suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi bahan tertentu.

Laboratorium dibedakan sesuai bidang keilmuan yang dipelajari, misalnya laboratorium kimia yang berkecimpung dalam bidang ilmu kimia. Laboratorium kimia terbagi lebih spesifik lagi seperti laboratorium kimia fisika, laboratorium kimia organik, laboratorium kimia anorganik, laboratorium kimia analitik, laboratorium biokimia, laboratorium kimia instrumen, dsb.

Tipe Laboratorium berdasarkan PERMENPAN No. 3 tahun 2010, terbagi dalam 4 kategori:

1. **Laboratorium Tipe I** adalah laboratorium ilmu dasar yang terdapat di sekolah pada jenjang pendidikan menengah, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I dan II,

dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan siswa.

2. **Laboratorium Tipe II** adalah laboratorium ilmu dasar yang terdapat di perguruan tinggi tingkat persiapan (semester I, II), atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I dan II, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa.
3. **Laboratorium Tipe III** adalah laboratorium bidang keilmuan terdapat di jurusan atau program studi, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I, II, dan III, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan, dan penelitian mahasiswa dan dosen.
4. **Laboratorium Tipe IV** adalah laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi fakultas atau universitas, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I, II, dan III, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dan dosen.

Adanya kelengkapan sarana pembelajaran seperti tersedianya laboratorium diharapkan dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Menurut Soejitno (1983) secara garis besar fungsi laboratorium adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah. Keduanya saling kaji -mengkaji dan saling mencari dasar.
- b. Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa/ siswa.
- c. Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu obyek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial.
- d. Menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran.
- e. Memupuk rasa ingin tahu mahasiswa/ siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan.

- f. Memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan yang diperoleh, penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja laboratorium.

Di dalam pembelajaran sains, laboratorium berperan sebagai tempat kegiatan penunjang dari kegiatan di kelas. Bahkan mungkin sebaliknya bahwa yang berperan utama dalam pembelajaran sains adalah laboratorium, sedangkan kelas sebagai tempat kegiatan penunjang. Fungsi lain dari laboratorium adalah sebagai tempat display atau pameran, sebagai museum kecil, perpustakaan dan tempat sumber belajar (Wirjosoemanto, dkk, 2004).

Secara umum kegiatan pemanfaatan laboratorium di sekolah-sekolah adalah melalui kegiatan praktikum, yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori.

Kegiatan praktikum dalam pembelajaran merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan seperti yang dijelaskan oleh Woolnough (dalam Rustaman, dkk, 2003) yang mengemukakan empat alasan mengenai pentingnya kegiatan praktikum. Pertama, praktikum membangkitkan motivasi belajar. Kedua, praktikum mengembangkan kemampuan dasar melakukan eksperimen. Ketiga, praktikum menjadi wahana pendekatan ilmiah. Keempat, praktikum menunjang materi pelajaran.

Engkoswara (1982) mengatakan bahwa melalui kegiatan praktikum yang biasanya dilakukan di laboratorium, siswa diharapkan dapat :

- mengembangkan berbagai keterampilan secara terintegrasi.
- mengenal berbagai peralatan laboratorium.
- mengenal berbagai desain dan peralatan untuk eksperimen.
- mengembangkan keterampilan mengumpulkan dan menginterpretasikan data.
- mengembangkan sikap untuk melakukan sesuatu secara tepat dan akurat.
- mengembangkan keterampilan dalam mengobservasi.
- mengembangkan kemampuan dalam mengkomunikasikan hasil eksperimen.
- mengembangkan kecakapan dalam menulis laporan.
- mengembangkan kemampuan untuk belajar dan melakukan percobaan sendiri.

- menambah keberanian berfikir sendiri dan menanggung resiko.
- merangsang berfikir siswa melalui eksperimen.
- mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah dengan berbagai variabel yang banyak dan berbagai kemungkinan pemecahannya
- mengembangkan keberanian untuk mengadakan kerja sama, mengembangkan inisiatif, dan menggunakan berbagai sumber
- mengembangkan tanggung jawab pribadi
- mengembangkan kecakapan untuk bekerja secara efektif sebagai anggota dari suatu tim.

Melihat betapa pentingnya kegiatan praktikum, maka di tiap-tiap sekolah sudah seharusnya melaksanakan praktikum dengan mengacu pada Garis Besar Program Pengajaran atau kurikulum yang berlaku. Kegiatan pemanfaatan laboratorium dapat dilihat dari intensitas praktikum yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah. Jika guru sering melaksanakan praktikum menunjukkan bahwa guru tersebut telah berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar dan memberikan pengalaman - pengalaman nyata bagi siswanya.

Motivasi menentukan tingkat keberhasilan atau gagalnya kegiatan belajar siswa. Hasil belajar optimal akan tercapai apabila siswa terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun emosional dalam proses pembelajaran. Kegiatan laboratorium merupakan salah satu cara untuk memotivasi siswa dalam belajar, sehingga hasil belajar akan lebih optimal. Ditinjau dari tujuan kegiatan laboratorium yaitu membantu mendorong siswa untuk aktif belajar dengan memberi kesempatan pada siswa untuk mencoba sendiri atau mengamati keadaan nyata, dapat memotivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan hasil belajar.

Semangat belajar pada diri siswa akan selalu ada jika siswa tersebut selalu termotivasi. Jadi, jika praktikum rutin/ sering dilaksanakan maka siswa akan termotivasi dan hasil belajarnya dapat meningkat. Disisi lain, keberhasilan pelaksanaan praktikum juga dapat ditunjang oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sekolah, guru, siswa, fasilitas, dan waktu. Untuk faktor siswa, pada kenyataannya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain mempunyai kemampuan melaksanakan praktikum yang berbeda-beda. Hal ini karena masing-masing anak mempunyai intelegensi yang

berbeda, sehingga penguasaan konsep dasar dari masing-masing siswa juga berbeda.

Woolnough (dalam Rustaman dkk, 2003) mengemukakan bahwa bentuk praktikum bisa berupa latihan, investigasi (penyelidikan) atau bersifat pengalaman. Bentuk praktikum yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan aspek tujuan dari praktikum yang diinginkan.

Dalam proses belajar mengajar kegiatan laboratorium atau praktikum turut berperan dalam mencapai 3 tujuan pembelajaran, antara lain :

- a. Keterampilan kognitif, misalnya :
 - Melatih agar teori dapat dimengerti
 - Agar teori dapat diterapkan pada keadaan problem nyata.
- b. Keterampilan afektif, misalnya :
 - Belajar bekerja sama
 - Belajar menghargai bidangnya
 - Belajar merencanakan kegiatan secara mandiri.
- c. Keterampilan psikomotorik, misalnya :
 - Belajar memasang peralatan sehingga betul-betul berjalan
 - Belajar memakai peralatan dan instrumen tertentu.

Penerapan kegiatan laboratorium dalam pembelajaran memiliki kebaikan dan kelemahan. Kebaikan dari pelaksanaan praktikum antara lain :

- Melibatkan siswa secara langsung dalam mengamati suatu proses.
- Siswa dapat meyakini akan hasilnya, karena langsung mendengar, melihat, meraba, dan mencium yang sedang dipelajari.
- Siswa akan mempunyai kemampuan dalam ketrampilan mengelola alat, mengadakan percobaan, membuat kesimpulan, menulis laporan, dan mampu berfikir analitis.
- Siswa lebih cenderung tertarik pada obyek yang nyata di alam sekitarnya.
- Memupuk dan mengembangkan sikap berfikir ilmiah, sikap inovatif, dan saling bekerja sama.
- Membangkitkan minat ingin tahu, memperkaya pengalaman ketrampilan kerja dan pengalaman berfikir ilmiah.

Sedangkan kelemahan/ kekurangan dari praktikum antara lain :

- Guru harus benar-benar mampu, menguasai materi dan ketrampilan.
- Tdak semua mata pelajaran dapat dipraktikkan dan tidak semua diajarkan dengan metode praktik.
- Alat-alat dan bahan yang mahal harganya dapat menghambat untuk melakukan praktik.
- Banyak waktu yang diperlukan untuk praktik, sehingga kemungkinan dapat dilaksanakan diluar jam pelajaran (Indarto, 2002).

Fungsi laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Salah satu kegiatan yang menerapkan metode ilmiah dalam pembelajaran adalah dengan melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium. Melalui kegiatan praktikum siswa akan melakukan kerja ilmiah sehingga dapat mengembangkan kemampuan menemukan masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, membuat hipotesis, merancang penelitian atau percobaan, mengontrol variabel, melakukan pengukuran, mengorganisasi dan memaknakan data, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian atau percobaan baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam pembelajaran pemanfaatan laboratorium atau kegiatan praktikum merupakan bagian dari proses belajar mengajar. Melalui kegiatan praktikum siswa akan membuktikan konsep atau teori yang sudah ada dan dapat mengalami proses atau percobaan itu sendiri, kemudian mengambil kesimpulan, sehingga dapat menunjang pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dalam hal ini jika siswa lebih paham terhadap materi pelajaran diharapkan hasil belajarnya dapat meningkat.

Amien (1987) juga mengemukakan bahwa praktikum merupakan salah satu kegiatan laboratorium yang sangat berperan dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Dengan praktikum, maka siswa akan dapat mempelajari melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejala maupun proses-proses, dapat melatih keterampilan berfikir ilmiah, dapat menanamkan dan mengembangkan sikap ilmiah, dapat menemukan dan memecahkan berbagai masalah baru melalui metode ilmiah, dan lain sebagainya. Kegiatan praktikum dapat diartikan sebagai salah satu strategi mengajar dengan menggunakan pendekatan ilmiah terhadap gejala-

gejala, baik gejala sosial, psikis, maupun fisik yang diteliti, diselidiki, dan dipelajari.

E. Sarana Kelas

Dalam proses pembelajaran dikelas sangat penting dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan dan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Segala aspek pendidikan pengajaran berproses, guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat dan individualnya.

Dengan kondisi yang baik diharapkan proses belajar mengajar akan berlangsung baik pula. Bagi seorang guru sangat berperan penting memiliki kemampuan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik dan untuk mencapai tingkat yang optimal dalam kegiatan pembelajaran kemampuan pengelolaan kelas merupakan salah satu faktor yang harus dikuasai guru.

Purnomo mengemukakan pendapatnya bahwa kelas merupakan ruangan belajar (lingkungan fisik) dan rombongan belajar (lingkungan emosional).

Lingkungan fisik meliputi :

- a. Ruangan
- b. Keindahan kelas
- c. Pengaturan tempat duduk
- d. Pengaturan sarana serta alat pengajaran
- e. Ventilasi dan pengaturan cahaya

Lingkungan sosio emosional meliputi :

- a. Tipe kepemimpinan guru
- b. Suara guru
- c. Sikap guru
- d. Pembinaan hubungan yang baik

Adapun tujuan pengaturan atau pengelolaan kelas adalah menyediakan, menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal didalam kelas sehingga siswa dapat belajar dan bekerja dengan baik. Selain itu guru juga dapat mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan.

Pembelajaran aktif, kreatif, dan efektif merupakan pembelajaran yang tidak hanya terpaku menggunakan satu pendekatan saja, tetapi dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Aktif yang

dimaksudkan disini adalah dimana siswa belajar dalam situasi yang memungkinkan potensinya dapat dikembangkan untuk berproses dan menghasilkan karya. Kreatif yaitu adanya karya yang memiliki tujuan yang sama tetapi dengan bentuk kreasi yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Efektif maksudnya adalah pembelajaran yang mendorong aktivitas dan kreatifitas siswa untuk mencapai suatu tujuan.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa salah satu faktor penting yang menentukan hasil belajar adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan segala sesuatu yang ada disekitar siswa. Lingkungan belajar tersebut dapat bersifat fisik, misalnya ruang kelas, kebersihan kelas serta sarana dan prasarana lainnya. Lingkungan kelas juga dapat bersifat non fisik, misalnya interaksi, ketenangan, dan kenyamanan.

Adapun cara mengatur lingkungan fisik yang kondusif untuk siswa:

1. Pengaturan kelas
Aturlah ruang kelas supaya lebih nyaman. Ruang kelas harus memiliki jendela dan ventilasi yang cukup sehingga terjadi pergantian udara secara bebas. Atur meja-kursi guru dan siswa agar tidak berdesakan serta sesuai dengan jumlah meja-kursi dengan kapasitas ruangan.
2. Alat peraga dan sumber belajar
Beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan alat peraga yaitu :
 - Alat peraga diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau siswa dan tetap aman.
 - Alat peraga diupayakan sering digunakan disamping untuk meningkatkan kualitas pembelajaran juga meningkatkan apresiasi siswa terhadap alat peraga.
 - Aturan penggunaan alat peraga perlu dibuat dan ditaati
3. Menjaga kebersihan kelas
Kelas harus dijaga kebersihannya oleh anggota kelas, sediakan tempat sampah diluar kelas. Secara berkala siswa dapat membersihkan dan menjaga kelas secara bersama-sama.

4. Pengaturan dinding kelas
Atur dinding kelas agar terlihat indah, jangan biarkan dinding terlihat kosong, tetapi isi dengan berbagai sumber belajar, media, kata-kata mutiara, dan hasil karya lainnya.
5. Pajangan kelas
Pajangan kelas dapat dikelola dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - Pajangan dipasang pada tempat yang mudah dibaca oleh siswa
 - Pekerjaan anak hendaknya dipajangkan secara individual sehingga dapat dikenali dengan mudah
 - Yang dipajangkan hendaknya dalam keadaan bersih dan menarik
 - Materi yang dipajangkan dapat ditempelkan pada dinding
6. Sudut baca/perpustakaan
Buatlah perpustakaan kelas yang menjamin siswa untuk aktif membaca dan menelusuri informasi. Buku-buku diperpustakaan tidak hanya buku pelajaran saja akan tetapi juga sebaiknya disediakan buku yang menarik dan inspiratif.
7. Menghindari kebisingan
Kebisingan merupakan masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah yang ada diperkotaan. Biasanya dikota terdapat bangunan ruang kelas yang dekat dengan jalan raya.
8. Sediakan tempat bersosialisasi
Sekolah bukan hanya untuk tempat belajar tetapi juga tempat bersosialisasi. Oleh karena itu sekolah perlu menyiapkan tempat untuk mereka yang bersosialisasi.

Cara mengatur lingkungan non fisik sebagai berikut :

- a. Interaksi siswa dengan guru serta siswa dengan siswa lainnya
- b. Membuat aturan, tata tertib, etika yang disepakati oleh semua siswa
- c. Kenyamanan kelas sebagai tanggung jawab bersama
- d. Menyeimbangkan pujian dan kritik
- e. Membangun energi kelas
- f. Disiplin kelas
- g. Refleksi

Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan interaksi belajar mengajar yang baik. Dengan penataan ruang kelas bagi proses belajar mengajar dibutuhkan pengembangan variasi baik dari segi penataan

tempat duduk maupun perlengkapan yang menunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan segala pengelolaan dan penataan kelas yang baik akan menimbulkan semangat belajar dan peserta didik tidak sukar untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Ciri utama kelas adalah pada aktivitasnya untuk dapat menjalankan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dinamis perlu adanya sesuatu aktivitas pengelolaan kelas baik dan terencana.

Beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Ukuran dan bentuk kelas
- b. Pengaturan tempat duduk
- c. Pengaturan alat-alat pengajaran
- d. Penataan keindahan dan kebersihan kelas
- e. Ventilasi dan tata cahaya

F. Sarana Ibadah

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat.

Pendidikan agama dimaksud untuk peningkatan potensi spiritual dan membetuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengamalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil,

berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini mendorong dikembangkannya standar Sarana dan Prasarana Ibadah sesuai dengan jenjang satuan pendidikan yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri:

1. Lebih menitik beratkan pencapaian pemanfaatan dan pemberdayaan Sarana dan Prasarana Ibadah Pendidikan Agama Islam;
2. Mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia;

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

Pendidik diharapkan dapat mengembangkan penggunaan Sarana dan Prasarana Ibadah untuk mendukung pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Peran semua unsur satuan pendidikan, orang tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam.

G. Sarana Olahraga

Sarana dan Prasarana Olahraga adalah suatu bentuk permanen, baik itu ruangan di luar maupun di dalam. Contoh : gymnasium, lapangan permainan, kolam renang, dsb. (Wijarsanto 1984:154). Ada beberapa pengertian menurut sumber yang berbeda, antara lain :

1. Sarana prasarana olahraga adalah semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program kegiatan olahraga (Seminar Prasarana Olahraga untuk Sekolah dan Hubungannya dengan Lingkungan, 1978).
2. Sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga. Prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olahraga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik statusnya jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan

program kegiatan olahraga (Kumpulan Makalah Manajemen Olahraga : 38).

Tujuan Sarana dan Prasarana Penjas dan Olahraga

Menurut Agus S. Suryobroto (2004:4), tujuan sarana dan prasarana pendidikan jasmani dalam pembelajaran pendidikan jasmani adalah untuk:

1. Memperlancar jalannya pembelajaran. Hal ini mengandung arti bahwa dengan adanya sarana dan prasarana akan menyebabkan pembelajaran menjadi lancar, seperti tidak perlu antri atau menunggu siswa lain dalam melakukan aktivitas.
2. Memudahkan gerak. Dengan sarana dan prasarana akan mempermudah proses pembelajaran pendidikan jasmani.
3. Mempersulit gerakan. Maksudnya bahwa secara umum melakukan gerakan tanpa alat akan lebih mudah jika dibandingkan dengan menggunakan alat.
4. Memacu siswa dalam bergerak. Maksudnya siswa akan terpacu melakukan gerakan jika menggunakan bola, dibanding hanya membayangkan saja. Begitu pula melempar lembing lebih tertarik dengan alat lembing dibanding hanya gerakan bayangan.
5. Kelangsungan aktivitas, karena jika tidak maka tidak jalan. Contohnya main lapangan tanpa ada bola tidak mungkin. Main sepakbola tanpa ada lapangan tidak akan berjalan.
6. Menjadikan siswa tidak takut untuk melakukan gerakan/aktivitas. Sebagai misal untuk melakukan gerakan salto ke depan atau lompat tinggi gaya flop, jika ada busa yang tebal maka siswa berani melakukan dibanding hanya ada busa tipis saja.

Adapun manfaat sarana dan prasarana pendidikan jasmani untuk mendukung proses pembelajaran menurut Agus S. Suryobroto (2004:5-6) adalah :

1. Dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan siswa, karena siswa bersikap, berfikir dan bergerak. Dalam hal ini dengan adanya sarana dan prasarana dapat lebih memotivasi siswa dalam bersikap,berfikir, dan melakukan aktivitas jasmani.
2. Gerakan dapat lebih mudah atau sulit. Dengan sarana dan prasarana dapat memudahkan gerakan yang sulit, contoh : guling lenting lebih mudah dibantu dengan peti lompat dibanding tanpa menggunakan peti lompat. Sebaliknya dalam kaitnya mempersulit

gerakan yang mudah, contohnya : secara umum melakukan gerakan awal tanpa alat lebih mudah dibanding dengan menggunakan alat.

3. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan.
4. Menarik perhatian siswa.

Standardisasi Sarana dan Prasarana Penjas dan Olahraga

Berikut ini Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa.

Persyaratan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani menurut Agus S. Suryobroto (2004:16-18) adalah :

1. Aman. Unsur keamanan merupakan unsur pokok dalam pendidikan jasmani, artinya keamanan dalam pendidikan jasmani merupakan prioritas utama sebelum unsur lain.
2. Menarik. Sarana dan prasarana yang baik menarik akan memacu siswa untuk menggunakannya.
3. Sesuai dengan kebutuhan. Dengan menyediakan sarana dan prasarana hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya.
4. Sesuai dengan tujuan.
5. Tidak mudah rusak. Maksudnya adalah penggunaan sarana dan prasarana hendaknya tidak hanya digunakan satu atau dua kali saja.
6. Sesuai dengan lingkungannya. Maksudnya adalah jangan sampai mengadakan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah, misalnya sarana dan prasarana yang cocok untuk lapangan lunak namun digunakan untuk lapangan keras.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani

Menurut Depdikbud (dalam Yetty Sarjono, 2007:70) sarana dan prasarana merupakan sumber daya yang penting dan utama dalam menopang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Apabila sekolah tidak memiliki fasilitas, seperti lapangan dan hall maka ini merupakan kendala yang sangat berarti bagi kelancaran proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Jika yang kurang hanya alat maka masih bisa diakali oleh guru atau yang disebut dengan modifikasi pembelajaran. Namun jika yang tidak ada fasilitas maka guru tidak dapat berbuat banyak terhadap kondisi tersebut dan menyebabkan hak siswa untuk bergerak dan bermain tidak dapat tersalurkan.

Ditambah dengan penjelasan dari Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yang berisi tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, pada pasal 1 yang dijelaskan bahwa standar sarana dan prasarana harus mencakup kriteria minimum.

Menciptakan Sarana dan Prasarana Olahraga yang sesuai dengan Perkembangan Zaman

Kegiatan olahraga memerlukan ruang untuk bergerak yang ditentukan dengan standar tata ruang perorangan. Sarana prasarana olahraga paling sedikit atau minimal disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berolahraga itu sendiri. Sehingga disini kunci dari tujuan sarana prasarana adalah sehingga media olahraga yang diharapkan dengan adanya sarana penunjang kegiatan olahraga berjalan dengan baik dan optimal.

Penggunaan prasarana olahraga selalu dikaitkan dengan kegiatan olahraga yang memiliki sifat :

1. Horizontal

Dalam arti bersifat menyebar atau meluas sesuai dengan konsep “Sport for all” atau dengan semboyan yang kita miliki memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang tujuannya untuk kebugaran dan kesehatan.

2. Vertikal

Dalam arti bersifat mengarah ke atas dengan tujuan mencapai prestasi tinggi dalam cabang olahraga tertentu baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Penggunaan prasarana olahraga perlu menyertakan 3 faktor untuk dapat memenuhi kedua arah tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Kuantitas

Guna menampung kegiatan olahraga yang jumlahnya mencukupi sesuai dengan ketentuan seperti yang ditentukan di dalam pedoman penyiapan prasarana.

2. Kualitas

Guna menampung kegiatan olahraga prestasi prasarana olahraga yang disiapkan perlu memenuhi kualitas dengan syarat dan ketentuan masing-masing cabang olahraga, yang meliputi:

- Memenuhi Standard Internasional.
- Kualitas bahan atau material harus memenuhi syarat Internasional.

3. Dana

Untuk menunjang kedua faktor tersebut diperlukan dana yang cukup sehingga cepat disiapkan prasarana yang mencukupi jumlahnya serta kualitas memenuhi syarat. Dalam menciptakan sarana prasarana olahraga yang sesuai dengan perkembangan zaman, yakni :

- a. Kuantitas sarana prasarana olahraga harus diperbanyak. Kualitas harus ditingkatkan agar tidak hanya kuantitas yang banyak, namun kualitasnya juga baik. Yang terpenting adalah dana harus dirancang sedemikian rupa agar rencana pembangunan sarana prasarana olahraga dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu perlu dikembangkan ketiga faktor tersebut secara agar sarana prasarana olahraga di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. Memperhatikan peta kependudukan Indonesia, kepadatan dan penyebaran penduduknya karena jumlah kebutuhan sarana prasarana olahraga harus sesuai dengan jumlah penduduk yang akan menggunakannya.
- c. Mengacu pada Standard kebutuhan prasarana olahraga sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- d. Otonomi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik yakni harus ada koordinasi agar dapat memberi saran dan pedoman teknis karena mereka lebih mengetahui bagaimana kondisi daerahnya sehingga dapat menyempurnakan pengembangan sarana prasarana olahraga yang sesuai dengan perkembangan zaman.



— BAB IV —

SARANA DAN PRASARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

A. Sarana dan Prasarana Anak Tunanetra

1. Pengertian Anak Tunanetra

Menurut Daniel P. Hallahan, James M. Kauffman, dan Paige C. Pullen (2009: 380), mengemukakan “Legally blind is a person who has visual acuity of 20/200 or less in the better eye even with correction (e.g., eyeglasses) or has a field of vision so narrow that its widest diameter subtends an angular distance no greater than 20 degrees”.

Definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa anak buta adalah seseorang yang memiliki ketajaman visual 20/200 atau kurang pada mata/penglihatan yang lebih baik setelah dilakukan koreksi (misalnya kacamata) atau memiliki bidang penglihatan begitu sempit dengan diameter terlebar memiliki jarak sudut pandang tidak lebih dari 20 derajat. Definisi tersebut diperkuat dengan pengertian menurut Barraga, 1983 (dalam Wardani dkk, 2007: 4.5) bahwa:

Anak yang mengalami ketidakmampuan melihat adalah anak yang mempunyai gangguan atau kerusakan dalam penglihatannya sehingga menghambat prestasi belajar secara optimal, kecuali jika dilakukan penyesuaian dalam pendekatan-pendekatan penyajian pengalaman belajar, sifat-sifat bahan yang digunakan, dan/atau lingkungan belajar.

Pendapat di atas memberikan kita pemahaman bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap seseorang yang mengalami keterbatasan melihat atau anak tunanetra yang memiliki kekhasan dan cara tersendiri untuk mencapai tahapan yang sama dalam perkembangannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa anak tunanetra merupakan anak yang mengalami keterbatasan penglihatan secara keseluruhan (the blind) atau secara sebagian (low vision) yang menghambat dalam memperoleh informasi secara visual sehingga dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan prestasi belajar.

2. Karakteristik Anak Tunanetra

Anak yang mengalami keterbatasan penglihatan memiliki karakteristik atau ciri khas. Karakteristik tersebut merupakan implikasi dari kehilangan informasi secara visual. Menurut Sari Rudyati (2002: 34-38) karakteristik anak tunanetra yaitu: 1) rasa curiga terhadap orang lain; 2) perasaan mudah tersinggung; 3) verbalisme; 4) perasaan rendah diri; 5) adatan; 6) suka berfantasi; 7) berpikir kritis; dan 8)

pemberani. Karakteristik anak tunanetra tersebut dapat dikaji dan dimaknai lebih lanjut sebagai berikut:

a. Rasa curiga terhadap orang lain

Tidak berfungsinya indera penglihatan berpengaruh terhadap penerimaan informasi visual saat berkomunikasi dan berinteraksi. Seorang anak tunanetra tidak memahami ekspresi wajah dari teman bicaranya atau hanya dapat melalui suara saja. Hal ini mempengaruhi saat teman bicaranya berbicara dengan orang lainnya secara berbisik-bisik atau kurang jelas, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman dan cepat curiga terhadap orang lain. Anak tunanetra perlu dikenalkan dengan orang-orang di sekitar lingkungannya terutama anggota keluarga, tetangga, masyarakat sekitar rumah, sekolah dan masyarakat sekitar sekolah.

b. Perasaan mudah tersinggung

Perasaan mudah tersinggung juga dipengaruhi oleh keterbatasan yang ia peroleh melalui auditori/ pendengaran. Bercanda dan saling membicarakan agar saat berinteraksi dapat membuat anak tunanetra tersinggung. Perasaan mudah tersinggung juga perlu diatasi dengan memperkenalkan anak tunanetra dengan lingkungan sekitar. Hal ini untuk memberikan pemahaman bahwa setiap orang memiliki karakteristik dalam bersikap, bertutur kata dan cara berteman. Hal tersebut bila diajak bercanda, anak tunanetra dapat mengikuti tanpa ada perasaan tersinggung bila saatnya ia yang dibicarakan.

c. Verbalisme

Pengalaman dan pengetahuan anak tunanetra pada konsep abstrak mengalami keterbatasan. Hal ini dikarenakan konsep yang bersifat abstrak seperti fatamorgana, pelangi dan lain sebagainya terdapat bagian-bagian yang tidak dapat dibuat media konkret yang dapat menjelaskan secara detail tentang konsep tersebut, sehingga hanya dapat dijelaskan melalui verbal. Anak tunanetra yang mengalami keterbatasan dalam pengalaman dan pengetahuan konsep abstrak akan memiliki verbalisme, sehingga pemahaman anak tunanetra hanya berdasarkan kata-kata saja (secara verbal) pada konsep abstrak yang sulit dibuat media konkret yang dapat menyerupai.

d. Perasaan rendah diri

Keterbatasan yang dimiliki anak tunanetra berimplikasi pada konsep dirinya. Implikasi keterbatasan penglihatan yaitu perasaan rendah diri untuk bergaul dan berkompetisi dengan orang lain. Hal ini

disebabkan bahwa penglihatan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memperoleh informasi.

Perasaan rendah diri dalam bergaul terutama dengan anak awas. Perasaan tersebut akan sangat dirasakan apabila teman sepermainannya menolak untuk bermain bersama.

e. Adatan

Adatan merupakan upaya rangsang bagi anak tunanetra melalui indera nonvisual. Bentuk adatan tersebut misalnya gerakan mengayunkan badan ke depan ke belakang silih berganti, gerakan menggerakkan kaki saat duduk, menggelenggelengkan kepala, dan lain sebagainya. Adatan dilakukan oleh anak tunanetra sebagai pengganti apabila dalam suatu kondisi anak yang tidak memiliki rangsangan baginya, sedangkan bagi anak awas dapat dilakukan melalui dria penglihatan dalam mencari informasi di lingkungan sekitar.

f. Suka berfantasi

Implikasi dari keterbatasan penglihatan pada anak tunanetra yaitu suka berfantasi. Hal ini bila dibandingkan dengan anak awas dapat melakukan kegiatan memandang, sekedar melihat-lihat dan mencari informasi saat santai atau saat-saat tertentu. Kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh anak tunanetra, sehingga anak tunanetra hanya dapat berfantasi saja.

g. Berpikir kritis

Keterbatasan informasi visual dapat memotivasi anak tunanetra dalam berpikir kritis terhadap suatu permasalahan. Hal ini bila dibandingkan anak awas dalam mengatasi permasalahan memiliki banyak informasi dari luar yang dapat mempengaruhi terutama melalui informasi visual. Anak tunanetra akan memecahkan permasalahan secara fokus dan kritis berdasarkan informasi yang ia peroleh sebelumnya serta terhindar dari pengaruh visual (penglihatan) yang dapat dialami oleh orang awas.

h. Pemberani

Pada anak tunanetra yang telah memiliki konsep diri yang baik, maka ia memiliki sikap berani dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalamannya. Sikap pemberani tersebut merupakan konsep diri yang harus dilatih sejak dini agar dapat mandiri dan menerima keadaan dirinya serta mau berusaha dalam mencapai cita-cita. Menurut Aqila Smart (2010: 39-40) karakteristik penyandang tunanetra yaitu: 1) perasaan mudah

tersinggung; 2) mudah curiga; dan 3) ketergantungan yang berlebihan. Karakteristik tersebut dapat dikaji dan dimaknai lebih lanjut sebagai berikut:

a. Perasaan mudah tersinggung

Perasaan mudah tersinggung yang dirasakan oleh penyandang tunanetra disebabkan kurangnya rangsangan visual yang diterimanya sehingga ia merasa emosional ketika seseorang membicarakan hal-hal yang tidak bisa ia lakukan dan dengar. Pengalaman kegagalan yang sering dirasakannya juga membuat emosinya semakin tidak stabil.

b. Mudah curiga

Pada tunanetra rasa kecurigaannya melebihi orang pada umumnya. Anak tunanetra merasa curiga terhadap orang yang ingin membantunya. Hal ini bahwa untuk mengurangi atau menghilangkan rasa curiganya, seseorang harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepadanya agar anak tunanetra mengenal dan memahami sikap orang lain.

c. Ketergantungan yang berlebihan

Anak tunanetra dalam melakukan suatu hal yang bersifat baru membutuhkan bantuan dan arahan agar dapat melakukannya, namun bantuan dan arahan tersebut tidak dapat dilakukan secara terus menerus. Hal ini dilakukan oleh anak tunanetra yang memiliki asumsi bahwa dengan bantuan orang awas terutama mobilitas merasa lebih aman, sehingga akan menjadikan anak tunanetra memiliki ketergantungan secara berlebihan kepada orang awas terutama pada hal-hal yang anak tunanetra dapat melakukan secara mandiri.

Berdasarkan pendapat di atas memberikan pemahaman bahwa karakteristik khas yang dimiliki anak tunanetra merupakan implikasi dari kehilangan informasi secara visual. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya potensi dan kekurangan yang dimiliki anak tunanetra. Potensi yang dimiliki anak tunanetra dapat dikembangkan sebagai kemampuan awal dalam meminimalisir kekurangannya.

Potensi dan kekurangan tersebut memerlukan pemahaman bagi orang di sekitarnya untuk mencari nilai positif dari karakteristik anak tunanetra. Karakteristik anak tunanetra yang berupa potensi meliputi sikap pemberani, berpikir kritis, dan suka berfantasi. Sikap tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran yang diasumsikan dapat meningkatkan kemampuan penjumlahan. Hal ini dipandang bahwa anak tunanetra dapat aktif dalam proses pembelajaran melalui sikap pemberani, berpikir kritis dan berfantasi pada konsep

penjumlahan. Sikap tersebut dapat meminimalisir karakteristik yang berupa kekurangan anak tunanetra.

Karakteristik yang berupa kekurangan anak tunanetra meliputi sikap mudah curiga, mudah tersinggung, rendah diri, verbalisme, adatan dan ketergantungan yang berlebihan. Sikap tersebut dipandang akan mempengaruhi sosialisasi dan adaptasi di lingkungan anak tunanetra (rumah, sekolah dan masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa anak tunanetra membutuhkan proses pembelajaran, sosialisasi dan adaptasi dalam mengenal dan memahami kondisi serta situasi lingkungan agar dapat mengurangi kekurangannya.

3. Keterbatasan Anak Tunanetra

Menurut Lowenfeld (dalam Juang Sunanto, 2005: 47) kehilangan penglihatan mengakibatkan tiga keterbatasan yang serius yaitu; 1) variasi dan jenis pengalaman (kognisi); 2) kemampuan untuk bergerak; dan 3) interaksi dengan lingkungan (sosial dan emosi). Tiga keterbatasan tersebut dapat dikaji dan dimaknai lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Variasi dan jenis pengalaman
Anak tunanetra memperoleh pengalaman melalui taktual/perabaan dan indera pendengaran, sedangkan anak awas melalui pengalaman visual dalam memperoleh informasi secara lebih lengkap dan rinci, sehingga hal ini berpengaruh pada variasi dan jenis pengalaman anak yang membutuhkan strategi dan kemampuan anak dalam memahami informasi tersebut.
- b. Kemampuan untuk bergerak
Keterbatasan penglihatan sangat mempengaruhi kemampuan untuk bergerak (mobilitas) dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk bergerak pada anak tunanetra memerlukan pembelajaran yang mengakomodasi indera nonvisual dalam bergerak secara mandiri.
- c. Berinteraksi dengan lingkungannya (sosial dan emosi)
Anak tunanetra yang mengalami permasalahan dalam interaksi dengan lingkungan dipengaruhi oleh sikap orang tua, keluarga dan masyarakat terhadapnya yakni kurang adanya penerimaan dan komunikasi yang baik. Keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan dipengaruhi oleh faktor kurangnya rangsangan penginderaan dan kurangnya

sosialisasi atau bergaul dengan masyarakat. Berdasarkan keterbatasan anak tunanetra di atas dapat dipahami bahwa keterbatasan penglihatan mempengaruhi aspek mental (variasi pengalaman dan kognisi), psikis (sosial dan emosi) dan fisik (mobilitas) anak tunanetra. Kognisi atau kemampuan berpikir anak tunanetra yang mengalami hambatan, seperti halnya kemampuan penjumlahan. Anak tunanetra mengalami hambatan untuk meningkatkan kemampuan penjumlahan yang membutuhkan variasi pengalaman dalam memudahkan memahami konsep penjumlahan. Hal tersebut dikarenakan perlu adanya rangsangan positif yang akan membangkitkan semangat dalam proses pembelajaran yang berasal dari aspek mental, fisik dan psikis. Aspek mental, fisik dan psikis anak tunanetra tersebut memerlukan penyesuaian terhadap kondisi dan potensi anak tunanetra. Penyesuaian kondisi dan potensi anak tunanetra dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran sesuai dengan konteks dan menggunakan media yang bervariasi sesuai dengan konteks materi yang diberikan. Pembelajaran yang menyesuaikan dengan konteks diasumsikan dapat mengatasi tiga keterbatasan (mental, fisik dan psikis) anak tunanetra. Tiga keterbatasan anak tunanetra dipandang penting untuk diatasi khususnya dalam kemampuan penjumlahan.

4. Sarana Khusus Anak Tunanetra

a. Alat Asesmen

Bervariasinya kelainan penglihatan pada anak tunanetra menuntut adanya pemeriksaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Asesmen kelainan penglihatan dilakukan untuk mengukur kemampuan penglihatan dalam bentuk geometri, mengukur kemampuan penglihatan dalam mengenal warna, serta mengukur ketajaman penglihatan. Alat yang digunakan untuk assesmen penglihatan anak tunanetra dapat seperti di bawah ini.

- 1) Snellen Chart (alat untuk mengetes ketajaman penglihatan dalam bentuk huruf dan simbol E)
- 2) Ishihara Test (alat untuk mengetes "buta warna")

- 3) SVR (Trial Lens Set) (alat untuk mengukur ketajaman penglihatan)
- 4) Snellen Chart Electronic (alat untuk mengetes ketajaman penglihatan sistem elektronik – bentuk huruf dan simbol E)

b. Orientasi dan Mobilitas

Pada umumnya anak tunanetra mengalami gangguan orientasi mobilitas baik sebagian maupun secara keseluruhan. Untuk pengembangan orientasi mobilitasnya dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat berikut ini.

- 1) Tongkat panjang (alat bantu mobilitas berupa tongkat panjang yang terbuat dari alluminium)
- 2) Tongkat Lipat (alat bantu mobilitas berupa tongkat yang dapat dilipat terbuat dari alluminium)
- 3) Tongkat elektrik (alat bantu mobilitas berupa tongkat yang berbunyi apabila ada benda di dekatnya)
- 4) Bola bunyi (bola sepak yang mengeluarkan bunyi)
- 5) Pelindung kepala (alat pengaman kepala dari benturan/helm sport)

c. Alat Bantu Pembelajaran/Akademik

Layanan pendidikan untuk anak tunanetra selain membaca, menulis, berhitung juga mengembangkan sikap, pengetahuan dan kreativitas. Akibat kelainan penglihatan anak tunanetra mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis, berhitung. Untuk membantu penguasaan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti berikut ini.

- 1) Peta Timbul (peta tiga dimensi bentuk relief)
- 2) Abacus (alat bantu berhitung)
- 3) Penggaris Braille (penggaris dengan skala ukur bentuk relief)
- 4) Blokies (sejumlah dadu dengan simbol Braille dengan papan berkotak)
- 5) Papan Baca (alat untuk melatih membaca)
- 6) Meteran Braille (alat untuk mengukur panjang/lebar dengan skala ukur dengan simbol Braille)
- 7) Kompas Braille (pengukur posisi arah angin dengan tanda Braille)
- 8) Kompas bicara (penunjuk arah angin dengan suara)

- 9) Talking Watch (jam-tangan elektronik yang dapat mengeluarkan suara)
- 10) Gelas Rasa (gelas untuk mengukur tingkat sensitifitas rasa)
- 11) Botol Aroma (botol berisi cairan untuk mengukur tingkat sensitifitas bau)
- 12) Braille Kit (perlengkapan pengenalan huruf dan angka Braille)
- 13) Mesin tik Braille (mesin tik dengan huruf Braille)
- 14) Kamus bicara (kamus yang dapat mengeluarkan suara berbentuk CD)
- 15) Jam tangan Braille (jam tangan dengan huruf Braille)
- 16) Puzzle Ball (puzzle bentuk potongan bola/lingkaran)
- 17) Model Anatomi (Model anatomi tiga dimensi dan dapat dirakit)
- 18) Globe Timbul (bola dunia tiga dimensi)
- 19) Bentuk-bentuk Geometri (puzzle bentuk potongan geometris/peraturan)
- 20) Collor Sorting Box (alat untuk melatih ketajaman penglihatan melalui diskriminasi warna)
- 21) Dan sebagainya.

d. Alat Bantu Visual (alat bantu penglihatan)

Kelainan penglihatan anak tunanetra bervariasi dari yang ringan (low vision) sampai yang total (total blind). Untuk membantu memperjelas penglihatannya pada anak tunanetra jenis Low vision dapat digunakan alat bantu sebagai berikut.

- 1) Magnifier Lens Set (alat bantu penglihatan bagi low vision bentuk hand and standing berbagai ukuran)
- 2) CCTV (Closed Circuit Television/alat bantu baca untuk anak low vision berupa TV monitor)
- 3) View Scan (alat bantu baca untuk anak low vision berupa scanner)
- 4) Televisi (TV monitor/pesawat penerima gambar jarak jauh)
- 5) Prism monocular (alat bantu melihat jauh)

e. Alat Bantu Auditif (alat bantu pendengaran)

Untuk melatih kepekaan pendengaran anak tunanetra dalam mengikuti pelajaran dapat digunakan alat-alat seperti berikut ini:

- 1) Tape Rekorder Doble Dek (alat rekam/tampil suara model dua tempat kaset)
 - 2) Alat Musik Pukul (alat-alat musik jenis pukul/perkusi)
 - 3) Alat Musik Tiup (alat-alat musik jenis tiup)
- f. Alat Latihan Fisik
- Pada umumnya anak tunanetra mengalami kesulitan dan kelambanan dalam melakukan aktivitas fisik/motorik. Hal ini akan berpengaruh terhadap kekuatan fisiknya yang dapat menimbulkan kerentanan terhadap kesehatannya.
- Untuk mengembangkan kemampuan fisik alat yang dapat digunakan untuk anak tunanetra adalah sebagai berikut.
- 1) Catur tunanetra (papan catur dengan permukaan tidak sama untuk kotak hitam dan putih, sehingga buah catur tidak mudah bergeser)
 - 2) Bridge tunanetra (kartu bridge dilengkapi huruf Braille)
 - 3) Sepak bola dengan bola berbunyi (bola sepak yang dapat menimbulkan bunyi)
 - 4) Papan Keseimbangan (papan titian untuk melatih keseimbangan pada saat berjalan)
 - 5) Power Rider (alat untuk melatih kecekatan motorik)
 - 6) Static Bicycle (speda permanen/tidak dapat melaju)

B. Sarana dan Prasarana Anak Tunarungu

1. Definisi Tunarungu

Menurut Hallahan dan Kauffman (1991:266) Tunarungu yaitu: Hearing Impairment. A generic term indicating a hearing disability that may range in severity from mild to profound it includes the subsets of deaf and hard of hearing. A deaf person is one whose hearing disability precludes succesful processing of linguistic information through audition, with or wothout a hearing aid. A hard of hearing person is one who, generally with the use of a hearing aid, has residual hearing sufficient to enable successful processing of linguistic information through audition

Dari pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa Tunarungu (hearing impaiement) merupakan satu istilah umum yang menunjukkan ketidakmampuan mendengar dari yang ringan sampai

yang berat sekali yang digolongkan kepada tuli (deaf) dan kurang dengar (hard of hearing).

Orang yang tuli (a deaf person) adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar, sehingga mengalami hambatan di dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar (hearing aid). Sedangkan orang yang kurang dengar (a hard of hearing person) adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan alat bantu dengar, sisa pendengarannya cukup memungkinkan untuk keberhasilan memproses informasi bahasa melalui pendengarannya, artinya apabila orang yang kurang dengar tersebut menggunakan alat bantu dengar, ia masih dapat menangkap pembicaraan melalui pendengarannya

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa anak yang tergolong tuli, sulit sekali/tidak dapat menangkap pembicaraan melalui pendengarannya baik dengan memakai atau tidak memakai alat bantu dengar. Sedangkan pada anak yang tergolong kurang dengar, apabila menggunakan alat bantu dengar yang tepat, pendengarannya masih memungkinkan untuk menangkap pembicaraan melalui pendengarannya, bahkan untuk yang tergolong tunarungu ringan, pendengarannya masih memungkinkan untuk dapat menangkap pembicaraan melalui pendengarannya meskipun mengalami kesulitan, tanpa menggunakan alat bantu dengar.

2. Ciri-Ciri Tunarungu

Berikut ciri-ciri anak yang menderita tunarungu:

- a. Tidak mampu mendengar
- b. Terlambat perkembangan bahasa
- c. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi
- d. Kurang/tangga bila diajak bicara
- e. Ucapan kata tidak jelas
- f. Kualitas suara aneh/monoton
- g. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar
- h. Banyak perhatian terhadap getaran
- i. Keluar nanah dari keluar telinga
- j. Terdapat kelainan organ telinga

3. Klasifikasi Tunarungu

Tunarungu dapat diklasifikasikan berdasarkan empat hal, yaitu tingkat kehilangan pendengaran, saat terjadinya ketunarunguan, letak gangguan pendengaran secara anatomis serta etimologi.

a. Berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran yang diperoleh melalui tes dengan menggunakan audiometer, ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Tunarungu Ringan (Mild Hearing Loss)

Siswa yang tergolong tunarungu ringan mengalami kehilangan pendengaran antara 27 – 40 dB. Ia sulit mendengar suara yang jauh membutuhkan tempat duduk yang letaknya strategis.

2) Tunarungu Sedang (Moderate Hearing Loss)

Siswa yang tergolong tunarungu sedang mengalami kehilangan pendengaran antara 41 – 55 dB. Ia dapat mengerti percakapan dari jarak 3 – 5 feet secara berhadapan (face to face), tetapi tidak dapat mengikuti diskusi kelas. Ia membutuhkan alat bantu dengar serta terapi bicara.

3) Tunarungu Agak Berat (Moderately Severe Hearing Loss)

Siswa yang tergolong tunarungu agak berat mengalami pendengaran antara 56 – 70 dB. Ia hanya dapat mendengar suara dari jarak dekat, sehingga ia perlu menggunakan hearing aid. Kepada anak tersebut perlu diberikan latihan pendengaran serta latihan untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasanya.

4) Tunarungu Berat (Severe Hearing Loss)

Siswa yang tergolong tunarungu berat mengalami kehilangan pendengaran antara 71 – 90 dB. Sehingga ia hanya dapat mendengar suara-suara yang keras dari jarak dekat. Siswa tersebut membutuhkan pendidikan khusus secara intensif, alat bantu dengar, serta latihan untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasanya.

5) Tunarungu Berat Sekali (Prof ound Hearing Loss)

Siswa yang tergolong tunarungu berat sekali mengalami kehilangan pendengaran lebih dari 90 dB. Mungkin ia masih mendengar suara yang keras, tetapi ia lebih menyadari suara melalui getarannya (vibratios) dari pada melalui pola suara. Ia juga lebih mengandalkan penglihatannya dari pada pendengarannya dalam berkomunikasi, yaitu melalui penggunaan bahasa isyarat dan membaca ujaran.

- b. Berdasarkan saat terjadinya, ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
- 1) Ketunarunguan prabahasa (prelingual deafness), yaitu kehilangan pendengaran yang terjadi sebelum kemampuan bicara dan bahasa berkembang.
 - 2) Ketunarunguan pasca bahasa (post lingual deafness), yaitu kehilangan pendengaran yang terjadi beberapa tahun setelah kemampuan bicara dan bahasa berkembang.
- c. Berdasarkan letak gangguan pendengaran secara anatomis, ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
- 1) Tunarungu tipe konduktif, yaitu kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan pada telinga bagian luar dan tengah yang berfungsi sebagai alat konduksi atau penghantar getaran suara menuju telinga bagian dalam.
 - 2) Tunarungu tipe sensorineural, yaitu tunarungu yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan pada telinga dalam serta syaraf pendengaran (Nervus Chochlearis)
 - 3) Tunarungu tipe campuran yang merupakan gabungan tipe konduktif dan sensorineural, artinya kerusakan terjadi pada telinga luar/tengah dengan telinga dalam/syaraf pendengaran.
- d. Berdasarkan etiologi atau asal usulnya ketunarunguan diklasifikasikan sebagai berikut :
- 1) Tunarungu endogen, yaitu endogen yang disebabkan oleh faktor genetik (keturunan)
 - 2) Tunarungu eksogen, yaitu tunarungu yang disebabkan oleh faktor nongenetik (bukan keturunan)

4. Sarana Khusus Anak Tunarungu

a. Alat Asesmen

Bervariasinya tingkat kehilangan pendengaran pada anak tunarungu/gangguan komunikasi menuntut adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya.

Asesmen kelainan pendengaran dilakukan untuk mengukur kemampuan pendengaran, atau untuk menentukan tingkat kekuatan suara/sumber bunyi. Alat yang digunakan untuk asesmen pendengaran anak tunarungu adalah seperti berikut:

- 1) Scan Test (alat untuk mendeteksi pendengaran tanpa memerlukan ruang khusus)
- 2) Bunyi-bunyian (alat yang dapat menimbulkan berbagai jenis bunyi)
- 3) Garputala (alat pengukur getar bunyi/suara atau tinggi nada)
- 4) Audiometer & Blanko Audiogram (alat kemampuan pendengaran dengan akurasi tinggi melalui tes audiometri)
- 5) Mobile Sound Proof (kotak kedap suara sebagai perangkat tes audiometri)
- 6) Sound level meter (alat pengukur kuat suara)

b. Hearing Aids (Alat Bantu Dengar)

Anak tunarungu mengalami gangguan pendengaran baik dari ringan sampai berat/total. Untuk membantu pendengarannya dapat dilakukan menggunakan alat bantu dengar (hearing aid) seperti berikut ini.

- 1) Model saku (alat bantu dengar model-saku)
- 2) Model belakang Telinga (alat bantu dengan model ditempel di belakang telinga)
- 3) Model dalam Telinga (alat bantu dengan model dimasukan langsung ke dalam telinga)
- 4) Model kacamata (alat bantu dengar model-kacamata yang diperuntukan sekaligus kelainan penglihatan)

Sementara itu, untuk membantu pendengaran dalam proses pembelajaran dapat digunakan alat-alat berikut ini:

- 1) Hearing Group (alat bantu dengar yang dapat dipergunakan secara kelompok agar anak dapat berkomunikasi dan memanfaatkan sisa pendengaran)
- 2) Loop Induction System (alat bantu dengar yang dapat dipergunakan secara kelompok agar anak dapat berkomunikasi dan memanfaatkan sisa pendengaran dilengkapi head sets)

c. Latihan Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama

Pada umumnya anak tunarungu mengalami gangguan pendengaran baik ringan maupun secara keseluruhan/total, sehingga mengakibatkan gangguan atau hambatan komunikasi dan bahasa.

Untuk pengembangan kemampuan berkomunikasi dan bahasa dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut.

- 1) Cermin (alat untuk memantulkan gambar/bercermin)

- 2) Alat latihan meniup (seruling, kapas, terompet, peluit untuk merangsang pernafasan dalam rangka persiapan perbaikan bicara)
- 3) Alat musik perkusi (gong, gendang, tamborin, triangle, drum, kentongan)
- 4) Sikat getar (sikat dengan bulu-bulu khusus untuk melatih kepekaan terhadap bunyi/getaran)
- 5) Lampu aksen (kontrol suara dengan lampu indikator)
- 6) Meja latihan wicara (meja tempat anak belajar berbicara)
- 7) Speech and Sound Simulation (alat pelatihan bina bicara yang dilengkapi meja dan cermin)
- 8) Spatel (alat bantu untuk membetulkan posisi organ artikulasi terbuat dari stainless steel)
- 9) TV/VCD

d. Alat Bantu Belajar /Akademik

Layanan pendidikan untuk anak tunarungu mencakup membaca, menulis, berhitung, mengembangkan perilaku positif, pengetahuan, dan kreativitas. Karena mengalami kelainan pada pendengarannya, maka anak tunarungu mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

Untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka dibutuhkan layanan alat-alat yang dapat membantu mengembangkan kemampuan akademik anak tunarungu antara lain:

- 1) Miniatur benda (bentuk benda sebenarnya dalam ukuran kecil)
- 2) Finger Alphabet (bentuk simbol huruf dengan isyarat jari tangan)
- 3) Silinder (bentuk-bentuk benda silindris)
- 4) Kartu kata (kartu yang bertuliskan kata)
- 5) Kartu kalimat (kartu yang bertuliskan kalimat singkat)
- 6) Menara segitiga (susunan bentuk segi tiga dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar)
- 7) Menara lingkaran (susunan gelang dari diameter kecil sampai besar)
- 8) Menara segi empat (susunan bentuk segi empat dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar)
- 9) Peta dinding (peta batas wilayah, batas pulau dan batas Negara yang dapat ditempel di dinding)
- 10) Model geometri (model-model bentuk benda beraturan)

- 11) Anatomi telinga (alat bantu menerangkan susunan bagian telinga)
- 12) Model telinga (model bagian-bagian telinga tiga dimensi)
- 13) Torso setengah badan (Model anatomi tubuh-setengah badan)
- 14) Puzzle buah-buahan (potongan-potongan bagian dari buah-buahan)
- 15) Puzzle binatang (puzzle bentuk potongan binatang)
- 16) Puzzle konstruksi (puzzle bentuk konstruksi/rancang bangun sederhana)
- 17) Atlas (peta batas wilayah, batas pulau dan batas Negara)
- 18) Globe (bola dunia yang menggambarkan benua dan batas-batas negara di dunia)
- 19) Miniatur Rumah Adat (contoh rumah-rumah adat dalam ukuran kecil dan proporsional)
- 20) Miniatur Rumah ibadah (contoh rumah-rumah ibadah dalam ukuran kecil dan proporsional)

e. Alat Latihan Fisik

Untuk mengembangkan kemampuan motorik/fisik anak tunarungu, alat-alat yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bola dan Net Volley
- 2) Bola Sepak
- 3) Meja Pingpong
- 4) Raket, Net Bulutangkis dan Suttle Cock
- 5) Power Rider (alat untuk melatih kecekatan motorik)

C. Sarana dan Prasarana Anak Tunagrahita

1. Pengertian Anak Tunagrahita

Tunagrahita adalah seseorang yang memiliki kapasitas intelektual (IQ) di bawah 70 yang disertai ketidak mampuan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sehingga memiliki berbagai masalah sosial, untuk itu diperlukan layanan khusus dan perlakuan pendidikan khusus. Tunagrahita dapat dilihat dari berbagai disiplin ilmu sehingga terdapat beberapa istilah klasifikasi dan karakterisiknya.

Secara umum anak tunagrahita diklasifikasikan menjadi Tunagrahita ringan; dengan tingkat kecerdasan (IQ) mereka berkisar 50-70, dalam penyesuaian sosial maupun bergaul, mampu

menyesuaikan diri pada lingkungan sosial yang lebih luas dan mampu melakukan pekerjaan setingkat semi terampil,

Tunagrahita sedang; dengan tingkat kecerdasan (IQ) mereka berkisar antara 30-50, mampu melakukan ketrampilan mengurus diri sendiri (self-help), mampu melakukan adaptasi sosial di lingkungan terdekat, dan mampu melakukan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan atau bekerja ditempat kerja terlindung (sheltered workshop), dan

Tunagrahita berat dan sangat berat, mereka sepanjang hidupnya selalu tergantung pada bantuan dan perawatan orang lain. Ada yang masih mampu dilatih mengurus sendiri dan berkomunikasi secara sederhana dalam batas tertentu, mereka memiliki tingkat kecerdasan (IQ) kurang dari 30.

Klasifikasi yang berpandangan medis, dalam bidang ini memandang anak tuna grahita dari keadaan tipe klinis. Kelompok tipe klinis diantaranya; Down syndrome, raut muka seperti orang mongol dengan ciri: mata sipit dan miring, lidah tebal dan terbelah-belah serta biasanya menjulur keluar, telinga kecil, tangan kering, semakin dewasa kulitnya semakin kasar, pipi bulat, bibir tebal dan besar, tangan bulat dan lemah, kecil, tulang tengkorak dari muka hingga belakang tampak pendek.

Kretin, nampak seperti orang cebol dengan ciri: badan pendek, kaki tangan pendek, kulit kering, kuku pendek, dan tebal. Hydrocephalus, gejalanya adalah semakin membesarnya Cranium yang disebabkan oleh semakin bertambahnya atau bertimbunnya cairan cerebro-spinal pada kepala. Cairan ini memberi tekanan pada otak besar yang menyebabkan kemunduran fungsi otak.

Microcephalus adalah bentuk ukuran kepala yang kecil, Macrocephalus adalah bentuk ukuran kepala lebih besar dari ukuran normal, Brachicephalus adalah bentuk ukuran kepala yang melebar, Schapocephalus adalah anak yang memiliki ukuran kepala yang panjang sehingga menyerupai menara. Cerebral palsy adalah kelumpuhan pada otak yang mengganggu fungsi kecerdasan, disamping kemungkinan mengganggu pusat koordinasi gerak.

Adapun karakteristik anak tunagrahita dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tingkat ringan, memiliki kemampuan paling tinggi setaraf dengan anak kelas 5 SD, mampu diajar membaca, menulis, dan

berhitung sederhana. Dalam sosialisasi masih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial secara terbatas.

2. Tingkat sedang, mempunyai kemampuan akademik maksimal setaraf dengan anak kelas 2 SD, biasanya sering disertai dengan gangguan motorik dan komunikasi sehingga sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, aktifitas sosialnya hanya sebatas untuk memelihara diri sendiri.
 3. Tingkat berat, anak ini tidak mampu dididik maupun dilatih, kemampuannya paling tinggi setaraf anak pra-sekolah, sepanjang hidupnya anak ini bergantung pada orang lain.
- Tunagrahita

2. Sarana Khusus Anak Tunagrahita

a. Alat asesmen

Bervariasinya tingkat intelegensi dan kognitif anak tunagrahita, menuntut adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Asesmen pada anak tunagrahita dilakukan untuk mengukur tingkat intelegensi dan kognitif, baik secara individual maupun kelompok. Alat untuk asesmen anak tunagrahita dapat digunakan seperti berikut ini:

- 1) Tes Intelegensi WISC-R (alat atau instrumen isian untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang model WISC-R)
- 2) Tes Intelegensi Stanford Binet (alat atau instrumen isian untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang model Stanford Binet)
- 3) Cognitive Ability test (alat atau instrumen isian untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dikuasai)

b. Latihan Sensori Visual

Tingkat kecerdasan anak tunagrahita bervariasi dari yang ringan sampai yang berat. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk berpikir abstrak dan mengalami kesulitan dalam membedakan warna dan mengenali bentuk. Untuk membantu sensori visual anak tunagrahita dapat menggunakan alat sebagai berikut:

- 1) Gradasi Kubus (bentuk-bentuk kubus dengan ukuran yang bervariasi untuk melatih kemampuan/pemahaman volume kubus)
- 2) Gradasi Balok 1 (bentuk-bentuk balok dengan ukuran yang bervariasi satu warna)

- 3) Gradasi Balok 2 (bentuk-bentuk balok dengan ukuran yang bervariasi berbagai warna)
- 4) Silinder 1 (bentuk-bentuk silinder untuk melatih motorik mata-tangan untuk usia dini)
- 5) Silinder 2 (bentuk-bentuk silinder dengan ukuran yang bervariasi)
- 6) Silinder 3 (bentuk-bentuk silinder dengan ukuran, warna dan bahan yang bervariasi)
- 7) Menara segitiga (susunan bentuk segi tiga dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar)
- 8) Menara lingkaran (susunan gelang dari diameter kecil sampai besar)
- 9) Menara segi empat (susunan bentuk segi empat dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar)
- 10) Kotak Silinder (tempat menyimpan silinder-silinder alat bantu mengajar/belajar)
- 11) Multi sensori (alat untuk melatih sensori seperti pemahaman bentuk, ukuran, warna atau klasifikasi objek dan tekstur)
- 12) Puzzle Binatang (puzzle bentuk potongan gambar binatang)
- 13) Puzzle Konstruksi (puzzle bentuk konstruksi/rancang bangun sederhana)
- 14) Puzzle Bola (puzzle bentuk potongan bola/lingkaran)
- 15) Boks Sortir Warna (alat bantu untuk melatih persepsi penglihatan melalui diskriminasi warna)
- 16) Geometri Tiga Dimensi (model-model bentuk benda beraturan tiga dimensi)
- 17) Papan Geometri (Roden Set) (papan latihan bentuk beraturan model Roden)
- 18) Kotak Geometri (Box Shape) (kotak berpenutup berlubang sesuai bentuk-bentuk beraturan)
- 19) Konsentrasi Mekanis (alat latihan konsentrasi gerak mekanik)
- 20) Formmenstockbox Mit (bentuk-bentuk dan warna untuk melatih motorik mata-tangan dan konsep ruang)
- 21) Formmenstockbox (bentuk-bentuk dan warna untuk melatih motorik mata-tangan dan konsep ruang)
- 22) Scheiben-Stepel Puzzle (bentuk-bentuk dan warna untuk melatih motorik pergelangan tangan untuk kesiapan menulis)
- 23) Formstec-Stepel Puzzle (bentuk-bentuk dan warna untuk melatih motorik dan konsentrasi)

- 24) Fadeldreicke (alat untuk melatih ketajaman penglihatan dan koordinasi mata-tangan)
- 25) Schmetterling Puzzle (melatih hubungan ruang dan bentuk dalam kesatuan objek)
- 26) Puzzle Set (berbagai puzzle untuk mengembangkan kreativitas, konsep ruang dan melatih ingatan)
- 27) Streckspiel (alat untuk melatih ketajaman penglihatan dalam dimensi warna dan ukuran, menyortir dan mengklasifikasi objek secara seriasi)
- 28) Geo-Streckbrett (alat untuk melatih ketajaman penglihatan dan koordinasi mata-tangan)
- 29) Rogenbugentorte (alat untuk melatih kemampuan mendiskriminasi warna dan motorik halus)

c. Latihan Sensori Perabaan

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk membedakan dan mengenali bentuk. Untuk membantu sensori perabaan anak tunagrahita dapat digunakan alat sebagai berikut:

- 1) Keping Raba 1 (keping-keping benda dengan ukuran dan tekstur bervariasi)
- 2) Keping Raba 2 (Gradasi Keping) (keping-keping benda dengan ukuran dan tekstur/tingkat kehalusan tinggi)
- 3) Keping Raba 3 (Gradasi Kain) (berbagai kain dengan tingkat kekasaran/pakan/serat kain yang bervariasi)
- 4) Alas Raba (Tactile foot) (melatih kepekaan kaki pada lantai yang dikasarkan/dilapis lantai bertekstur kasar)
- 5) Fub and Hand (Siluet tangan dan kaki)
- 6) Puzzle Pubtastplatten (plat fuzle dengan siluet)
- 7) Tactila (melatih kepekaan perabaan melalui diskriminasi taktual dan visual)
- 8) Balance Labirinth Spirale (alat latih keseimbangan gerak tangan pada arah yang berbeda berbentuk spiral timbul)
- 9) Balance Labirinth Maander (alat latih keseimbangan gerak tangan pada arah yang berbeda berbentuk segi empat timbul)

d. Sensori Pengecap dan Perasa

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk membedakan rasa dan membedakan aroma/bau. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan

sensori pengecap dan perasa. Alat yang digunakan melatih sensori pengecap dan perasa dapat berupa:

- 1) Gelas Rasa (gelas yang berisi cairan/serbuk untuk mengukur tingkat sensitifitas rasa)
- 2) Botol Aroma (botol berisi cairan/serbuk untuk mengukur tingkat sensitifitas bau)
- 3) Tactile Perception (untuk mengukur analisis perabaan)
- 4) Aesthesiometer (untuk mengukur kemampuan rasa kulit)

e. Latihan Bina Diri

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk merawat diri sendiri. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan bina diri. Alat yang digunakan latihan bina diri dapat berupa:

- 1) Berpakaian 1 (bentuk kancing)
- 2) Berpakaian 2 (bentuk resleting)
- 3) Berpakaian 3 (bentuk tali)
- 4) Dressing Frame Sets (rangka pemasangan pakaian-kancing, resleting dan tali dikemas dalam satu bingkai)
- 5) Pasta Gigi dan lain sebagainya

f. Konsep dan Simbol Bilangan

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk memahami konsep dan simbol bilangan. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan memahami konsep dan simbol bilangan. Alat yang digunakan melatih konsep dan simbol bilangan dapat berupa:

- 1) Keping Pecahan (peraga bentuk lingkaran menunjukkan bagian benda, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, dst)
- 2) Balok Bilangan 1 (alat mengenal prinsip bilangan basis bilangan satuan)
- 3) Balok Bilangan 2 (alat mengenal prinsip bilangan basis bilangan puluhan)
- 4) Geometri Tiga Dimensi (berupa bentuk-bentuk geometri tiga dimensi yaitu: bulat, lonjong, segitiga, segiempat, limas, piramid).
- 5) Abacus (alat untuk melatih pemahaman konsep bilangan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan nilai tempat)
- 6) Papan Bilangan (Cukes) (berfungsi untuk melatih kemampuan memahami bilangan dan dasar-dasar operasi hitung)

- 7) Tiang Bilangan (Seguin Bretter) (papan bersekat dengan angka puluhan dan nilai tempat, berfungsi melatih kemampuan memahami bilangan puluhan dan nilai tempat)
- 8) Kotak Bilangan (kotak bersekat dilengkapi angka-angka 1 s.d 10 dengan lubang sekat 50, berfungsi untuk memperkenalkan konsep nilai dan simbol bilangan 1 sampai dengan 10)

g. Kreativitas, Daya Pikir dan Konsentrasi

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk berkreativitas dan pada daya pikirnya. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan memahami kreativitas, daya pikir dan konsentrasi. Alat yang digunakan dapat berupa:

- 1) Tetris (kotak berisi potongan kayu untuk disusun beraturan sesuai petunjuk gambar.
- 2) Box konsentrasi mekanis (alat latihan konsentrasi gerak mekanik bentuk kotak/boks)
- 3) Fuzle konstruksi (puzzle bentuk konstruksi/rancang bangun sederhana)
- 4) Rantai persegi (mata rantai persegi yang dapat disusun/dirangkai menjadi bentuk bangun)
- 5) Rantai bulat (mata rantai bulat yang dapat disusun/dirangkai menjadi bentuk bangun bola)
- 6) Lego/Lazi (potongan-potongan dengan kaki dan kepala yang dapat saling dipasangkan membuat bangun tertentu)

h. Alat Pengajaran Bahasa

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dan berbahasa. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan berbahasa. Alat yang digunakan melatih berbahasa dapat berupa:

- 1) Alphabet Loweincase (simbol-simbol alphabet/abjad huruf besar)
- 2) Alphabet Fibre Box (melatih membaca permulaan dengan cara merangkai huruf menjadi kalimat bahan dari fibre)
- 3) Pias Kata (simbol-simbol kata untuk disusun menjadi kalimat)
- 4) Pias Kalimat (pias-pias kata dan kalimat dilengkapi dengan gambar)

i. Latihan Perseptual Motor

Keterbatasan intelegensi dan kognitif mengakibatkan anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam perseptual motornya. Untuk

itu anak tunagrahita perlu latihan perseptual motor. Alat yang digunakan melatih perseptual motor dapat berupa:

- 1) Bak Pasir (melatih kreativitas bentuk)
- 2) Papan Keseimbangan (papan untuk melatih keseimbangan tubuh)
- 3) Gradasi Papan Titian (papan untuk melatih keseimbangan)
- 4) Tubuh dalam bentuk bertingkat)
- 5) Keping Keseimbangan (tangga bertali-papan berpenopang)
- 6) Power Rider (alat untuk melatih kecekatan motorik)
- 7) Balancier Zehner (berfungsi melatih keseimbangan gerak tubuh yang terdiri dari untaian objek bentuk lingkaran)
- 8) Balamcierbrett (berfungsi melatih dinamisasi tubuh berbentuk lingkaran yang diberi torehan melingkar untuk menaruh bola)
- 9) Balancierwippe (berfungsi melatih keseimbangan tubuh melalui gerak kaki berbentuk bilah papan yang diberi torehan)
- 10) Balancier Steg. (melatih keseimbangan untuk beberapa anak sekaligus yang terdiri dari bilah-bilah papan dan balok yang dapat dirubah)

D. Sarana dan Prasarana Anak Tunadaksa

Secara etiologis, gambaran seseorang yang di identifikasikan mengalami ketunadaksaan yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan.

Secara definitif pengertian tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal sebagai akibat dari luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna sehingga untuk kepentingan pembelajarannya perlu layanan secara khusus.

Menurut Somantri Pengertian Tuna daksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tuna daksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat

kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.

Maka disimpulkan bahwa Tuna Daksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir (pertumbuhan yang tidak sempurna). Sehingga mengakibatkan kecacatan dan membuat anggota tubuh menjadi kehilangan fungsinya.

1. Klasifikasi Tunadaksa

Kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan. Kerusakan tersebut meliputi: Club-foot (kaki seperti tongkat), Club hand (tangan seperti tongkat), Polydactylism (jari yang lebih dari lima pada masing-masing tangan atau kaki), Syndactylism (jari-jari yang berselaput atau menempel satu dengan yang lainnya), Torticollis (gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka), Spina bifida (sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup).

- a. Kerusakan pada waktu kelahiran. Kerusakan tersebut meliputi; Erb's palsy (kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran), dan Fragilitas osium (tulang yang rapuh dan mudah patah)
- b. Infeksi. Kerusakan tersebut meliputi; Tuberculosis tulang (menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku), Osteomyelitis (radang didalam dan di sekeliling sumsum tulang karena bakteri), Poliomyelitis (infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan). Dan adapun kerusakan Pott's disease (tuberculosis sumsum tulang belakang), Still's disease (radang pada tulang yang menyebabkan kerusakan permanen pada tulang), dan Tuberculosis pada lutut atau pada sendi lain.
- c. Kondisi traumatik atau kerusakan traumatik. Kerusakan tersebut meliputi; amputasi (anggota tubuh dibuang akibat kecelakaan), kecelakaan akibat luka bakar, dan patah tulang.
- d. Tumor. Kerusakan tersebut meliputi; Oxostosis (tumor tulang) dan Osteosis fibrosa cystica (kista atau kantung yang berisi cairan didalam tulang).

- e. Kondisi-kondisi lainnya. Kerusakan tersebut meliputi; Flatfeet (telapak kaki yang rata, tidak berteluk), Kyphosis (bagian belakang sumsum tulang belakang yang cekung), Lordosis (bagian muka sumsum tulang yang cekung). Dan kerusakan Perthe's disease (sendi paha yang rusak atau mengalami kelainan), Rickets (tulang yang lunak karena nutrisi, menyebabkan kerusakan tulang dan sendi), Scilosis (tulang belakang yang berputar, bahu, dan paha yang miring).

Sebab-sebab yang timbul sebelum kelahiran; faktor keturunan, trauma dan infeksi pada waktu kehamilan, usia ibu yang sudah lanjut pada waktu melahirkan anak, pendarahan pada waktu kehamilan, dan keguguran yang dialami ibu. Sebab-sebab yang timbul pada waktu kelahiran; penggunaan alat-alat pembantu kelahiran (seperti ting, tabung, vacuum, dan lain-lain) yang tidak lancar, penggunaan obat bius pada waktu kelahiran. Sebab-sebab sesudah kelahiran; infeksi, trauma, tumor dan kondisi-kondisi lainnya

2. Penggolongan Tunadaksa

- a. Tunadaksa taraf ringan. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah tunadaksa murni dan tunadaksa kombinasi ringan. Tunadaksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja. Seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang (buntung) dan cacat fisik lainnya.
- b. Tunadaksa taraf sedang. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah tunadaksa akibat cacat bawaan, cerebral palsy ringan dan polio ringan. Kelompok ini banyak dialami dari tuna akibat cerebral palsy (tunamental) yang disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh dibawah normal.
- c. Tunadaksa taraf berat. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat cerebral palsy berat dan ketunaan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang terkena kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil dan idiot.

3. Sarana Khusus Anak Tunadaksa

- a. Alat Asesmen Kemampuan Gerak

Pada umumnya anak tunadaksa mengalami gangguan perkembangan intelegensi motorik dan mobilitas, baik sebagian

maupun secara keseluruhan. Bervariasinya kondisi fisik dan intelektual anak tunadaksa, menuntut adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Hal ini penting dalam upaya menentukan apa yang dibutuhkan dapat mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya.

Asesmen dilakukan pada anak tunadaksa dilakukan untuk mengetahui keadaan postur tubuh, keseimbangan tubuh, kekuatan otot, mobilitas, intelegensi, serta perabaan. Alat yang digunakan untuk assesmen anak tunadaksa seperti berikut ini:

- 1) Finger Goniometer (alat ukur sendi-daerah gerak)
- 2) Flexiometer (alat ukur kelenturan)
- 3) Plastic Goniometer (alat ukur sendi terbuat dari plastik)
- 4) Reflex Hammer (palu untuk mengukur gerak reflex kaki)
- 5) Posture Evaluation Set (pengukur postur tubuh mengukur kelainan posisi tulang belakang)
- 6) TPD Aesthesiometer (mengukur rasa permukaan kulit pada tubuh)
- 7) Ground Rhytem Tibre Instrument (alat ukur persepsi bunyi)
- 8) Cabinet Geometric Insert (lemari geometris)
- 9) Color Sorting Box (kotak sortasi warna)
- 10) Tactile Board Sets (papan latihan perabaan sets)

b. Alat Latihan Fisik/Bina Gerak

Pada umumnya anak tunadaksa mengalami hambatan dalam pindah diri (ambulasi), dan koordinasi/keseimbangan tubuh. Agar anak tunadaksa dapat melakukan kegiatan hidup sehari-hari diperlukan latihan. Alat-alat yang dapat digunakan dapat berupa:

- 1) Pulley Weight (untuk menguatkan otot tangan dan perut)
- 2) Kanavel Table (untuk menguatkan otot tangan, pergelangan dan jari tangan)
- 3) Squeez Ball (untuk latihan daya remas tangan)
- 4) Restorator Hand (untuk menguatkan otot lengan)
- 5) Restorator Leg (untuk menguatkan otot kaki, tungkai)
- 6) Treadmill Jogger (untuk menguatkan otot kaki, tungkai dan jantung)
- 7) Safety Walking Strap (sabuk pengaman ketika berlatih jalan)

- 8) Straight (tangga) (alat latih memanjat)
- 9) Sand-Bag (pemberat beban pada latihan gerak sendi)
- 10) Exercise Mat (latihan mobilisasi gerak tidur, berguling)
- 11) Incline Mat (latihan untuk merangkak)
- 12) Neuro Development Rolls (latihan untuk merangkak dan keseimbangan dalam posisi duduk)
- 13) Height Adjustable Crawler (latihan untuk merangkak)
- 14) Floor Sitter (untuk latihan duduk tegak di lantai)
- 15) Kursi CP (untuk latihan duduk tegak posisi normal)
- 16) Individual Stand-in Table (untuk latihan berdiri tegak dan aktivitas tangan)
- 17) Walking Paralel (untuk latihan jalan dengan pegangan memajang kiri dan kanan)
- 18) Walker Khusus CP (untuk latihan mobilitas berjalan)
- 19) Vestibular Board (meja goyang untuk latihan keseimbangan)
- 20) Balance Beam Set (papan titian untuk latihan keseimbangan)
- 21) Dynamic Body and Balance (latihan keseimbangan dan meloncat)
- 22) Kolam Bola-bola (untuk latihan koordinasi mata, kaki dan tangan)
- 23) Vibrator (untuk mengatasi kekakuan otot)
- 24) Infra-Red Lamp (Infra Fill) (melancarkan peredaran darah dan relaksasi otot)
- 25) Dual Speed Massager (alat pijat double kecepatan)
- 26) Speed Training Devices (alat latih kecepatan gerakan mulut pada saat bicara)
- 27) Bola karet (untuk latihan motorik)
- 28) Balok berganda (papan untuk melatih keseimbangan tubuh dalam bentuk bertingkat)
- 29) Balok titian (papan untuk melatih keseimbangan tubuh)

c. Alat Bina Diri

Anak tunadaksa mengalami hambatan dalam pindah diri (ambulasi), dan koordinasi/keseimbangan tubuh. Keterbatasan atau hambatan tersebut mengakibatkan anak tunadaksa mengalami kesulitan untuk merawat diri sendiri. Agar anak tuna daksa dapat melakukan perawatan diri dan kegiatan hidup sehari-hari (activity of daily living), maka perlu latihan. Alat-alat yang dapat digunakan dapat berupa:

- 1) Swivel Utensil (sendok khusus yang dimodifikasi untuk anak CP)
- 2) Dressing Frame Set (rangka pemasangan pakaian)
- 3) Lacing Shoes (kaus kaki)
- 4) Deluxe Mobile Commade (alat latih buang air-kloset berjalan)

d. Alat Orthotic dan Prosthetic

Anak tunadaksa mengalami hambatan dalam pindah diri (ambulasi), dan koordinasi/keseimbangan tubuh, karena kondisi tubuh mengalami kelainan. Agar anak tuna daksa dapat melakukan ambulasi dan kegiatan hidup sehari-hari (activity of daily living), maka perlu alat bantu (orthonic dan prosthetic). Alat-alat yang dapat digunakan meliputi:

- 1) Cock-Up Resting Splint (meluruskan permukaan tangan dan jari)
- 2) Rigid Immobilitation Elbow Brace (untuk mengatsi gerakan siku pada posisi fleksi 90 derajat)
- 3) Flexion Extention (untuk membantu gerakan sendi siku)
- 4) Back Splint (untuk menahan sendi lutut agar tidak melinting kebelakang dan sebagi penguat kaki pada saat berjalan)
- 5) Night Splint (untuk mengistirahatkan kaki dalam posisi normal dan mencegah salah bentuk)
- 6) Denish Browns Splint (mengoreksi telapak kaki yang salah bentuk)
- 7) X Splint (mengoreksi bentuk kaki bentuk X)
- 8) O Splint (mengoreksi bentuk kaki bentuk O)
- 9) Long Leg Brace Set (menopang kaki yang layu agar kuat berjalan/berdiri)
- 10) Ankle or Short Leg Brace (untuk meluruskan tendon yang memendek atau meluruskan kaki serang)
- 11) Original Thomas Collar (penyangga leher)
- 12) Simple Cervical Brace (untuk mengoreksi leher dan menegakkan bahu)
- 13) Corsett (mengoreksi kelainan tulang punggung)
- 14) Crutch (kruk) (untuk menopang tubuh)
- 15) Clubfoot walker Shoes ((mengoreksi bentuk kaki yang tidak terkendali pada saat jalan)

- 16) Thomas Heel Shoes (sepatu dengan hak yang bisa miring kiri-kanan)
- 17) Wheel Chair (kursi roda)
- 18) Kaki Palsu Sebatas Lutut
- 19) Kaki Palsu Sampai Paha

e. Alat Bantu Belajar/Akademik

Layanan pendidikan untuk anak tunadaksa mencakup membaca, menulis, berhitung, pengembangan sikap, pengetahuan dan kreativitas. Akibat mengalami kelainan pada motorik dan intelegensinya, maka anak tunadaksa mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis, berhitung.

Untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka dibutuhkan layanan dan peralatan khusus. Alat-alat yang dapat membantu mengembangkan kemampuan akademik pada anak tunadaksa dapat berupa:

- 1) Kartu Abjad untuk pengenalan huruf
- 2) Kartu Kata untuk pengenalan kata
- 3) Kartu Kalimat untuk pengenalan kalimat
- 4) Torso Seluruh Badan untuk pengenalan bagian anggota tubuh manusia
- 5) Geometri Sharpe untuk pengenalan bentuk dan untuk menyortir bentuk geometri
- 6) Menara Gelang untuk latihan koordinasi mata dan tangan
- 7) Menara Segitiga untuk pengenalan bentuk segitiga
- 8) Menara Segiempat untuk pengenalan bentuk segi empat
- 9) Gelas Rasa untuk membedakan macam-macam rasa
- 10) Botol Aroma untuk membedakan macam-macam bau/aroma
- 11) Abacus dan Washer untuk belajar berhitung
- 12) Papan Pasak untuk belajar berhitung dan koordinasi
- 13) Kotak Bilangan untuk belajar berhitung

E. Sarana dan Prasarana Anak Tunalaras

Istilah tunalaras berasal dari kata “tuna” yang berarti kurang dan “laras” berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku yang kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam

masyarakat tempat ia berada. Dalam peraturan pemerintah No.72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal.

Public Law 94-242 (Undang-undang tentang PLB di Amerika Serikat) Mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam kurun satu waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi mempengaruhi prestasi belajar:

- 1) Ketidak mampuan belajar dan tidak dapat diakibatkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan atau kesehatan
- 2) Ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru
- 3) Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal
- 4) Perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus
- 5) Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah

Kauffman (1977) mengemukakan bahwa penyandang tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan.

Sechmid dan Mercer (1981) mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan, seperti anak lain. Ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, saraf atau intelegensia.

Nelson (1981) mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakan menyimpang jika:

- 1) Menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelaminnya
- 2) Penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi
- 3) Penyimpangan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting untuk diperhatikan adalah:

- 1) Adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri
- 2) Penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan

1. Faktor Penyebab Anak Tunalaras

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama seseorang mengalami ketunalarasan. Daniel P. Hallahan, dkk (2009: 270), menuliskan disorders and diseases; pathological family relationship; undesirable experiences at school; and negative cultural influences.” “the causes of emotional or behavioral disorders have been attributed to four major factors: biological disorders and diseases; pathological family relationship; undesirable experiences at school; and negative cultural influences.” Dari keterangan Daniel P. Hallahan, dkk tersebut terdapat empat faktor utama yang menjadi penyebab ketunalarasan yaitu faktor biologis, patologis hubungan keluarga, pengalaman tidak menyenangkan di sekolah, dan pengaruh lingkungan atau budaya yang negatif atau buruk. Berikut ini penjelasan dari keempat faktor-faktor yang menjadi penyebab ketunalarasan tersebut:

a. Faktor Biologi

Perilaku dan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam diri sendiri. Faktor tersebut yaitu “keturunan (genetik), neurologis, faktor biokimia atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut” (Triyanto Pristiwaluyo, 2005: 70). Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami

keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak.

b. Faktor Keluarga

Faktor dari keluarga yang dimaksud adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga. Menurut Triyanto Pristiwaluyo (2005: 73), “tanpa disadari hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak.” Pengaruh dari peraturan, disiplin, dan kepribadian yang dicontohkan atau ditanamkan dari orangtua sangat memengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak.

c. Faktor Sekolah

Ada beberapa anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Pengalaman di sekolah mempunyai kesan dan arti penting bagi anak-anak. Glidewell, dkk (1966) dan Thomas, dkk (1968) dalam Triyanto Pristiwaluyo (2005: 74), mengungkapkan bahwa “kompetensi sosial ketika anak-anak saling berinteraksi dengan perilaku dari guru dan teman sekelas sangat memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku.” Ketika seorang anak mendapat respon negatif dari guru dan teman sekelasnya saat mengalami kesulitan dan kurang keterampilan di sekolah tanpa disadari anak terjatuh dalam interaksi negatif. Anak akan berada dalam keadaan jengkel dan tertekan yang diakibatkan dari tanggapan yang diterimanya baik dari guru maupun teman sekelasnya.

d. Faktor Budaya

Daniel P. Hallahan, dkk (2009: 274), menuliskan “values and behavioral standards are communicated to children through a variety of cultural condition, demands, prohibition, and models.” Yang dimaksudkan adalah standar nilai-nilai perilaku anak didapat melalui tuntutan-tuntutan maupun larangan-larangan, dan model yang disajikan oleh kondisi budaya. Beberapa budaya dapat memengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak misalnya saja contoh tindak kekerasan yang diekspose media (televisi, film, maupun internet),

penyalahgunaan narkoba yang seharusnya sebagai obat medis dan penenang, gaya hidup yang menjurus pada disorientasi seksualitas, tuntutan-tuntutan dalam agama, dan korban kecelakaan nuklir maupun perang.

2. Klasifikasi Anak Tunalaras

Klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosembera, dkk. (1992), anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko rendah dan yang berisiko tinggi, yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial, sedangkan yang berisiko rendah, yaitu autisme dan skizofrenia. Ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus, misalnya anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja, anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dsb. Secara garis besar anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungan dengan itu, William M.C (1975) mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial:

1) The Semi-socialize child

Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Misalnya: keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian anak selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya.

2) Children arrested at a primitive level of socialization

Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya, berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan kearah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia

melakukan apa saja yang dikehendaknya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah.

3) Children with minimum socialization capacity

Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan/kelainan atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois.

b. Anak yang mengalami gangguan emosi, terdiri dari:

1) Neurotic behavior

Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Mereka sering dan mudah dihindangi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif dan perasaan bersalah. Di samping itu kadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya, terlalu memanjakan anak serta pengaruh pendidikan yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat.

2) Children with psychotic processes

Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem syaraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minuman keras dan obat-obatan

3. Karakteristik Anak Tunalaras

Karakteristik yang dikemukakan oleh Hallahan & Kauffmann (1986), berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memeperlihatkan ciri-ciri: suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperahtikan, memecah belah, ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat arah, menganggap enteng, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, mencuri, mengejek, menyangkal berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah.
- b. Anak yang sering merasa cemas dan menarik diri, dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berhasia.
- c. Anak yang kurang dewasa, dengan ciri-ciri, yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor.
- d. Anak yang agresif bersosialisasi, dengan ciri-ciri, yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah.

Menggambarkan karakteristik anak-anak dan remaja dengan gangguan emosi atau perilaku merupakan tantangan yang luar biasa karena gangguan emosi dan perilaku sangat bervariasi. Individu dapat sangat bervariasi dalam kecerdasan, prestasi, keadaan hidup, dan karakteristik emosional dan perilaku.

- a. Karakteristik Akademik
Kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut maka dalam belajarnya memeperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut:
 - 1) Pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata
 - 2) Sering kali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disiplin.

- 3) Sering kali tidak naik kelas atau bahkan ke luar sekolahnya.
 - 4) Sering kali membolos sekolah.
 - 5) Lebih sering dikirim ke klinik bimbingan.
- b. Karakteristik sosial dan emosional
- Karakteristik sosial dan emosional anak tunalaras dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Karakteristik sosial
Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain, dengan ciri-ciri: perilaku tidak diterima masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya, dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menantang, dan tidak dapat bekerja sama.
 - 2) Karakteristik emosional
Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, seperti tekanan batin dan rasa cemas. Adanya rasa gelisah, seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa.
 - 3) Karakteristik fisik/kesehatan
Karakteristik fisik/kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Sering kali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya, ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit. Kelainan lain yang berwujud kelainan fisik, seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok.

4. Sarana Khusus Anak Tunalaras

a. Asesmen Gangguan Perilaku

Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan penyimpangan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terganggunya perilaku anak tunalaras, menuntut adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Hal ini penting dalam upaya menentukan

apa yang dibutuhkan dapat mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya.

Asesmen dilakukan pada anak tunalaras untuk mengetahui penyimpangan perilaku anak. Alat yang digunakan untuk assesmen anak tunalaras seperti berikut ini:

- 1) Adaptive Behavior Inventory for Children
- 2) AAMD Adaptive Behavior Scale

b. Alat Terapi Perilaku

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak tunalaras cenderung untuk merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk mereduksi perilaku yang menyimpang, maka dibutuhkan peralatan khusus. Alat-alat tersebut dapat berupa:

- 1) Pretend Game (untuk membantu anak dalam bersosialisasi dengan orang lain)
- 2) Hide-Way (untuk bermain sembunyi-sembunyian)
- 3) Put me a tune (untuk latihan menuangkan air ke cangkir)
- 4) Copy cats (untuk menjalin interaksi dengan orang lain)
- 5) Jig-saw puzzle (teka-teki untuk melatih memecahkan masalah)
- 6) Puppen house (untuk melatih bermain peran)
- 7) Hunt the Timble (permainan sulap untuk mengingatkan kembali permainan yang telah lalu)
- 8) Sarung tinju (terbuat dari kulit untuk menyalurkan rasa emosional)
- 9) Hoopla (untuk latihan koordinasi mata dan tangan)
- 10) Sand Pits (untuk melatih gerakan tangan dengan menggunakan tangan atau memasukan jari kakinya)
- 11) Animal Matching Games (untuk latihan mencocokkan gambar binatang)
- 12) Organ (untuk melatih kepekaan, kesenian dan mengapresiasi musik)
- 13) Tambur dengan Stick dan Tripod (untuk melatih kepekaan, kesenian dan mengapresiasi musik)
- 14) Rebana (untuk melatih kepekaan, kesenian dan mengapresiasi musik)
- 15) Flute (untuk melatih kepekaan, kesenian dan mengapresiasi musik)
- 16) Torso (untuk mengenal organ tubuh manusia)

- 17) Constructive Puzzle (melatih kemampuan pemecahan masalah)
- 18) Animal Puzzle (untuk mengenal berbagai jenis binatang)
- 19) Fruits Puzzle (untuk mengenal berbagai jenis buah-buahan)

c. Alat Terapi Fisik

Untuk mengembangkan kemampuan motorik/fisik anak tunalaras, alat yang dapat digunakan seperti berikut ini:

- 1) Matras
- 2) Straight-Type Staircase
- 3) Bola Sepak
- 4) Bola, Net Volley
- 5) Meja Pingpong
- 6) Power Rider
- 7) Strickleiter
- 8) Trecketsando (5 flat)
- 9) Rope Lader

REGULASI TERKAIT SARANA PRASARANA SEKOLAH

A. Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

LAHAN

1. Lahan untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	12,7	7,0	4,9
2	7-12	11,1	6,0	4,3
3	13-18	10,6	5,6	4,1
4	19-24	10,3	5,5	4,1

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Luas Minimum Lahan

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	1340	790	710
2	7-12	2270	1240	860
3	13-18	3200	1720	1150
4	19-24	4100	2220	1480

3. Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.
4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang
 - a. Pengendalian Pencemaran Air.
 - b. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - c. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	3,8	4,2	4,4
2	7-12	3,3	3,6	3,8
3	13-18	3,2	3,4	3,5
4	19-24	3,1	3,3	3,4

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Luas Minimum Lantai Bangunan

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lantai bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	400	470	500
2	7-12	680	740	770
3	13-18	960	1030	1050
4	19-24	1230	1330	1380

3. Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
 - b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

4. Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
 - a. Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
 - b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
5. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut.
 - a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
 - b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan.
 - c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
6. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
7. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.
 - a. Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
 - b. Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan.
 - c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
8. Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut.
 - a. Maksimum terdiri dari tiga lantai.
 - b. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
9. Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan berikut.
 - a. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
 - b. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
10. Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.

11. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
12. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.
13. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
14. Pemeliharaan bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut.
 - a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
 - b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
15. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PRASARANA DAN SARAN

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. Ruang kelas,
2. Ruang perpustakaan,
3. Laboratorium IPA,
4. Ruang pimpinan,
5. Ruang guru,
6. Tempat beribadah,
7. Ruang UKS,
8. Jamban,
9. Gudang,
10. Ruang sirkulasi,
11. Tempat bermain/berolahraga.

B. Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)

LAHAN

1. Lahan untuk satuan pendidikan SMP/MTs memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	22,9	-	-
2	4-6	16,0	8,5	-
3	7- 9	13,8	7,5	5,1
4	10-12	12,8	6,8	4,7
5	13-15	12,2	6,6	4,5
6	16-18	11,9	6,3	4,3
7	19-21	11,6	6,2	4,3
8	22-24	11,4	6,1	4,3

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Luas Minimum Lahan

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	1440	-	-
2	4-6	1840	1310	-
3	7- 9	2300	1380	1260
4	10-12	2770	1500	1310
5	13-15	3300	1780	1340

6	16-18	3870	2100	1450
7	19-21	4340	2320	1600
8	22-24	4870	2600	1780

3. Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.
4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
 - a. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - b. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - c. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SMP/MTs memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m^2 /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	6,9	-	-
2	4-6	4,8	5,1	-
3	7-9	4,1	4,5	4,6
4	10-12	3,8	4,1	4,2
5	13-15	3,7	3,9	4,1
6	16-18	3,6	3,8	3,9
7	19-21	3,5	3,7	3,8
8	22-24	3,4	3,6	3,7

- Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Luas Minimum Lantai Bangunan

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lantai bangunan (m^2)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	430	-	-
2	4-6	550	610	-
3	7-9	690	750	780
4	10-12	830	900	930
5	13-15	990	1060	1090
6	16-18	1160	1260	1300
7	19-21	1300	1390	1440
8	22-24	1460	1560	1600

3. Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
 - b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
4. Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
 - a. Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
 - b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
5. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut.
 - a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
 - b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan.
 - c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
6. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
7. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.
 - a. Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
 - b. Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan.
 - c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.

8. Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut.
 - a. Maksimum terdiri dari tiga lantai.
 - b. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
9. Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan berikut.
 - a. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
 - b. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
10. Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt.
11. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
12. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.
13. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
14. Pemeliharaan bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut.
 - a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
 - b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
15. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELENGKAPAN PRASARANA DAN SARANA

Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. ruang laboratorium IPA,
4. ruang pimpinan,
5. ruang guru,

6. ruang tata usaha,
7. tempat beribadah,
8. ruang konseling,
9. ruang UKS,
10. ruang organisasi kesiswaan,
11. jamban,
12. gudang,
13. ruang sirkulasi,
14. tempat bermain/berolahraga.

C. Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA)

LAHAN

1. Lahan untuk satuan pendidikan SMA/MA memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	36,5	-	-
2	4-6	22,8	12,2	-
3	7-9	18,4	9,7	6,7
4	10-12	16,3	8,7	6,0
5	13-15	14,9	7,9	5,4
6	16-18	14,0	7,5	5,1
7	19-21	13,5	7,2	4,9
8	22-24	13,2	7,0	4,8
9	25-27	12,8	6,9	4,7

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum

kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Luas Minimum Lahan

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	2170	-	-
2	4-6	2570	1420	-
3	7- 9	3070	1650	1340

3. Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.
4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
 - a. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - b. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - c. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan
7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SMA/MA memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	10,9	-	-
2	4-6	6,8	7,3	-
3	7-9	5,5	5,8	6,0
4	10-12	4,9	5,2	5,4
5	13-15	4,5	4,7	4,9
6	16-18	4,2	4,5	4,6
7	19-21	4,1	4,3	4,4
8	22-24	3,9	4,2	4,3
9	25-27	3,9	4,1	4,1

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Luas Minimum Lantai Bangunan

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lantai bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	650	-	-
2	4-6	770	840	-
3	7-9	920	990	1020
4	10-12	1080	1150	1180
5	13-15	1220	1310	1360

6	16-18	1350	1450	1500
7	19-21	1530	1630	1680
8	22-24	1700	1830	1890
9	25-27	1870	2000	2060

3. Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
 - b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
4. Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
 - a. Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
 - b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
5. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut.
 - a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
 - b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan.
 - c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
6. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
7. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.
 - a. Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.

- b. Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan.
- c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
8. Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut.
 - a. Maksimum terdiri dari tiga lantai.
 - b. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
9. Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan berikut.
 - a. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
 - b. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
10. Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt.
11. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
12. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.
13. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
14. Pemeliharaan bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut.
 - a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
 - b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
15. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELENGKAPAN PRASARANA DAN SARANA

Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,

3. ruang laboratorium biologi,
4. ruang laboratorium fisika,
5. ruang laboratorium kimia,
6. ruang laboratorium komputer,
7. ruang laboratorium bahasa,
8. ruang pimpinan,
9. ruang guru,
10. ruang tata usaha,
11. tempat beribadah,
12. ruang konseling,
13. ruang UKS,
14. ruang organisasi kesiswaan,
15. jamban,
16. gudang,
17. ruang sirkulasi,
18. tempat bermain/berolahraga.

DAFTAR PUSTAKA

- 2014. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Geniofam.2010.Mengasuh & Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus.Jogjakarta:Garailmu
- Hasan Basri.2009.Filsafat Pendidikan Islam.Bandung:Pustaka Setia
- Mohammad Takdir Ilahi. 2013. Pendidikan Inklusi: Konsep & Aplikasi. Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Mudjito. AK, Harizal, Elfindri. 2012. Pendidikan Inklusif: Tuntunan untuk Guru, Siswa dan Orang Tua anak berkebutuhan Khusus dan layanan Khusus. Jakarta: Baduose Media.
- Solichin Abdul Wahab. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM press.
- Sue Stubbs. 2002. Pendidikan Inklusif: Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber. Judul asli: Inklusif Education: Where There Are Few Resources. Dialihbahsakan oleh: Susi Septaviana. Bandung: Jurusan Pendidikan Luar Biasa UPI.
- Sunardi (2009). Issues and Problems on Implementation of inclusive Education for Disable Children in Indonesia. Tsukuba: CRICED – University of Tsukuba.
- Suyanto & Mudjito. AK. 2012. Masa Depan Pendidikan Inklusif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.
- UNESCO. 2009. Policy Guideline on Inclusion in Education. France: the United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization
- Wardani, dkk.2013.Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.Tangerang Selatan:Universitas Terbuka
- William N. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua. Judul asli: Public Policy Analysis: An Introduction. Second Edition. Diterjemahkan: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press